

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR YANG
BERKELANJUTAN BAGI PENGEMBANGAN
KAWASAN PESISIR DI KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR**

SKRIPSI

Oleh

**MUHAMMAD DESFAR RAMDAN
NIM 45 17 042 035**



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2022**

**PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR YANG
BERKELANJUTAN BAGI PENGEMBANGAN
KAWASAN PESISIR DI KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Teknik (S.T)

UNIVERSITAS

Oleh

BOSOWA

**MUHAMMAD DESFAR RAMDAN
NIM 45 17 042 035**

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

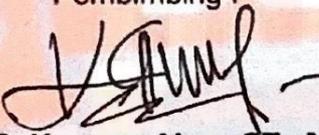
PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR YANG BERKELANJUTAN BAGI PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR DI KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR

Disusun dan diajukan oleh

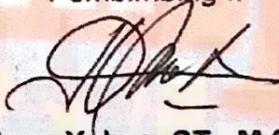
MUHAMMAD DESFAR RAMDAN
NIM. 45 17 042 035

Menyetujui :

Pembimbing I


Dr. S. Kamran Aksa, ST., MT
NIDN: 09-110774-01

Pembimbing II

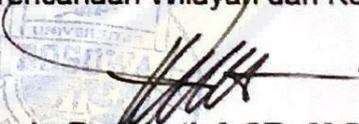

Ilham Yahya, ST., M.SP
NIDN: 09-1100481-05

Mengetahui :

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Bosowa Makassar


Dr. Ridwan, ST., M.Si
NIDN: 09-101271-01

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota


Dr. Ir. Rudi Latief, ST., M.Si
NIDN: 09-170768-01

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, Nomor. A 205/SK/FT/UNIBOS/II/2022 pada tanggal 22 Februari 2022 Tentang Panitia dan Pengangkatan Dosen Penguji Ujian Akhir Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, maka :

Pada hari/tanggal : Selasa, 22 Februari 2022

Skripsi atas nama : Muhammad Desfar Ramdan

NIM : 45 17 042 035

Telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Negara dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Negara Jenjang Strata Satu (S-1), pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. S. Kamran Aksa, ST., MT

Sekretaris : Ilham Yahya, ST., M.SP

Anggota : 1. Dr. Ir. Fuad Azis, MT

2. Jufriadi, ST., M.SP

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Bosowa Makassar



Dr. Ridwan, ST., M.Si
NIDN: 09-101271-01

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota



Dr. Ir. Rudi Latief, ST., M.Si
NIDN: 09-170768-01

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

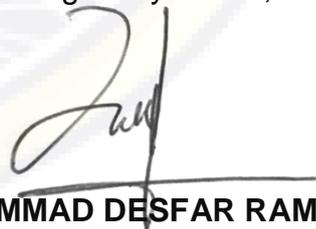
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD DESFAR RAMDAN
NIM : 45 17 042 035
Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis/ajukan ini benar-benar hasil karya sendiri, dengan arahan komisi pembimbing dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebahagian atau keseluruhan Skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima segala konsekuensi/sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2022

Yang menyatakan,



MUHAMMAD DESFAR RAMDAN

ABSTRAK

Muhammad Desfar Ramdan, 2022 *“Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Yang Berkelanjutan Bagi Pengembangan Kawasan Pesisir Di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar”*. Dibimbing Oleh **S. Kamran Aksa dan Ilham Yahya.**

Kabupaten Takalar merupakan salah satu wilayah yang mempunyai potensi sumber daya pesisir yang sangat besar,. Salah satu kawasan pesisir di Kabupaten Takalar yang memiliki potensi sumber daya pesisir yang banyak yaitu Kecamatan Galesong. Potensi sumber daya pesisir Kecamatan Galesong adalah hasil produksi perikanan. Potensi sumber daya lain yang dapat dikembangkan adalah pengembangan pariwisata. Dari potensi tersebut maka diperlukan upaya pengembangan kawasan pesisir dengan pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi sumber daya pesisir dan menentukan program pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan dalam pengembangan kawasan pesisir di Kecamatan Galesong. Pengelolaan sumber daya pesisir berkelanjutan ditetapkan berdasarkan hasil dari analisis SWOT. Hasil penelitian diperoleh bahwa wilayah pesisir di Kecamatan Galesong yang memiliki tingkat perkembangan kondisi potensi sumber daya pesisir tertinggi terletak pada Desa Boddia yang potensi pengembangannya adalah pariwisata dan terumbu karang, kemudian tingkat perkembangan yang sedang terletak pada Desa Mappakalompo dengan potensi pengembangan ikan bandeng, udang, dan mangrove. Dan tingkat perkembangan yang rendah terletak pada Desa Galesong Baru dengan potensi sumber daya pesisir yang bisa ditingkatkan adalah ikan bandeng, dan jenis ikan lainnya, dari hasil tersebut maka diperlukan beberapa upaya peningkatan potensi, diantaranya adalah menyiapkan lahan untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan, melakukan proses pelestarian dan pemeliharaan ekosistem pesisir, pengelolaan dan pengembangan sumber daya pesisir yang benar secara berkelanjutan, agar menumbuhkan perekonomian masyarakat, sumber daya pesisir juga tidak tereksplorasi secara massal dan tidak mengakibatkan dampak buruk dikemudian hari.

Kata Kunci: Potensi, Pengembangan, Pengelolaan Sumber daya Pesisir.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamin. Segala puji syukur tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Tunggal, Pencipta Alam semesta beserta isinya dan tempat berlindung bagi umat Nya. Sholawat serta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman. Atas limpah rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Bagi Pengembangan Kawasan Pesisir Di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar”** penelitian ini berisikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sumber daya pesisir dan strategi pengembangan potensi kawasan pesisir di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta **Surianti, B.Sc** dan Ayahanda **Muhammad Arifin, ST** yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayangnya serta perhatian moril dan materilnya.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas segala didikan serta budi baik dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Olehnya dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Allah Subhanahu Wa Ta'ala** yang Maha Pemberi segalanya atas rahmat, karunia dan kemudahan yang diberikan kepada penyusun.
2. Bapak **Prof. Dr. Ir. M. Saleh Pallu, M.Eng** selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak **Dr. Ridwan, ST., M.Si** selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak **Dr. Ir. Rudi Latief, M.Si** selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa Makassar.
5. Bapak **Dr. S. Kamran Aksa, ST., MT** selaku Pembimbing pertama yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis demi kesempurnaan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak **Ilham Yahya, ST, MSP** selaku Pembimbing kedua yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis demi kesempurnaan dan penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak **Jufriadi, ST, MSP** selaku Penasihat Akademik yang sedia memberikan arahan akademik kepada penulis
8. Seluruh Dosen Prodi Perencanaan Wilayah Dan Kota **Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar** yang tidak saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama duduk di bangku perkuliahan sejak awal sampai selesai.
9. Pihak Instansi pemerintah Kecamatan Galesong yang telah memberikan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.
10. **Hilda Yana SA, S.Sos** yang selalu memberikan do'a, dukungan, dan motivasi yang membuat saya selalu semangat sampai saat ini.
11. Kepada Saudara/I**Ari Ahmad, Eza Anugrah, Apris Sural Jayardi, Muhajirin Muhid** yang telah bersedia menemani penulis dikesehariannya dan memberikan dukungan serta motivasi.
12. Kepada seluruh teman, sahabat dan saudara-saudaraku seperjuangan **PWK 2017 (GRID17)**, yang selalu memberikan kritik dan dukungan serta memberikan cerita baru dalam kehidupan penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi sistematika penulisan dan isinya. Oleh karena itu, dengan pikiran dan hati yang terbuka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini kedepannya. Besar harapan penulis penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Wassalamu'Alaikum Wr. Wb.

Makassar, Januari 2022

Penulis



MUHAMMAD DESFAR RAMDAN

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Ruang Lingkup Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Wilayah Pesisir	11
B. Karakteristik Wilayah Pesisir	13
C. Pengertian Pengembangan Wilayah Pesisir	14
D. Pendekatan Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir	19
E. Potensi Sumber Daya Pesisir	22
F. Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir	23
G. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Yang Berkelanjutan Dan Terpadu	30
1. Pengelolaan Pesisir Secara Berkelanjutan	30
2. Pengelolaan Pesisir Terpadu	31
3. Isu-Isu Sumberdaya Pesisir	35
4. Tujuan Pengembangan Wilayah Pesisir	49
5. Manfaat Pengelolaan Wilayah Pesisir	41
6. Prinsip Dasar (Asas) Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu	43

7. Penyusunan Rencana Strategi Dan Arahana Pengelolaan ...	44
H. Kerangka Pikir	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	47
C. Waktu Penelitian.....	48
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Variabel Penelitian.....	52
G. Metode Analisis Data.....	53
H. Definisi Operasional	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Takalar	57
1. Aspek Fisik Dasar	57
a. Letak Geografis dan Batas Wilayah Administrasi.....	57
b. Kondisi Topografi	62
c. Kondisi Geologi.....	64
d. Kondisi Klimatologi.....	66
e. Kondisi Hidrologi	68
B. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Galesong	70
1. Aspek Fisik Dasar	70
a. Letak Geografis dan Batas Wilayah Administrasi.....	70
b. Kondisi Topografi	74
c. Kondisi Geologi.....	76
d. Kondisi Klimatologi.....	78
e. Kondisi Hidrologi	80
2. Kependudukan	81
a. Jumlah Penduduk	81
b. Perkembangan Penduduk Dua Tahun Terakhir	82
c. Kepadatan Penduduk.....	82
d. Penduduk Dengan Mata Pencaharian	83
e. Tingkat Harapan Hidup	84

f. Produk Domestik Regional Bruto	85
g. Kondisi Fisik Pantai Dan Sumber Daya Pesisir.....	87
C. Fasilitas Pelayanan Sosial Ekonomi	103
1. Sarana Perkantoran	103
2. Sarana Perdagangan	105
3. Sarana Pendidikan	107
4. Sarana Kesehatan.....	109
5. Sarana Peribadatan	111
D. Kaitan Lokasi Penelitian Dengan Kecamatan Lain	113
E. Analisis – Analisis Pengembangan Kawasan Pesisir Dengan Pendekatan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Yang Berkelanjutan.....	114
1. Analisis SWOT	114
BAB IV PENUTUP	128
A. Kesimpulan.....	128
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA.....	

DAFTAR TABEL

3.1	Variabel Penelitian.....	52
3.2	Model Matriks Analisis SWOT	54
4.1	Jumlah Desa/Kelurahan Tiap Kecamatan Di Kabupaten Takalar Tahun 2019	58
4.2	Luas Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Takalar Tahun 2019.....	58
4.3	Luas Desa Di Kecamatan Galesong Tahun 2019.....	72
4.4	Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan Di Kecamatan Galesong Tahun 2019	78
4.5	Jumlah Penduduk Kecamatan Galesong Tahun 2019.....	81
4.6	Perkembangan Penduduk Tiap Desa Di Kecamatan Galesong Tahun 2019	82
4.7	Kepadatan Penduduk Di Kecamatan Galesong Tahun 2019.....	83
4.8	Penduduk Menurut Mata Pencaharian Pokok Tiap Desa Di Kecamatan Galesong Tahun 2019.....	84
4.9	Angka Harapan Hidup Dan Indeks Kualitas Hidup Kabupaten Takalar 2015-2019	85
4.10	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Takalar (Miliar Rupiah) Tahun 2015-2019	86
4.11	Jumlah Perahu/Motor Tempel Menurut Jenisnya Di Kecamatan Galesong Tahun 2019.....	95
4.12	Jumlah Alat Penangkapan Ikan (Unit) Menurut Jenisnya Di Kecamatan Galesong Tahun 2019.....	96
4.13	Luas Areal (Ha) Budidaya Ikan Di Kecamatan Galesong Tahun 2019 97	
4.14	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Di Kecamatan Galesong Tahun 2019	98

4.15 Jumlah Nelayan (Orang) Menurut Jenisnya Di Kecamatan Galesong Tahun 2019.....	99
4.16 Jumlah Produksi Tambak Menurut Jenisnya Di Kecamatan Galesong Tahun 2019.....	100
4.17 Jumlah Produksi Ikan Di Perairan Umum Menurut Jenisnya Di Kecamatan Galesong Tahun 2019.....	101
4.18 Jumlah Perdagangan Di Kecamatan Galesong Tahun 2019.....	105
4.19 Jumlah Fasilitas Pendidikan Di Kecamatan Galesong Tahun 2019.....	107
4.20 Jumlah Fasilitas Kesehatan Di Kecamatan Galesong Tahun 2019.....	109
4.21 Jumlah Fasilitas Peribadatan Di Kecamatan Galesong Tahun 2019.....	111
4.22 Matriks Analisis SWOT Pengembangan Sumber Daya Pesisir Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.....	118
4.23 Internal Strategi Factor Analisis (IFAS).....	121
4.24 Eksternal Strategi Factor Analisis (EFAS).....	123

DAFTAR GAMBAR

2.1 Hubungan Antara Wilayah Pesisir Dan Sistem Sumber Daya Pesisir	24
4.1 Luas Kecamatan Di Kabupaten Takalar Tahun 2019	59
4.2 Peta Administrasi Kabupaten Takalar.....	61
4.3 Peta Topografi Kabupaten Takalar	63
4.4 Peta Geologi Kabupaten Takalar.....	65
4.5 Peta Klimatologi Kabupaten Takalar.....	67
4.6 Peta Hidrologi Kecamatan Galesong.....	69
4.7 Peta Administrasi Kecamatan Galesong	71
4.8 Luas Desa Di Kecamatan Galesong Tahun 2019.....	72
4.9 Peta Topografi Kecamatan Galesong.....	75
4.10 Peta Geologi Kecamatan Galesong.....	77
4.11 Peta Klimatologi Kecamatan Galesong	79
4.12 Grafik Presentase Penutupan Karang Dan Alga Di Perairan Pulau Sanrobengi.....	92
4.13 Tambak Desa Mappakalombo	100
4.14 Tambak Desa Galesong Baru.....	100
4.15 Peta Potensi SDA Pesisir Kecamatan Galesong	102
4.16 Peta Fasilitas Sarana Perkantoran	104
4.17 Peta Fasilitas Sarana Perdagangan	106
4.18 Peta Fasilitas Sarana Pendidikan.....	108
4.19 Peta Fasilitas Sarana Kesehatan.....	110
4.20 Peta Fasilitas Sarana Peribadatan	112
4.21 Peta Keterkaitan Lokasi Penelitian Dengan Kecamatan Lain.....	113
4.22 Peta Konsep Pengembangan Kawasan Pesisir.....	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.504 pulau dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km. di sepanjang garis pantai ini terdapat wilayah pesisir yang relatif sempit tetapi memiliki potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati, sumber daya buatan, serta jasa lingkungan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Potensi-potensi tersebut perlu dikelola secara terpadu agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Wilayah pesisir secara ekologis merupakan daerah pertemuan antara ekosistem darat dan laut. Ke arah darat meliputi bagian tanah, baik yang kering maupun yang terendam air laut, dan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik laut seperti pasang surut, ombak dan gelombang serta perembesan air laut. Yang ke arah laut mencakup bagian perairan laut yang dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar dari sungai maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan, pembuangan limbah, perluasan permukiman serta intensifikasi pertanian (Anggoro, S, 2004)

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi laut yang sangat besar. Namun, selama ini potensi laut tersebut belum dimanfaatkan dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa pada umumnya, dan pemasukan devisa negara khususnya. Bahkan, sebagian besar

hasil pemanfaatan laut selama ini justru “lari” atau “tercuri” ke luar negeri oleh para nelayan asing yang memiliki perlengkapan modern dan beroperasi hingga perairan Indonesia secara ilegal. Dalam konteks ilmiah inilah upaya pemanfaatan laut Indonesia secara maksimal tidak saja tepat tetapi juga merupakan suatu keharusan. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah pemanfaatan laut yang bagaimana?, Seharusnya adalah pemanfaatan laut yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat secara lestari. Dalam konteks inilah kerjasama dalam pengelolaan potensi sumber daya tersebut sangat diperlukan karena yang diinginkan bukan saja peningkatan hasil pemanfaatan yang dinikmati seluas-luasnya oleh masyarakat (Lippitt *et. al.*, 2002)

Adapun dengan berkembangnya globalisasi industri dan perdagangan bebas, telah menyebabkan semakin meningkatnya pemanfaatan dan pemberdayagunaan wilayah pesisir, yang diiringi dengan meningkatnya kesadaran manusia terhadap kondisi kualitas lingkungan hidup di wilayah pesisir.

Berbagai aktifitas pembangunan di wilayah pesisir, seperti permukiman, industri dan perdagangan, kegiatan transportasi maupun pariwisata, secara signifikan memang telah memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan. Namun perkembangan ini juga turut memberikan dampak terhadap kelestarian dan daya dukung lingkungan maupun perubahan-perubahan terhadap kondisi sosial di wilayah ini yang pada

gilirannya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di dalamnya.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2014 pasal 6 dinyatakan bahwa pengelolaan sumber daya di daratan, lautan dan di udara perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan dalam pola pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam suatu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kemampuan lingkungan sesuai dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Khusus untuk ruang laut dan udara akan diatur dengan aturan lain.

Karena belum adanya aturan yang jelas mengenai pemanfaatan wilayah laut maka untuk itu telah ditetapkan pedoman umum penyusunan rencana tata ruang khususnya pengelolaan pesisir sehingga dikeluarkan Kepmen No. 34 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang selanjutnya mengalami amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah), akhirnya menuntut praktek pengelolaan yang tepat di tingkat daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah) menjelaskan bahwa prinsip utama pengelolaan sumber daya alam menurut perspektif kemandirian lokal adalah ekstraksi sumber daya pada suatu wilayah tidak boleh mengurangi tingkat kualitas tatanannya. Oleh karena itu ekstraksi dimaksud secara langsung

mengurangi kualitas tatanan itu dari ketersediaan sumber daya untuk mendukung pengembangan tatanan dimasa yang akan datang, maka ekstraksi tersebut harus dikompensasi dengan upaya-upaya peningkatan kualitas SDM dan peningkatan sarana dan prasarana wilayah.

Pengaturan pengelolaan sumber daya pesisir yang diharapkan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan tetap mengedepankan keberlanjutan sumber daya pesisir yang tersedia menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bagi pemerintah di daerah tersebut.

Pembangunan di wilayah pesisir dapat meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan lapangan kerja. Karena itu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dikelola secara terpadu dan berkelanjutan dengan cara memanfaatkan sumber-sumber pertumbuhan yang sudah ada dan sumber-sumber pertumbuhan yang baru (Jufriadi, 2014)

Sulawesi selatan merupakan salah satu Provinsi terbesar di Indonesia dengan panjang pantai 1.973 km dan luas perairan lautnya kurang lebih 48.000 km², memiliki potensi yang sangat kaya akan berbagai jenis ikan dan kerang-kerangan sebagai sumber protein hewani, mangrove, terumbu karang, padang lamun dan estuaria sebagai tempat memilah dan mencari makan berbagai biota laut.

Kabupaten Takalar merupakan salah satu kawasan yang mempunyai potensi sumber daya pesisir yang sangat besar, terletak disepanjang pesisir

pantai barat Selat Makassar sampai dengan pesisir pantai Selatan Laut Flores dan beribu kota di Pattalassang.

Potensi sumber daya pesisir yang ada sekarang dapat dipertahankan dan dikembangkan seperti hasil produksi perikanan yang hingga saat ini semakin meningkat dan adapun yang tahun ke tahun menurun, seperti jenis ikan lamuru pada tahun 2013 per tonnya 46.18 sedangkan pada tahun 2014 per tonnya 9.20, terlihat hasil produksinya sangat menurun. Adapun jenis ikan lain yang dari tahun ke tahun meningkat yaitu jenis ikan kerapu pada tahun 2013 per tonnya 27.808 sedangkan pada tahun 2014 per tonnya 125 (Kecamatan Galesong dalam angka 2016). Kegiatan lain yang dapat dikembangkan adalah pengembangan pariwisata.

Inisiatif pengelolaan Kawasan Pesisir Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar membutuhkan respon positif dari setiap aktor utama di setiap lokalitas. Respon yang dimaksud tidak hanya menyangkut kesiapan menerima inisiatif ini tetap kesiapan konstitusional di tingkat lokal, kesiapan masyarakat yang diturunkan dalam bentuk kesiapan aksi bersama dalam hal ini kesiapan di tingkat komunitas atau masyarakat pesisir di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Tantangan ini semakin nyata di kawasan pesisir dan laut, dimana dituntut keterpaduan pengelolaan untuk mewujudkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi dan perlindungan kualitas lingkungan.

Berkaitan dengan potensi yang dimiliki wilayah pesisir Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar pada umumnya, maka di masa yang akan datang menjadi tantangan bagi kawasan tersebut untuk merebut peluang

potensi yang ada, sehingga perencanaan penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu diarahkan secara terpadu guna mengoptimalkan antara kepentingan untuk memelihara lingkungan dengan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara menyeluruh. Sesuai dengan itu, maka diperlukan arahan penataan ruang untuk mengoptimalkan dan mengembangkan potensi sumber daya alam pesisir Kabupaten Takalar khususnya di Kecamatan Galesong.

Berdasarkan permasalahan tersebut yang melatar belakangi penelitian dengan judul “***Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Yang Berkelanjutan Bagi Pengembangan Kawasan Pesisir Di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar***” yang bertujuan untuk mengetahui kondisi dan pengembangan kawasan pesisir dengan pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

“Bagaimana strategi pengembangan kawasan pesisir dengan pengelolaan berkelanjutan di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar ?”

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka adapun tujuan dan manfaat dalam penelitian ini yaitu :

1. Tujuan

Untuk mengetahui strategi pengembangan kawasan pesisir dengan pengelolaan sumber daya pesisir di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar

2. Manfaat

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha pesisir di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar

D. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan pada penelitian kali ini difokuskan pada pengelolaan sumber daya pesisir di kawasan pesisir Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Adapun lingkup pembahasan materinya yaitu identifikasi sumber daya pesisir dan mengidentifikasi tingkat perkembangan wilayah pesisir dengan pendekatan pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menguraikan rangkaian penyusunan penulisan pada penelitian ini dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah mengetahui bagian-bagian penulisan. Adapun sistematika pembahasan.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini memuat literatur yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran penulisan yang selanjutnya digunakan dalam melakukan analisa-analisa pembahasan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, variable penelitian, dan definisi operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum wilayah Kabupaten Takalar dan Kecamatan Galesong sebagai wilayah penelitian, tahapan analisis yang digunakan adalah Analisis SWOT

BAB VPENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pengembangan wilayah adalah upaya pemanfaatan sumber daya wilayah untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumber daya wilayah memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Pengembangan wilayah yang agresif, eksploitatif, dan ekspansif akan berakibat pada menurunnya kemampuan daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya, yang pada akhirnya sangat merugikan sistem wilayah itu sendiri. Oleh karena itu, sumber daya wilayah senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan (Lutfi Muta'ali, 2012).

Pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat meningkatkan kualitas hidup dan menyediakan lapangan kerja. Karena itu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dapat dikelola secara terpadu dan berkelanjutan. Hal tersebut dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pertumbuhan yang sudah ada dan sumber-sumber pertumbuhan baru. Sumber daya pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil merupakan salah satu sumber daya yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan dapat dijadikan sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian nasional (Jufriadi, 2014).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah) menjelaskan bahwa prinsip utama pengelolaan sumber daya alam menurut perspektif kemandirian lokal adalah ekstraksi sumber daya pada suatu wilayah tidak boleh mengurangi tingkat kualitas tatanannya. Oleh karena itu ekstraksi dimaksud secara langsung mengurangi kualitas tatanan itu dari ketersediaan sumber daya untuk mendukung pengembangan tatanan dimasa yang akan datang, maka ekstraksi tersebut harus dikompensasi dengan upaya-upaya peningkatan kualitas SDM dan peningkatan sarana dan prasarana wilayah.

Akses untuk memperoleh manfaat dari sumber daya jika tidak diatur dengan kebijakan dan regulasi yang berpihak terhadap kelestarian dan keberlanjutan akan menimbulkan dampak eksploitasi terhadap sumber daya. Dalam beberapa kasus, sumber daya pesisir seringkali mendapat beban yang sangat berat, selain karena posisinya yang berada didaerah hilir, juga struktur wilayahnya yang sangat terbuka dan selama ini tidak mendapat prioritas pembangunan akibat paradigma pembangunan yang sangat sektoral.(Bengen, 2009).

A. Pengertian Wilayah Pesisir

Sesuai kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat meliputi daratan baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Kearah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat

seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan kegiatan manusia seperti pertanian dan pencemaran (Brahtz 1972; Soegiarto 1976 dalam Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau Kecil, 2003). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pengertian wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ditegaskan bahwa Perairan pesisir dan laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuaria teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna (Beatly 1994 dalam Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau Kecil 2003). Menurut (Dahuri et al. 1996) mendefinisikan wilayah pesisir sebagai suatu wilayah perairan antara daratan dan lautan dimana ke arah darat adalah jarak secara arbiter dan rata-rata pasang tertinggi dan batas ke arah laut adalah yuridiksi wilayah propinsi atau state di suatu Negara. Kawasan pesisir merupakan wilayah peralihan antara daratan dan perairan laut. Secara fisiologi didefinisikan sebagai wilayah antara garis pantai hingga ke arah daratan yang masih dipengaruhi pasang surut air laut, dengan lebar yang ditentukan oleh kelandaian pantai dan dasar laut, serta dibentuk oleh endapan lempung hingga pasir yang bersifat lepas dan kadang materinya berupa kerikil.

Menurut (Dahuri et al. 1996), dalam cakupan horizontal, wilayah pesisir dibatasi oleh dua garis hipotetik. Pertama, ke arah darat wilayah ini mencakup

daerah-daerah dimana proses-proses oseanografi (angin laut, pasang-surut, pengaruh air laut dan lain-lain) yang masih dapat dirasakan pengaruhnya. Kedua, ke arah laut daerah-daerah dimana akibat proses-proses yang terjadi di darat (sedimentasi, arus sungai, pengaruh air tawar, dan lain-lain), maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Wilayah perbatasan ini mempertemukan lahan darat dan massa air yang berasal dari daratan yang relatif tinggi (elevasi landai, curam atau sedang) dengan massa air laut yang relatif rendah, datar, dan jauh lebih besar volumenya. Karakteristik yang demikian oleh (Ghofar, 2004), dinyatakan bahwa secara alamiah wilayah ini sering disebut sebagai wilayah jebakan nutrient.

B. Karakteristik Wilayah Pesisir

Merupakan wilayah campuran antara laut, darat, dan udara, bentuk wilayah ini merupakan hasil keseimbangan dinamis dari suatu proses penghancuran dan pembangunan dari ketiga unsur tersebut. Hal ini terlihat dari adanya gradasi butiran sedimen sebagai hasil pengikisan batuan padat dan keras oleh unsur alam.

Wilayah pesisir berfungsi sebagai zona penyangga (*buffer zone*) dan merupakan habitat dari berbagai jenis burung migran, serta habitat bagi berbagai jenis ikan dan udang. Wilayah ini memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan menjadi sumber zat organik yang penting dalam rantai makanan di laut. (*natural coastal defence*)

- Terdiri dari habitat dan ekosistem yang menyediakan barang dan jasa (*goods and service*) bagi komunitas pesisir dan pemanfaat lain (*beneficiaries*)
- Adanya kompetisi antara berbagai kepentingan
- Sebagai backbone dari kegiatan ekonomi nasional
- Merupakan wilayah strategis, didasarkan atas fakta:
 - ✓ Garis pantai Indonesia 81.000 km pada 17.508 pulau (terbanyak di dunia)
 - ✓ Penyebaran penduduk terbesar (cikal bakal urbanisasi)
 - ✓ Potensi sumber daya kelautan yang kaya (biodiversity, pertambangan, perikanan, pariwisata, infrastruktur, dsb)
 - ✓ Sumber daya masa depan (*future resources*) akibat ketersediaan wilayah darat yang semakin terbatas
 - ✓ Wilayah hankam (perbatasan)

C. Pengembangan Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir dan lautan dari konsep wilayah bisa termasuk dalam wilayah homogen, wilayah nodal, wilayah administrasi dan wilayah perencanaan. Sebagai wilayah homogen, wilayah pesisir merupakan wilayah sentra produksi ikan, namun bisa juga dikatakan sebagai wilayah dengan tingkat pendapatan penduduknya tergolong di bawah garis kemiskinan. Sebagai wilayah nodal, wilayah pesisir seringkali sebagai wilayah belakang dengan wilayah perkotaan sebagai intinya, bahkan seringkali wilayah pesisir

dianggap sebagai halaman belakang yang merupakan tempat pembuangan segala macam limbah. Sehubungan dengan fungsinya sebagai wilayah belakang, maka wilayah pesisir merupakan penyedia input (pasar input) bagi inti dan pasar bagi barang-barang jadi (output) dari inti. Sebagai wilayah administrasi, wilayah pesisir juga dapat berupa wilayah yang relatif kecil kecamatan atau desa, namun juga dapat berupa kabupaten/kota dalam bentuk pulau kecil. Sedangkan sebagai wilayah perencanaan, batas wilayah pesisir lebih ditentukan oleh ekologis sehingga melewati batas-batas satuan wilayah administratif. Terganggunya keseimbangan biofisik-ekologis dalam wilayah ini akan berdampak negatif yang tidak hanya dirasakan oleh daerah tersebut tapi juga daerah sekitarnya yang merupakan kesatuan wilayah sistem (kawasan). Oleh karena itu dalam pembangunan dan pengembangan wilayah diperlukan suatu perencanaan terpadu yang tidak menutup kemungkinan adalah lintas batas administratif (Budiharsono, 2001)

Kawasan pesisir yang memiliki posisi strategis di dalam struktur alokasi dan distribusi sumberdaya ekonomi disebut memiliki *locational rent* yang tinggi. Nilai ekonomi kawasan pesisir, selain ditentukan oleh nilai lokasi (*locational rent*), setidaknya juga mengandung tiga unsur economic rent lainnya, yakni: *ricardian rent*, *environmental rent*, dan *social rent*. *Ricardian rent* adalah nilai berdasarkan kekayaan dan kesesuaian sumber daya yang dimiliki untuk berbagai penggunaan aktivitas ekonomi, seperti kesesuaiannya untuk berbagai aktivitas budidaya (tambak), kesesuaian fisik untuk pengembangan pelabuhan, dan sebagainya. *Environmental rent* kawasan-kawasan pesisir adalah nilai

atau fungsi kawasan yang didasarkan atas fungsinya di dalam keseimbangan lingkungan, sedangkan *social rent* menyangkut manfaat kawasan untuk berbagai fungsi sosial. Berbagai nilai-nilai budaya masyarakat banyak yang menempatkan berbagai kawasan pesisir sebagai kawasan dengan fungsi-fungsi sosial tertentu (Rustiadi, 2001). Dalam mekanisme pasar umumnya, hanya *locational* dan *ricardian rent* yang telah terinternalisasi di dalam struktur nilai pasar, akibatnya berbagai fungsi lingkungan dan sosial kawasan pesisir banyak mengalami degradasi dan tidak mendapat penilaian yang semestinya.

Peranan strategis wilayah pesisir hanya tercapai jika memenuhi persyaratan-persyaratan berikut: (1) basis ekonomi wilayah yang bertumbuh atas sumberdaya-sumberdaya domestik yang terbaru, (2) memiliki keterkaitan ke belakang dan ke depan terhadap berbagai sektor ekonomi lainnya di daerah yang bersangkutan secara signifikan sehingga perkembangan sektor basis dapat menimbulkan efek ganda terhadap perkembangan sektor-sektor lainnya di daerah yang bersangkutan, (3) efek ganda yang signifikan dari sektor basis dan sektor-sektor turunan dan penunjangnya dengan penciptaan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat (sektor rumah tangga), sektor pemerintah lokal/daerah (sektor pajak/retribusi) dan PDRB wilayah, (4) keterkaitan lintas regional di dalam maupun antar wilayah yang tinggi akan lebih menjamin aliran alokasi dan distribusi sumber daya yang efisien dan stabil sehingga menurunkan ketidakpastian dan (5) terjadinya secara berkelanjutan yang mendorong terjadinya koreksi dan peningkatan secara terus menerus secara berkelanjutan (Rustiadi et al. 2004)

Berkembangnya berbagai kegiatan pembangunan yang terdapat di kawasan pesisir disebabkan oleh tiga alasan ekonomi yang kuat (Dahuri et al. 2001) yaitu: (1) wilayah pesisir merupakan salah satu kawasan yang secara biologis paling produktif di dunia; berbagai ekosistem dengan produktifitas hayati tertinggi, seperti hutan mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan estuaria, berada di wilayah pesisir, lebih dari 90% total produksi perikanan dunia (sekitar 82 juta ton) baik melalui kegiatan penangkapan maupun budidaya, berasal dari wilayah pesisir, (2) wilayah pesisir menyediakan berbagai kemudahan yang paling praktis dan relatif lebih murah bagi kegiatan industri, permukiman, dan kegiatan pembangunan lainnya, daripada yang dapat disediakan oleh daerah lahan atas, kemudahan tersebut berupa media transportasi, tempat pembuangan limbah, bahan baku air pendingin dari air laut untuk berbagai jenis pabrik dan pembangkit tenaga listrik, dan bahan baku industri lainnya; (3) wilayah pesisir pada umumnya memiliki panorama keindahan yang dapat dijadikan objek rekreasi dan pariwisata yang sangat menarik dan menguntungkan, seperti pasir putih atau pasir bersih untuk berjemur, perairan pesisir untuk renang, selancar, dan berperahu, dan terumbu karang serta keindahan bawah laut untuk pariwisata selam dan snorkeling.

Pembangunan wilayah bertujuan untuk mencapai pertumbuhan pendapatan perkapita yang cepat, penyediaan dan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, memperkecil disparitas kemakmuran antar daerah/regional. Tujuan pembangunan wilayah juga harus mampu mendorong transformasi perekonomian yang seimbang antar sektor pertanian dan industri

melalui pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia dengan tetap memperhatikan aspek kelestariannya (Todaro, 2000). Di samping itu pembangunan wilayah bertujuan untuk menciptakan berbagai alternatif yang lebih baik bagi setiap anggota masyarakat guna mencapai aspirasinya. Penciptaan alternatif tersebut dicirikan oleh adanya proses transformasi ekonomi dan struktural melalui peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas rata-rata tenaga kerja, peningkatan pendapatan, memperkecil disparitas pendapatan, perubahan struktural distribusi kekuasaan antar golongan masyarakat ke arah yang lebih adil, serta transformasi kultural dan tata nilai. Perubahan yang terjadi diharapkan lebih mengarah kepada perbaikan mutu hidup dan kehidupan masyarakat (Nasoetion, 1999).

Pengelolaan pembangunan wilayah sangat terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Pengelolaan sumber daya alam yang baik dapat memberikan kesejahteraan umat manusia, dan sebaliknya pengelolaan sumber daya alam yang tidak baik berdampak buruk bagi umat manusia. Oleh karena itu pertanyaan mendasar dalam pengelolaan sumber daya alam adalah bagaimana mengelola sumber daya alam tersebut di dalam suatu wilayah untuk dapat menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi manusia dan tidak mengorbankan kelestarian sumber daya alam. Tujuan dari pengelolaan wilayah pesisir adalah, (1) pendayagunaan potensi pesisir dan lautan, untuk meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan pelaku pengelolaan dan pengembangan pesisir dan dapat bermanfaat bagi perekonomian daerah, (2) adanya keseimbangan

antara pemanfaatan ekonomi dan ekosistem wilayah pesisir dalam mendukung kelestarian sumber daya pesisirnya dan lautan khususnya. Konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu dapat memberikan ruang lingkup antar sektor yang ada di wilayah pesisir untuk bersinergi secara total guna memanfaatkan wilayah pesisir secara optimal dan berkelanjutan.

D. Pendekatan dalam Pengembangan Wilayah Pesisir

Banyak yang berpendapat bahwa pengelolaan wilayah pantai secara terpadu (*Integrated Coastal Zone Management*) merupakan kunci bagi pemecahan problem dan konflik di wilayah pantai yang sangat pelik dan kompleks. Keterpaduan di dalam manajemen publik dapat didefinisikan sebagai penentuan goals dan objektif secara simultan, melakukan secara bersama-sama pengumpulan informasi, perencanaan dan analisis secara kolektif, penggunaan secara bersama-sama perangkat/ instrumen pengelolaan. Pada kenyataannya, integrasi yang bersifat ideal sebagaimana dikemukakan di atas tidak pernah akandapat terjadi atau dilakukan. Di dalam praktek integritasi ini biasanya merupakan upaya koordinasi antara berbagai lembaga terkait untuk menyelaraskan berbagai kepentingan, prioritas dan tindakan. Usaha untuk melakukan koordinasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme, prosedur dan rencana. Dengan demikian, rencana wilayah pantai terpadu disamping berfungsi sebagai arahan bagi pengembangan, strategi yang dilakukan dan tindakan yang akan dilaksanakan, juga berfungsi sebagai instrumen koordinasi.

Konsepsi pengembangan wilayah dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan dan selalu terdapat isu-isu yang lebih menonjol tergantung dari kondisi wilayah pesisir bersangkutan. Pendekatan-pendekatan ini meliputi : (1) pendekatan ekologis; (2) pendekatan fungsional/ ekonomi; (3) pendekatan sosio- politik; (4) pendekatan *behavioral* dan *kultural*. Pendekatan ekologis menekankan pada tinjauan ruang wilayah sebagai kesatuan ekosistem. Pendekatan ini sangat efektif untuk mengkaji dampak suatu pembangunan secara ekologis, akan tetapi kecenderungan mengesampingkan dimensi sosial, ekonomis dan politis dari ruang wilayah. Pendekatan fungsional ekonomi, menekankan pada ruang wilayah sebagai wadah fungsional berbagai kegiatan, dimana faktor jarak atau lokasi menjadi penting. Pendekatan sosial politis, menekankan pada aspek “penguasaan” wilayah. Pendekatan ini melihat wilayah tidak saja dilihat dari berbagai sarana produksi namun juga sebagai sarana untuk mengakumulasikan power. Konflik- konflik yang terjadi dilihat sebagai konflik yang terjadi antar kelompok. Pendekatan ini juga melihat wilayah sebagai teritorial, yakni mengaitkan ruang-ruang bagian wilayah tertentu dengan satuan-satuan organisasi tertentu. Pendekatan *behavioral* dan *kultural*, menekankan pada keterkaitan antara wilayah dengan manusia dan masyarakat yang menghuni atau memanfaatkan ruang wilayah tersebut. Pendekatan ini menekankan perlunya memahami perilaku manusia dan masyarakat dalam pengembangan wilayah. Pendekatan ini melihat aspek-aspek norma, kultur, psikologi masyarakat yang berbeda akan menghasilkan konsepsi wilayah yang berbeda.

Disamping pendekatan-pendekatan yang bersifat substansial seperti diatas, terdapat beberapa pendekatan yang bersifat instrumental. Pendekatan instrumental ini dapat dikategorikan dalam 4 (empat) kelompok besar, yaitu (1) instrumen hukum dan peraturan; (2) instrumen ekonomi; (3) instrumen program dan proyek; dan (4) instrumen alternatif.

Instrumen hukum dan peraturan mempunyai konsep atau ide dasar adanya hukum dan peraturan beserta penegakannya. Instrumen ini antara lain berupa hukum dan peraturan-peraturan seperti ijin lokasi, ijin bangunan, AMDAL dan sebagainya. Instrumen ekonomi mempunyai konsep atau ide dasar adanya pengaruh ekonomi pasar yang sangat signifikan terhadap pengembangan wilayah. Contoh dari penerapan instrumen ini adalah adanya penerapan pajak, retribusi serta insentif dan disinsentif yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Instrumen program dan proyek khususnya yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah didasari atas konsep atau ide dasar pada kebutuhan-kebutuhan dasar dan kepentingan masyarakat luas. Penerapan instrumen ini seperti pembangunansarana dan prasarana wilayah dan sejenisnya. Instrumen alternatif berdasarkan konsep atau ide dasar adanya pemberdayaan masyarakat dari kemitraan. Contoh- contoh dari penerapan instrumen ini antara lain meliputi pelatihan, pendidikan, partisipasi masyarakat, adanya proyek-proyek percontohan, penghargaan kepada pelaku masyarakat dan swasta atau pelaku pembangunan lainnya

E. Potensi Sumber daya Pesisir

Kawasan pesisir di Indonesia terkenal dengan kekayaan dan keanekaragaman jenis sumber daya alamnya baik sumber alam yang dapat pulih (*renewable*) maupun yang tidak dapat pulih (*unrenewable*). Sumber daya alam pulau-pulau kecil bila dipadukan dengan sumber daya manusia yang handal serta didukung dengan iptek yang di tunjang dengan kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan yang tepat bisa menjadi modal yang besar bagi pengembangan wilayah pesisir. Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan (*Interface*) antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya (Clark, 1996). Kekayaan ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan sumberdayanya dan mendorong berbagai instansi untuk meregulasi pemanfaatannya.

Sumberdaya pesisir adalah sumberdaya alam, sumberdaya binaan/buatan dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalam wilayah pesisir (Dahuri et al 2001), potensi sumberdaya pesisir secara umum dibagi atas empat kelompokyakni (1) Sumberdaya yang dapat pulih (*renewable resources*), (2) Sumberdaya tidak dapat pulih (*unrenewable resources*), (3) Energi lautan dan (4) Jasa-jasa lingkungan kelautan (*environmental services*). Sumberdaya yang dapat pulih terdiri dari berbagai jenis ikan, udang, rumput laut, padang lamun, mangrove, terumbu karang termasuk kegiatan budidaya pantai dan budidaya laut (*marine culture*). Sumberdaya tidak dapat pulih meliputi mineral, bahan tambang/galian, minyak bumi dan gas. Sumberdaya

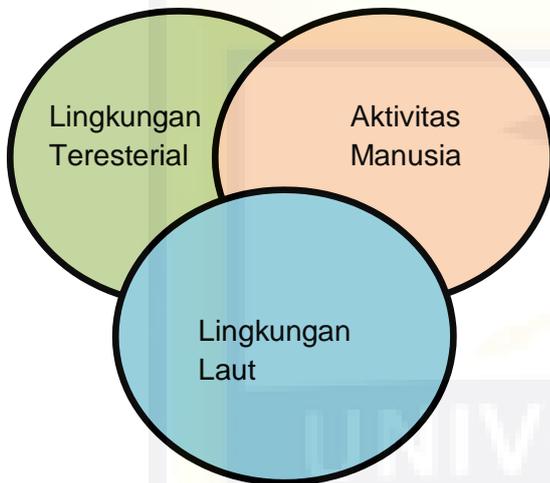
energi terdiri dari OTEC (*ocean thermal energy conversion*), pasang surut, gelombang dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk jasa-jasa lingkungan kelautan adalah pariwisata dan perhubungan laut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa kewenangan kabupaten kota untuk mengelola sumberdaya wilayah laut sepertiga dari kewenangan provinsi 12 (dua belas) mil yang meliputi kewenangan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan sumber daya alam dan tanggung jawab untuk melestarikannya. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga menjelaskan secara tegas tentang pengertian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yakni sumberdaya hayati, sumberdaya nonhayati, sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan. Sumberdaya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain. Sumberdaya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut. Sumberdaya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut, tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.

F. Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber daya Pesisir

Secara geografis wilayah pesisir terbentuk dari pertemuan antara daratan dan lautan dimana di dalamnya terjadi proses-proses fisik dan biologi yang kompleks. Secara ekologis wilayah pesisir terdiri atas sejumlah habitat daratan dan perairan yang rentan, dengan ekosistem pesisir yang unik, yang memiliki

sumberdaya alam yang berharga. Ekosistem ini juga sangat terkait dengan sistem sosial ekonomi yang membentuk sistem sumber daya (Scura, 1992).



Gambar 2.1

Hubungan antara Wilayah Pesisir dan Sistem Sumber Daya Pesisir (Scura,1992).

Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.1, sistem sumberdaya dapat dikonseptualisasikan sebagai cakupan interaksi antara biofisik, lingkungan teresterial dan laut serta aktifitas manusia, termasuk lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga perencana. Daerah arsiran pada gambaran menunjukkan wilayah pesisir sedangkan daerah bayangan merupakan sistem sumberdaya pesisir. Dengan demikian segenap aktifitas manusia yang dipahami sebagai kegiatan pembangunan ekonomi, merupakan suatu elemen penting dan telah turut memberikan kontribusi di dalam suatu sistem sumber daya dalam hal ini yang terdapat di wilayah pesisir.

Pembangunan adalah suatu konsep normatif yang menyiratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai realisasi potensi manusia (Bryant dan White, 1982). Istilah “pembangunan” sering di sama artikan dengan “pengembangan” yang dalam bahasa asing juga dapat diistilahkan dengan development.

(Djojohadikusumo, 1994) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi (*development*) mengandung arti yang lebih luas dibanding pengertian pada pertumbuhan ekonomi (*growth*). Pembangunan ekonomi mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

(Nasoetion, 1992) menyatakan bahwa pembangunan adalah upaya terkoordinasi untuk menciptakan keadaan dimana terdapat lebih banyak alternatif yang sah bagi setiap warga negara untuk mencapai aspirasinya yang paling *humanistic* yaitu tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Selanjutnya (Winoto, 1995) mengemukakan bahwa setiap proses pembangunan senantiasa diikuti oleh proses transformasi perekonomian, tenaga kerja, demografi sosial dan budaya masyarakat, wilayah atau negara. Sedangkan ciri proses pembangunan menurut (Djojohadikusumo, 1994) adalah peningkatan produksi, perubahan komposisi produksi, perubahan pola alokasi sumberdaya produksi, perubahan dalam pola distribusi kekayaan dan pendapatan di antara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Hal yang penting dalam proses pembangunan ialah semakin meluasnya kesempatan kerja yang bersifat produktif.

Namun demikian, pelaksanaan pembangunan dimana terjadinya proses transformasi dan perubahan struktural selama ini selalu menempatkan dimensi ekonomi sebagai pertimbangan yang dominan. Sebaliknya, walaupun sudah masuk perhitungan, faktor lingkungan masih dianggap sebagai pengambat pembangunan. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa pembangunan dan lingkungan adalah dua hal yang saling berlawanan. Sehingga dalam perkembangannya dalam mengatasi permasalahan ini, pola pembangunan berkelanjutan telah semakin banyak diterima sebagai koreksi terhadap pola pembangunan yang konvensional tersebut (Salim, 1991). Semakin banyak orang merasa pola pembangunan yang konvensional yang hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi saja telah melampaui batas kegunaanya dan bahkan sekarang menjurus ke arah yang merugikan manusia.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi sumberdaya alam pesisir yang besar dan masih terdapat yang belum dimanfaatkan (*underutilized*). Pesatnya pembangunan dan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk serta semakin menipisnya sumberdaya alam di daratan, maka sumberdaya pesisir akan menjadi tumpuan harapan bagi kesinambungan pembangunan ekonomi nasional di masa mendatang. Namun ironisnya kondisi kesejahteraan masyarakat pesisir umumnya masih termasuk kategori miskin. Fenomena ini hanya dapat diselesaikan dengan jalan membangun wilayah pesisir dan lautan secara optimal, sehingga pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dapat dilakukan secara berkelanjutan dan sekaligus dapat meningkat dengan tetap memperhatikan

kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan kata lain, pembangunan wilayah pesisir dilakukan tanpa meninggalkan pertimbangan terhadap keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar (*human specific*). Keadaan ini telah mendorong kita akan kebutuhan untuk konsep pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir (Dahuri, 1998).

Keberlanjutan (*sustainability*) merupakan suatu konsep nilai yang meliputi tanggung jawab generasi saat ini terhadap generasi akan datang tanpa harus pulamengorbankan peluang generasi sekarang untuk tumbuh dan berkembang serta meletakkan dasar-dasar pengembangan bagi generasi-generasi mendatang (WCED, 1987). Dengan demikian pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan suatu strategi pembangunan yang memberikan semacam ambang batas pada laju pemanfaatan ekosistem alamiah serta sumberdaya alam yang ada di dalamnya. (Dahuri, 1996) menjelaskan pembangunan berkelanjutan adalah sebagai strategi pemanfaatan ekosistem alamiah rupa sehingga kapasitas fungsionalnya untuk memberikan manfaat kepada umat manusia tidak rusak.

Secara ekologis terhadap tiga persyaratan yang dapat menjamin tercapainya pembangunan berkelanjutan, yaitu: (1) keharmonisan spasial (*special suitability*), (2) kapasitas asimilasi (*assimilative capacity*), dan (3) pemanfaatan berkelanjutan. Keharmonisan spasial mensyaratkan bahwa dalam suatu wilayah pembangunan, tidak seluruhnya diperuntukan bagi zona pemanfaatan, yang sangat penting dalam memelihara berbagai proses penunjang kehidupan, seperti siklus hidrologi dan unsur hara, membersihkan

limbah secara alamiah maupun sebagai sumber keanekaragaman hayati. Selanjutnya setiap aktifitas pembangunan dalam zona pemanfaatan hendaknya ditempatkan pada lokasi yang secara biofisik sesuai (Dahuri et al, 1996).

Pola pembangunan berkelanjutan tidak terbatas pada pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan, namun juga mengembangkan keberlanjutan sosial (*social sustainability*) yang berkaitan erat dengan ketahanan sosial (*social resilience*). Dalam masyarakat terdapat ambang batas sosial, di atas ambang tersebut maka masyarakat meletup. Hal ini bisa terjadi apabila proses pembangunan tidak memberi peluang bagi masyarakat untuk turut berperan dalam pembangunan, sehingga tertutup kesempatan meningkatkan kualitas diri melalui perbaikan kesehatan, kesempatan meningkatkan kualitas diri melalui perbaikan kesehatan, kesempatan pendidikan, kesempatan yang terbuka (*ready access*) memperoleh sumberdaya seperti tanah, lapangan kerja, modal, kredit, pendapatan dan yang serupa (Salim, 1991). Dari pengalaman yang diperoleh, letupan sosial terjadi apabila hasil pembangunan terbagi timpang sehingga menimbulkan kesenjangan sosial.

Dalam perkembangan ambang batas sosial atau yang lebih sering dikatakan sebagai daya tampung sosial (*social Carrying Capability*) menurut (Hadi, 1998) dikatakan sebagai kemampuan manusia dan kelompok penduduk yang berbeda-beda untuk hidup bersama-sama dalam suatu masyarakat secara harmonis. Daya tampung sosial ini dapat diukur melalui beberapa

indikator baik secara kualitatif maupun kuantitatif, antara lain seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, kuantitas penduduk, kohesi sosial, peran serta atau keterlibatan masyarakat dan sebagainya.

Selanjutnya sebagai suatu konsep, pembangunan berkelanjutan merupakan suatu hal yang sangat sederhana tetapi sangat sulit untuk diimplementasikan. Untuk mewujudkan konsep ini dalam realitas kehidupan dibutuhkan perubahan-perubahan yang mendasar mengenai cara-cara kita melakukan pembangunan, hidup berkonsumsi dan saling berhubungan satu sama lain dalam kehidupan bernegara serta cara-cara kita saling bekerja sama dalam mewujudkan tujuan bersama serta memanfaatkan sumber daya yang memiliki (Steven dalam Winoto, 1998).

(Dahuri et al, 1996) menyatakan bahwa pemanfaatan sumberdaya pesisir sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional, harus dilaksanakan sebaik-baiknya berdasarkan azas kelestarian, keserasian dan asas pemanfaatan yang optimal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dampak pembangunan yang negatif, seperti terjadinya penurunan nilai-nilai sumberdaya pesisir dan lautan yang pada gilirannya akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan itu sendiri. Keadaan ini disebabkan antara lain penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan kemampuan daya dukungnya, tidak disertainya dengan usaha-usaha konservasi pembangunan yang telah direncanakan penataannya.

Berdasarkan karakteristiknya, potensi dan permasalahan yang ada, maka untuk mencapai pemanfaatan kawasan pesisir secara optimal dan

berkelanjutan telah mendorong untuk dilakukannya pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Menurut (Olsen et al, 1997) maupun (Cicin-Sain dan Knecht 1998) secara umum pengelolaan pesisir terpadu dapat didefinisikan sebagai suatu proses dinamis dan terus menerus memadukan pemerintah dan masyarakat, ilmu dan pengelolaan, kepentingan publik dan sektoral dalam mempersiapkan dan melaksanakan suatu rencana terpadu untuk pembangunan dan perlindungan ekosistem dan sumber daya pesisir. Sedangkan tujuan dari pengelolaan pesisir terpadu sebagaimana dinyatakan (Burbridge, 1997) adalah untuk memperbaiki kualitas hidup komunitas manusia yang menggantungkan hidupnya pada sumberdaya pesisir disamping memelihara keanekaragaman biologi dan produktivitas ekosistem pesisir. Hal ini memiliki pengertian yang sama dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Untuk lebih jelas lagi (Cicin-Sain dan Knecht, 1998) juga mengemukakan bahwa tujuan pengelolaan pesisir terpadu adalah untuk mencapai pembangunan wilayah pesisir dan lautan yang berkelanjutan, mengurangi kerentanan wilayah pesisir dan masyarakatnya dari bahaya alami, dan untuk menjaga proses-proses ekologis esensial, sistem pendukung kehidupan dan keanekaragaman biologis di wilayah pesisir.

G. Prinsip-prinsip Pengelolaan Sumber daya Pesisir yang Berkelanjutan dan Terpadu

1. Pengelolaan Pesisir Secara Berkelanjutan

Suatu kegiatan dikatakan keberlanjutan, apabila kegiatan pembangunan secara ekonomis, ekologis dan sosial politik bersifat berkelanjutan.

Berkelanjutan secara ekonomi berarti bahwa suatu kegiatan pembangunan harus dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan capital (capital maintenance), dan penggunaan sumber daya serta investasi secara efisien. Berkelanjutan secara ekologis mengandung arti, bahwa kegiatan dimaksud harus dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasi sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati (biodiversity), sehingga diharapkan pemanfaatan sumber daya dapat berkelanjutan. Sementara itu, berkelanjutan secara sosial politik mensyaratkan bahwa suatu kegiatan pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil pembangunan, mobilitas sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat (demokratisasi), identitas sosial, dan pengembangan kelembagaan (Wiyana, 2004).

2. Pengelolaan Pesisir Terpadu

Untuk dapat mewujudkan pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (integrated coastal zone management). Pilihan ini didasarkan pada: (1) wilayah pesisir merupakan multiple use zone dimana terdapat lebih dari dua macam sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan serta terdapat lebih dari dua macam pemanfaatan kawasan pesisir; (2) karakteristik dan dinamika alamiah the nature sumber daya pesisir dan lautan yang secara ekologis saling terkait satu sama lain termasuk dengan ekosistem lahan atas; (3) wilayah pesisir dihuni lebih dari satu kelompok etnis yang memiliki preferensi mata pencaharian yang berbeda. (Mahfud Effendy, 2009)

Pengelolaan pesisir dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang terjadi di wilayah pesisir. Keseluruhan proses diatas menurut (Sorensen dan McCreary, 1990), harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan dinamis dengan mempertimbangkan segenap aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspirasi masyarakat pengguna kawasan pesisir dan lautan serta konflik pemanfaatan sumber daya dan konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan lautan yang mungkin ada. Keterpaduan pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan ini mencakup empat aspek (Dahuri et al, 2001): (1) keterpaduan ekologis; (2) keterpaduan sektoral; (3) keterpaduan disiplin ilmu; dan (4) keterpaduan stakeholders.

Keterpaduan ekologis: secara ekologis wilayah pesisir memiliki keterkaitan antara lahan atas (daratan) dan lautan. Hal ini disebabkan karena wilayah pesisir merupakan wilayah pertemuan antara daratan dan lautan. Dengan keterkaitan kawasan tersebut maka pengelolaan kawasan pesisir tidak terlepas dari pengelolaan lingkungan di kedua wilayah tersebut. Berbagai dampak lingkungan yang terjadi pada kawasan pesisir merupakan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan yang dilakukan dilahan atas seperti industri pengeboran minyak, pemukiman, pertanian dan sebagainya. Demikian pula dengan kegiatan yang dilakukan di laut lepas seperti kegiatan pengeboran minyak lepas pantai, perhubungan laut. Penanggulangan pencemaran dan sedimentasi yang diakibatkan oleh limbah industri tidak dapat dilakukan hanya di kawasan pesisir saja tetapi harus dilakukan mulai dari sumber dampaknya. Oleh karena itu pengelolaan wilayah ini harus

diintegrasikan dengan pengelolaan wilayah daratan dan laut.

Keterpaduan sektor: sebagai konsekuensi dari besar dan beragamnya sumber daya alam di kawasan pesisir adalah banyaknya instansi atau sektor-sektor pembangunan yang bergerak dalam pemanfaatan sumber daya pesisir. Akibatnya seringkali terjadi tumpang tindih pemanfaatan sumber daya pesisir antara satu sektor dengan sektor lainnya. Kegiatan suatu sektor tidak dibenarkan mengganggu apalagi sampai mematikan kegiatan sektor lain. Penyusunan tata ruang dan panduan pembangunan wilayah pesisir sangat perlu dilakukan untuk menghindari benturan antara satu kegiatan dengan kegiatan pembangunan lainnya. Oleh karena itu pengelolaan wilayah ini dalam perencanaannya harus mengintegrasikan kepentingan semua sektoral.

Keterpaduan disiplin ilmu: wilayah pesisir memiliki sifat dan karakteristik yang unik dan spesifik, baik sifat dan karakteristik ekosistem pesisir maupun sifat dan karakteristik sosial budaya masyarakatnya. Oleh karena itu dibutuhkan keterpaduan disiplin ilmu dalam pengelolaan wilayah pesisir, mengikuti karakteristik ekosistem dan sosial budaya masyarakatnya.

Keterpaduan stakeholder: segenap keterpaduan diatas akan berhasil diterapkan apabila ditunjang oleh keterpaduan dari pelaku dan pengelola pembangunan di wilayah pesisir. Seperti diketahui bahwa pelaku pembangunan dan pengelola sumber daya pesisir antara lain terdiri dari pemerintah, masyarakat, swasta, dan juga lembaga swadaya masyarakat yang masing-masing memiliki kepentingan terhadap pemanfaatan sumber daya pesisir. Penyusunan perencanaan pengelolaan terpadu harus mampu

mengakomodir segenap kepentingan pelaku pembangunan pesisir. Oleh karena itu perencanaan pengelolaan pembangunan harus menggunakan pendekatan dua arah, yaitu pendekatan top down dan pendekatan bottom up.

Dengan latar belakang pemikiran diatas akan muncul model pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan sustainable development yang mengandung tiga unsur utama yang meliputi dimensi ekonomi, ekologi dan sosial (Harris et al, 2001 dalam Dahuri, 2003). Suatu pembangunan kawasan pesisir, pertama secara ekonomi dianggap berkelanjutan (economic growth) jika kawasan tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa secara berkesinambungan; kedua secara ekologis dianggap berkelanjutan (ecological sustainability) manakala basis ketersediaan sumber daya alamnya dapat dipelihara secara stabil, tidak terjadi eksploitasi berlebih terhadap sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tidak terjadi pembuangan limbah melampaui kapasitas asimilasi lingkungan yang dapat mengakibatkan kondisi tercemar, serta pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui yang dibarengi dengan pengembangan bahan substitusinya secara memadai, dan ketiga secara sosial dianggap berkelanjutan (social equity) apabila kebutuhan dasar seluruh penduduknya terpenuhi; terjadi distribusi pendapatan dan kesempatan berusaha secara adil. Menurut Bengen (2004) pembangunan sumber daya pesisir dan lautan secara optimal dan berkelanjutan terwujud apabila memenuhi tiga persyaratan ekologis: (1) pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan yang sesuai dengan daya dukungnya; (2) pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan lautan yang harmonis; dan (3) pemanfaatan kapasitas asimilasi wilayah pesisir sesuai dengan daya dukung lingkungan.

3. Isu-Isu Pengelolaan Sumber Daya Pesisir

Dalam panduan Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir berbasis masyarakat tahun 2003 menjelaskan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, memiliki potensi yang sangat besar, baik hayati maupun non hayati. Namun hingga saat ini tingkat pemanfaatannya masih jauh dari optimal dan berkelanjutan. Bahkan, karena tingkat pemanfaatan dan pengelolaan yang masih jauh dari yang diharapkan, banyak sumber daya pesisir tersebut dimanfaatkan secara tidak bertanggungjawab, dicuri, hingga mengalami degradasi. Ada banyak faktor penyebab terjadinya degradasi sumber daya wilayah pesisir yang pada akhirnya mengakibatkan potensi yang ada didalamnya tidak dapat memberikan manfaat lestari bagi kelanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini adalah garis besar isu-isu umum yang ditemukan dalam pengelolaan sumber daya pesisir.

a) Isu Kelembagaan

Kelembagaan merupakan aktor atau penggerak utama dalam proses-proses pengelolaan sumber daya pesisir. Harmonisasi dan konsistensi visi, strategi, dan tujuan-tujuan pembangunan antar level dan lembaga pemerintahan sangat menentukan keberhasilan dalam pengelolaan. Kenyataan menunjukkan bahwa setiap lembaga secara umum mempunyai mandat, aturan, tujuan, dan kebijakan yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini mengakibatkan upaya-upaya pengelolaan mengalami hambatan. Isu-isu kelembagaan yang umum

dalam pengelolaan pesisir antara lain:

- Rendahnya kapasitas untuk melaksanakan pengelolaan terpadu
- Kurangnya pengetahuan mengenai pengaruh ekosistem terhadap kegiatan manusia
- Konflik dan tumpang tindih peraturan antarlembaga dan tingkatan pemerintahan
- Kurangnya dukungan terhadap upaya-upaya pengelolaan dan perlindungan wilayah pesisir
- Kurangnya pelaksanaan peraturan yang ada
- Pengelolaan tradisional yang kurang mendapat perhatian pemerintah sehingga sering bertentangan dengan undang-undang dan pengelolaan modern.

Dalam hal pengelolaan tradisional, perlu dipahami bahwa tidak semua praktik pengelolaan tradisional digolongkan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ada berbagai kegiatan pengelolaan secara tradisional yang sifatnya merusak (destruktif), seperti adanya sekelompok masyarakat yang menganggap bahwa penggunaan bahan peledak, penangkapan dengan sistem “paka-paka” dengan cara berjalan di atas karang dan menakut-nakuti ikan (soma paka-paka), penangkapan dengan menggunakan igi atau bubu yang merusak karang, dan pembuatan perangkap dengan membuat kolam dari karang di atas hamparan terumbu karang, adalah berbagai contoh

cara penangkapan atau pengelolaan tradisional yang sifatnya destruktif.

b) Isu Sosial

Perkembangan penduduk yang cukup pesat di wilayah pesisir dan masalah kemiskinan adalah isu-isu sosial yang dominan ditemukan di wilayah pesisir. Isu-isu sosial ini jika tidak ditangani akan memberikan tekanan yang besar terhadap kondisi lingkungan dan sumber daya pesisir. Isuisu umum yang ditemukan di wilayah pesisir antara lain:

- Pertumbuhan penduduk yang cepat di wilayah pesisir
- Kemiskinan yang terkonsentrasi di desa-desa pesisir
- Hilangnya akses oleh masyarakat pengguna sumber daya pesisir
- Pengetahuan terhadap nilai sumber daya pesisir yang masih rendah
- Sanitasi dan kesehatan masyarakat di wilayah pesisir yang masih rendah
- Meningkatnya konflik sosial yang terjadi di wilayah pesisir

c) Isu Bio-fisik Lingkungan

Laju degradasi lingkungan di wilayah pesisir telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Degradasi lingkungan ini disebabkan oleh kerusakan ekosistem pesisir karena aktivitas manusia dan oleh

alam. Ekosistem terumbu karang, termasuk kekayaan keanekaragaman ikan dan invertebrata, telah mengalami kerusakan yang cukup parah di berbagai tempat sebagai akibat dari penangkapan ikan dengan cara merusak seperti penggunaan bom, racun sianida, dan pukat harimau. Termasuk pula akibat kegiatan non perikanan lainnya seperti penambangan karang, reklamasi pantai, polusi dari darat, dan sedimentasi. Isu-isu spesifik yang ditemukan di wilayah pesisir antara lain:

- Menurunnya kualitas air akibat polusi
- Menurunnya ikan-ikan yang hidupnya tergantung pada daerah pesisir (lahan basah/wetland, rawa, dan lain-lain) akibat penangkapan yang berlebihan
- Pengrusakan habitat penting seperti terumbu karang, mangrove, dan pantai akibat penggunaan bom dan racun sianida dalam penangkapan ikan, penambangan karang, dan reklamasi pantai
- Pembangunan garis pantai yang tidak sesuai dengan peruntukan dan tata ruang
- Banjir dan badai laut

Melihat potensi dan ancaman terhadap ekosistem dan sumber daya wilayah pesisir tersebut, maka suatu upaya pengelolaan mutlak diperlukan.

4. Tujuan Pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu diwujudkan untuk menggunakan, menikmati, membangun, merawat, mengkonservasi dan melindungi sumber daya alamnya. Dalam Kep.10/Men/2002, Rencana Pengelolaan telah didefinisikan sebagai beberapa kegiatan normatif yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam suatu zona, mulai dari sistematik pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan strategi pada penciptaan kegiatan khususnya untuk menghasilkan output yang diinginkan. Definisi ini perlu peninjauan kembali jika dibandingkan dengan hirarki perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut terpadu. (Bappeda Sulteng, 2005).

Pengelolaan sumber daya pesisir secara terpadu adalah suatu proses literatif dan evolusioner untuk mewujudkan pembangunan kawasan pesisir secara optimal dan berkelanjutan. Tujuan akhir dari ICZPM bukan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi (economic growth) jangka pendek, melainkan juga menjamin pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati secara adil dan proporsional oleh segenap pihak yang terlibat (stakeholders), dan memelihara daya dukung serta kualitas lingkungan pesisir, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara lestari. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka unsur esensial dari ICZPM adalah keterpaduan (integration) dan koordinasi. Setiap kebijakan dan strategi dalam pemanfaatan sumber daya pesisir harus berdasarkan kepada : (1) pemahaman yang baik tentang proses-proses alamiah (ekohidrologis) yang berlangsung di kawasan pesisir yang sedang

dikelola; (2) kondisi ekonomi, sosial, budaya dan politik masyarakat; dan (3) kebutuhan saat ini dan yang akan datang terhadap barang dan (produk) dan jasa lingkungan pesisir. (Bappeda Sulteng, 2005)

Fungsi-fungsi Pengelolaan dalam konsep ICZPM terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Dalam sektor publik, hal ini adalah tanggung jawab instansi pemerintah. Pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir harus membentuk kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mendukung pembuatan keputusan oleh administrator sektoral dalam pengelolaan, penggunaan dan pengalokasian sumber daya secara tepat. Dalam kegiatan pengelolaan diperlukan untuk mengidentifikasi pejabat yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu, struktur dan komposisi badan/panitia pengelolaan. Diperlukan juga sistem terkoordinasi untuk mengeluarkan dan mengadministrasikan izin penggunaan sumber daya oleh dinas-dinas teknis. (Bappeda Sulteng, 2005)

Tujuan pengelolaan adalah mengatasi konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir, sehingga terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Adapun target pengelolaan adalah teratasinya permasalahan turunan dari konflik pemanfaatan ruang, melalui partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah secara terpadu, yang didukung penegakan hukum secara konsisten, yaitu: Tersusun dan dipatuhinya tata ruang wilayah pesisir, terkendalinya reklamasi pantai, terkendalinya pencemaran perairan, tertatanya permukiman kumuh, kembalinya sempadan pantai dan rehabilitasi mangrove,

terkendalinya masalah banjir dan abrasi serta sedimentasi. (Syaiful Arifin, 2014)

Salah satu faktor penyubur terjadinya konflik serta mempercepat kerusakan sumber daya pesisir adalah lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Untuk mengatasi kondisi tersebut harus dilakukan peningkatan koordinasi kelembagaan yang melibatkan dinas/instansi daerah seperti Bappeda/Bappeko, Perikanan dan Kelautan, Pariwisata, Industri dan Perdagangan, Perhubungan dan kepelabuhan, BPN, dan lain-lain. Upaya yang harus dilakukan adalah menghilangkan ego sektor dengan penegasankembali fungsi dan kewenangan masing-masing dinas/instansi terkait, serta harus ada selalu diadakan rapat koordinasi untuk membicarakan berbagai hal yang menyangkut pengelolaan wilayah pesisir itu sendiri. (Syaiful Arifin, 2014)

Di samping kelembagaan pemerintah, peran kelembagaan legislatif, masyarakat/LSM, serta dunia usaha adalah penting dan harus terlibat dalam pengelolaan, utamanya pada tataran perencanaan dan monitoring/evaluasi. Dengan demikian akan tercipta suatu pengelolaan terpadu yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang menuju ke arah pembangunan berkelanjutan. (Syaiful Arifin, 2014)

5. Manfaat Pengelolaan Wilayah Pesisir

Secara alamiah potensi pesisir di daerah dimanfaatkan langsung oleh masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan tersebut yang pada umumnya terdiri dari nelayan. Nelayan di pesisir memanfaatkan kekayaan laut mulai dari ikan, rumput laut, terumbu karang dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya. Pada umumnya potensi pesisir dan kelautan yang dimanfaatkan oleh para nelayan baru terbatas pada upaya pemenuhan kebutuhan hidup.

Pemanfaatan potensi daerah pesisir secara besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis dalam rangka peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat belum banyak dilakukan. Pemanfaatan pesisir untuk usaha ekonomi dalam skala besar baru dilakukan pada sebagian Kabupaten dan Kota yang berada di daerah pesisir. Pada umumnya usaha ekonomi pemanfaatan daerah pesisir ini bergerak di sektor pariwisata.

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah berupaya untuk memanfaatkan potensi daerah pesisir ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disamping itu Pemerintah Daerah juga memanfaatkan potensi daerah pesisir ini untuk meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian masyarakat di Daerah.

Mengingat kewenangan Daerah untuk melakukan pengelolaan bidang kelautan yang termasuk juga daerah pesisir masih merupakan kewenangan baru bagi Daerah maka pemanfaatan potensi daerah pesisir ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten atau Kota yang berada di pesisir. Jadi belum semua Kabupaten dan Kota yang memanfaatkan potensi daerah pesisir. (Neni Nurani, 2008).

6. Prinsip Dasar (asas) Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu

Berdasarkan UU No. 26 tahun 2007, penataan ruang berasaskan:

- Keterpaduan
- Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
- Berkelanjutan
- Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan
- Keterbukaan
- Keersamaan dan Kemitraan
- Perlindungan Kepentingan Umum
- Kepastian hukum dan keadilan
- Akuntabilitas

Penataan Penataan ruang dilakukan secara terpadu, dan yang dimaksud dengan terpadu adalah bahwa penataan ruang dianalisis dan dirumuskan menjadi satu kesatuan dari berbagai kegiatan pemanfaatan ruang baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Penataan ruang dilakukan secara terpadu dan menyeluruh mencakup antara lain pertimbangan aspek waktu, modal, optimasi, daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan, dan geopolitik. Dalam mempertimbangkan aspek waktu, suatu perencanaan tata ruang memperhatikan adanya aspek prakiraan, ruang lingkup wilayah yang direncanakan, persepsi yang mengungkapkan berbagai keinginan serta kebutuhan dan tujuan pemanfaatan ruang. Penataan ruang harus

diselenggarakan secara tertib sehingga memenuhi proses dan prosedur yang berlaku secara teratur dan konsisten.

Penataan ruang harus berdaya guna dan berhasil guna dimana harus dapat mewujudkan kualitas ruang yang sesuai dengan potensi dan fungsi ruang. Kemudian, serasi, selaras, dan seimbang dengan maksud bahwapenataan ruang dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan struktur dan pola pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk antar wilayah, pertumbuhan dan perkembangan antar sektor, antar daerah, serta antara sektor dan daerah dalam satu kesatuan wilayah. Kemudian, penataan ruang berasaskan berkelanjutan yang menjamin kelestarian kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir dan batin antar generasi.

7. Penyusunan Rencana Strategi Dan Arahannya

Pendekatan program yang digunakan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategi Wilayah Pesisir dan laut Kabupaten/Kota adalah:

- **Pendekatan Akomodatif**, yaitu dokumen ini diharapkan memenuhi kebutuhan berbagai pihak pengguna sumber daya di wilayah pesisir Kabupaten/Kota.
- **Pendekatan Suportif**, yaitu dokumen ini diharapkan mampu mendorong pembangunan ekonomi di wilayah pesisir Kabupaten/Kota
- **Pendekatan Protektif**, yaitu mengandung makna bahwa dokumen ini dapat digunakan sebagai panduan arahan untuk melindungi wilayah pesisir dan laut di Kabupaten/Kota, yang secara ekologis sangat penting,

yaitu vegetasi mangrove, terumbu karang, dan sumber daya biotik dan abiotik lainnya.

- **Pendekatan Aspiratif**, yaitu dokumen ini diharapkan mampu mengatasi konflik dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan potensi kerusakan sumber daya

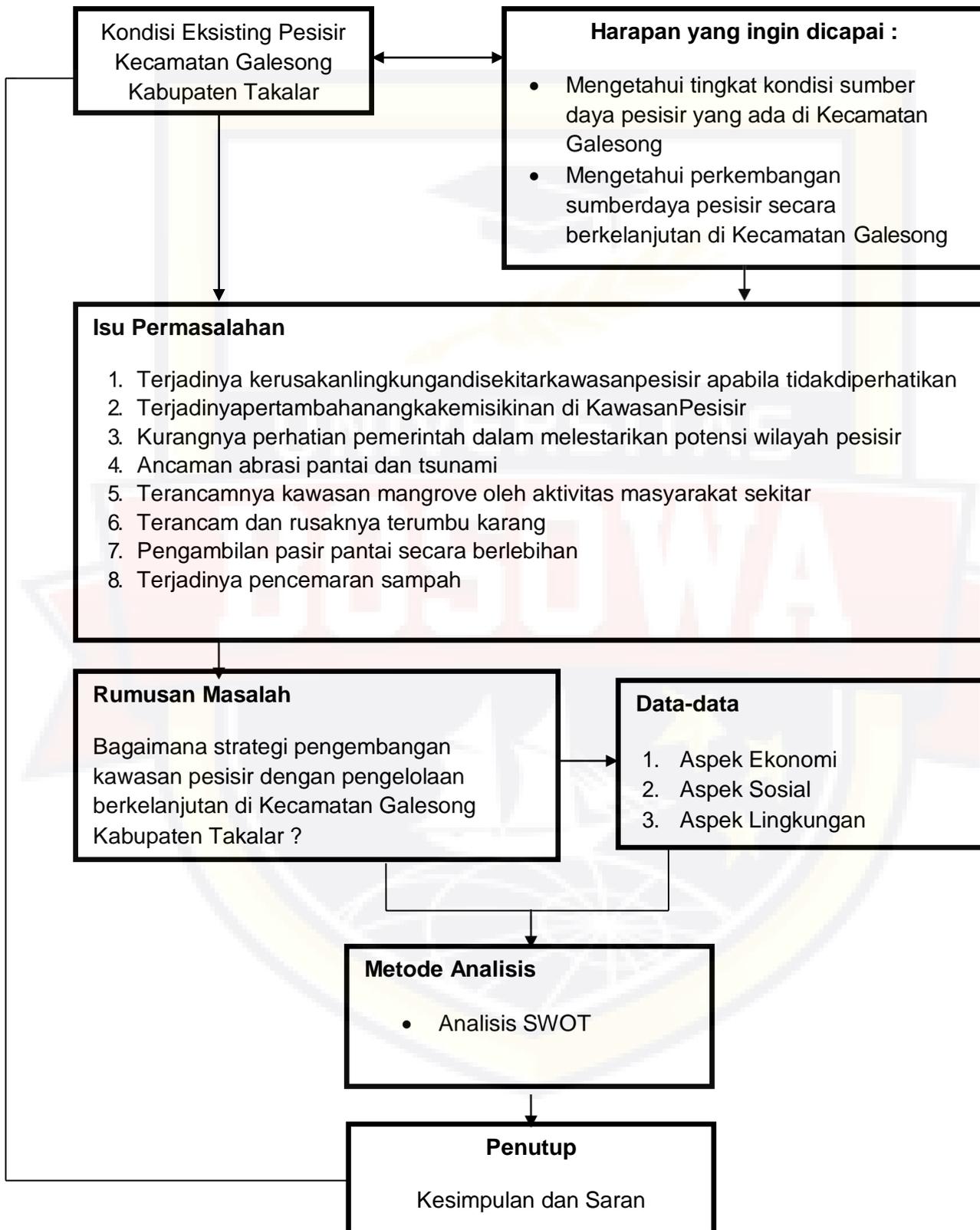
Sedangkan proses penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan laut terpadu menggunakan pendekatan partisipatif berbasis masyarakat yang melibatkan semua sektor seperti pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, perguruan tinggi, dan LSM.

Proses penyusunan Renstra diawali dari pertemuan semua stakeholders, dilanjutkan dengan identifikasi isu-isu yang ada di Wilayah Pesisir Kabupaten/Kota. Selanjutnya hasil dan identifikasi dilakukan:

- a) Verifikasi isu pada Wilayah Pesisir Kabupaten/Kota
- b) Klarifikasi permasalahan
- c) Kontribusi isu oleh semua Stakeholders
- d) Mengumpulkan semua isu kelembagaan dalam pengelolaan

Setelah isu terkumpul dilakukan penyusunan draft dokumen renstra melalui pertemuan-pertemuan menghasilkan rumusan dalam menyepakati Visi dan Misi pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan laut. (Jufriadi, 2014).

H. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif-kuantitatif atau penelitian terapan yang di dalamnya mencakup penelitian survey, dimana penelitian dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yaitu penelitian non matematis dengan proses menghasilkan data-data dari hasil temuan berupa pengamatan survey. Adapun penelitian kuantitatif dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian dengan menggunakan data-data substansi atau angka sebagai bahan perbandingan maupun bahan rujukan dalam menganalisis secara deskriptif. Kedua metode tersebut digunakan untuk melaksanakan penelitian mengenai pengembangan kawasan pesisir yang berkelanjutan Kecamatan Galesong.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Takalar, Kecamatan Galesong yang terdiri dari 14 desa yaitu Desa Bontoloe, Desa Kalenna Bontongape, Desa Bontomangape, Desa Parambambe, Desa Pattinoang, Desa Boddia, Desa Parangmata, Galesong Kota, Galesong Baru, Desa Pa'rasangan Beru, Desa Kalukuang, Desa Mappakalombo, Desa Campagaya dan Desa Pa'lalakkang.

C. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni 2021 hingga bulan Oktober 2021, untuk pengambilan data selama 4 bulan.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua) yaitu

1. Data Primer

Data Primer diperoleh melalui observasi lapangan yaitu suatu teknik penyaringan data melalui pengamatan langsung pada objek penelitian.

Survey ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kualitatif objek studi.

Jenis data yang dimaksud meliputi :

- a) **Kondisi fisik wilayah penelitian;** yang dimana meliputi kondisi fisik Kecamatan Galesong
- b) **Prasarana dan sarana;** yang dimana meliputi kondisi prasarana yang terdiri atas : jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan drainase dan sanitasi, Sarana terdiri atas : sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana perkantoran, sarana perdagangan dan jasa, sarana permukiman
- c) **Hydro-Oceanografi;** yang dimana menggambarkan parameter-parameter yang diperlukan untuk menjelaskan sifat-sifat dan konfigurasi dasar laut secara tepat hubungan geografisnya dengan daratan, serta karakteristik-karakteristik dan dinamika lautan

- d) Pola penggunaan lahan;** yang dimana meliputi kondisi pemanfaatan lahan, seperti permukiman, tambak, pertanian, perdagangan dan lain-lain

2. Data Sekunder

Data Sekunder dengan observasi pada instansi terkait dengan yaitu salah satu teknik penyaringan data melalui instansi terkait guna mengetahui data kuantitatif objek penelitian jenis data yang dimaksud meliputi :

- a) Geografi wilayah/administrasi;** yang dimana meliputi gambaran umum wilayah penelitian
- b) Demografi;** yang dimana meliputi karakteristik sosial dan ekonomi suatu populasi

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni,

1. Observasi

Metode ini merupakan survey atau pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian dengan mengumpulkan informasi dan data yang berkaitan dengan obek penelitian seperti kondisi lingkungan, karakteristik, sosial budaya, sosial dan ekonomi setempat dan dokumentasi visual lokasi penelitian.

2. Kuesioner

Digunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan diberikan kepada masyarakat di lokasi penelitian (responden). Adapun populasi dan sampel yang dibutuhkan untuk kuesioner tersebut yaitu :

a. Populasi

Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek-objek yang diteliti, dan pengertian lain dari populasi adalah keseluruhan atau totalitas objek psikologis yang di batasi oleh kriteria tertentu (Sedarmayanti, 2002).

Populasi dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang memiliki kontribusi besar dalam menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Populasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Kecamatan Galesong dengan jumlah populasi 6.258 jiwa.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Karena tidak semua data dan informasi akan di proses dan tidak semua orang atau benda akan diteliti melainkan cukup dengan menggunakan sampel yang mewakilinya. Kemudian dalam pengambilan sampel dari populasi tersebut digunakan teknik *probability sampling* dimana teknik sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono:80:2013)

Dalam penelitian ini penentuan jumlah sampel yang akan diteliti ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin :

Dimana :

n : Besaran sampel

N : Besaran populasi

e : Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel).

Pada penelitian ini menggunakan nilai kritis sebesar 10% hal ini dikarenakan nilai 10% merupakan batas nilai maksimal kelonggaran yang masih dapat ditoleransi.

Berdasarkan data kependudukan yang diperoleh pada Desa Pa'lalakkang, Desa Boddia, dan Desa Mappakalompo yang merupakan desa pesisir Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, dimana sampel yang diperoleh sebanyak 246 jiwa.

3. Wawancara

Wawancara dalam hal ini digunakan untuk mencari informasi yang lebih lengkap dan mendalam. Wawancara ini ditujukan kepada beberapa sumber yang mengetahui secara mendalam dengan permasalahan penelitian, seperti masyarakat setempat, instansi terkait yang berada di lokasi penelitian.

4. Dokumentasi

Pengumpulan data dan informasi dengan jalan membaca atau mengambil literatur, laporan, seminar, foto dan sebagainya.

F. Variabel Penelitian

Variabel penelitian menurut sugiyono (2006:60) adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dapat diartikan sebagai ciri dari individu, objek, gejala, yang dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada teori menurut Hardin (1968). Adapun variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.1
Variabel Penelitian

No.	Variabel	Indikator
1.	Aspek Sosial	a. Penyerapan tenaga kerja b. Tersedianya akses pelayanan c. Kesenjangan kesempatan kerja
2.	Aspek Ekonomi	a. Peningkatan pendapatan masyarakat, b. Peluang usaha c. Sektor informal d. Kesenjangan pendapatan
3.	Aspek Lingkungan	a. Konservasi lingkungan b. Pencemaran lingkungan c. Keamanan dan kenyamanan

G. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT.

Untuk menjawab rumusan masalah tentang pengembangan sumberdaya pesisir di Kecamatan Galesong dapat diketahui menggunakan analisis SWOT yang merupakan suatu alat efektif dalam membantu menstruktur masalah, terutama dengan melakukan analisis atas lingkungan strategis, yang lazim disebut sebagai lingkungan internal dan lingkungan eksternal ini pada dasarnya terdapat empat unsur yang selalu dimiliki yaitu secara internal memiliki sejumlah kekuatan-kekuatan (*strengths*) dan kelemahan-kelemahan (*weaknesses*), dan secara eksternal akan berhadapan dengan berbagai peluang-peluang (*opportunities*) dan ancaman-ancaman (*threats*).

Analisis ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang antara lain:

- 1) Kekuatan (*Strengths*) adalah faktor internal sebagai pendorong untuk mencapai tujuan pengembangan kawasan pesisir dengan pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan.
- 2) Kelemahan (*Weaknesses*) adalah mengidentifikasi faktor internal yang akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pengembangan kawasan pesisir dengan pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan.

- 3) Peluang (*Opportunities*) adalah faktor eksternal yang mendukung untuk mencapai pengembangan kawasan pesisir dengan pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan.
- 4) Ancaman (*Threats*) adalah mengidentifikasi faktor eksternal yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan pengembangan kawasan pesisir dengan pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan.

Tabel 3.2
Model Matriks Analisis SWOT

	Kekuatan (S) <i>Strategi SO</i>	Kelemahan (W) <i>Strategi WO</i>
Peluang (O)	(Strategi yang digunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang) <i>Strategi ST</i>	(Strategi yang meminimalkan kelemahan dan memanfaatkan peluang) <i>Strategi WT</i>
Ancaman (T)	(Strategi yang menggunakan kekuatan mengatasi ancaman)	(Strategi yang meminimalkan dan menghindari ancaman)

Sumber: Feddy Rangkuti, 2001

H. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan pokok pembahasan materi penelitian untuk dijadikan acuan. Definisi tersebut adalah:

- 1) Pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu sadar kepribadian yang seimbang, utuh, dan selaras.

- 2) Berkelanjutan adalah suatu konsep nilai yang meliputi tanggung jawab generasi saat ini terhadap generasi akan datang tanpa harus pula mengorbankan peluang generasi sekarang untuk tumbuh dan berkembang serta meletakkan dasar-dasar pengembangan bagi generasi-generasi mendatang.
- 3) Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, social, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaanya.
- 4) Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
- 5) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antar ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 6) Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut, sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang

terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.

- 7) Rehabilitas Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Takalar

1. Aspek Fisik Dasar

a. Letak Geografis Dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Takalar merupakan salah satu wilayah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak pada bagian selatan dan dibagian pesisir barat Sulawesi Selatan. Letak astronomis Kabupaten Takalar berada pada posisi $5^{\circ}3' - 5^{\circ}38'$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}22' - 119^{\circ}39'$ Bujur Timur, dengan luas wilayah kurang lebih $566,51 \text{ Km}^2$.

Secara administrasi Kabupaten Takalar terdiri dari 9 Kecamatan, dan 6 diantaranya merupakan wilayah pesisir dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores

Tabel 4.1
Jumlah Desa/Kelurahan Tiap Kecamatan di Kabupaten Takalar Tahun 2019

No	Kecamatan	Ibukota	Banyaknya		
			Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Mangarabombang	Mangadu	11	1	12
2	Mappakasunggu	Cilallang	3	1	4
3	Sanrobone	Sanrobone	6	-	6
4	Kepulauan Tanakeke	Maccini baji	5	-	5
5	Polombangkeng Selatan	Bulukunyi	4	6	10
6	Pattallassang	Pattallassang	-	9	9
7	Polombangkeng Utara	Palleko	12	6	18
8	Galesong Selatan	Bonto Kassi	12	-	12
9	Galesong	Galesong Kota	14	-	14
10	Galesong Utara	Bonto Lembang	9	1	10
Banyak Desa/Kelurahan			76	24	100

Sumber: Kabupaten Takalar Dalam Angka 2020

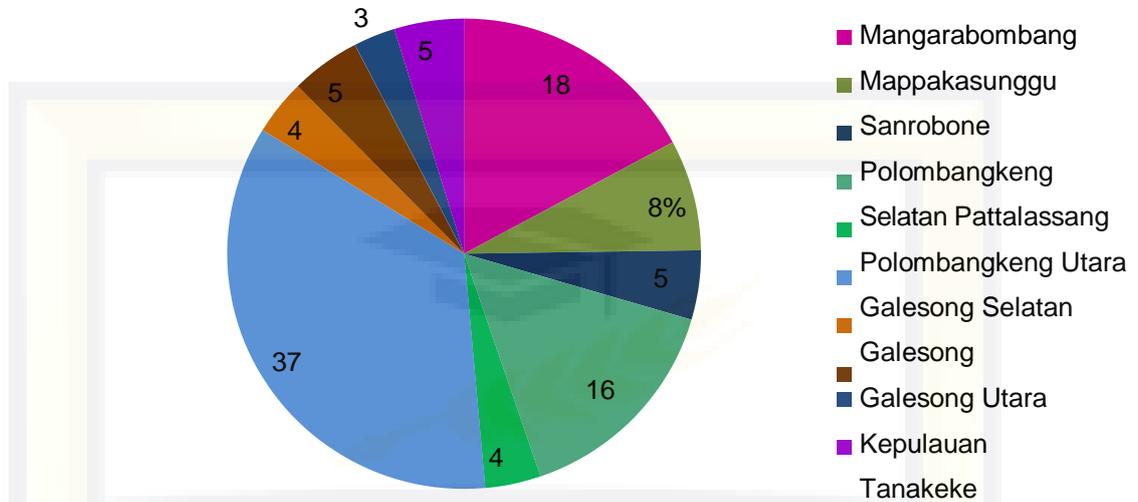
Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat jumlah Desa pada tiap Kecamatan Galesong terdiri dari 76 Desa dan 24 Kelurahan.

Tabel 4.2
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Takalar Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Presentase (%)
1	Mangarabombang	100,5	17,74
2	Mappakasunggu	45,27	7,99
3	Sanrobone	29,36	5,18
4	Kepulauan Tanakeke	30,15	5,32
5	Polombangkeng Selatan	88,07	15,55
6	Pattallassang	25,31	4,47
7	Polombangkeng Utara	212,25	37,47
8	Galesong Selatan	24,71	4,36
9	Galesong	25,93	4,58
10	Galesong Utara	15,11	2,67
Luas Wilayah Kab. Takalar		566,51	100
Luas Wilayah Pesisir/Pulau		240,88	42,52

Sumber: Kabupaten Takalar Dalam Angka 2020

Gambar 4.1
Luas Kecamatan di Kabupaten Takalar Tahun
2019

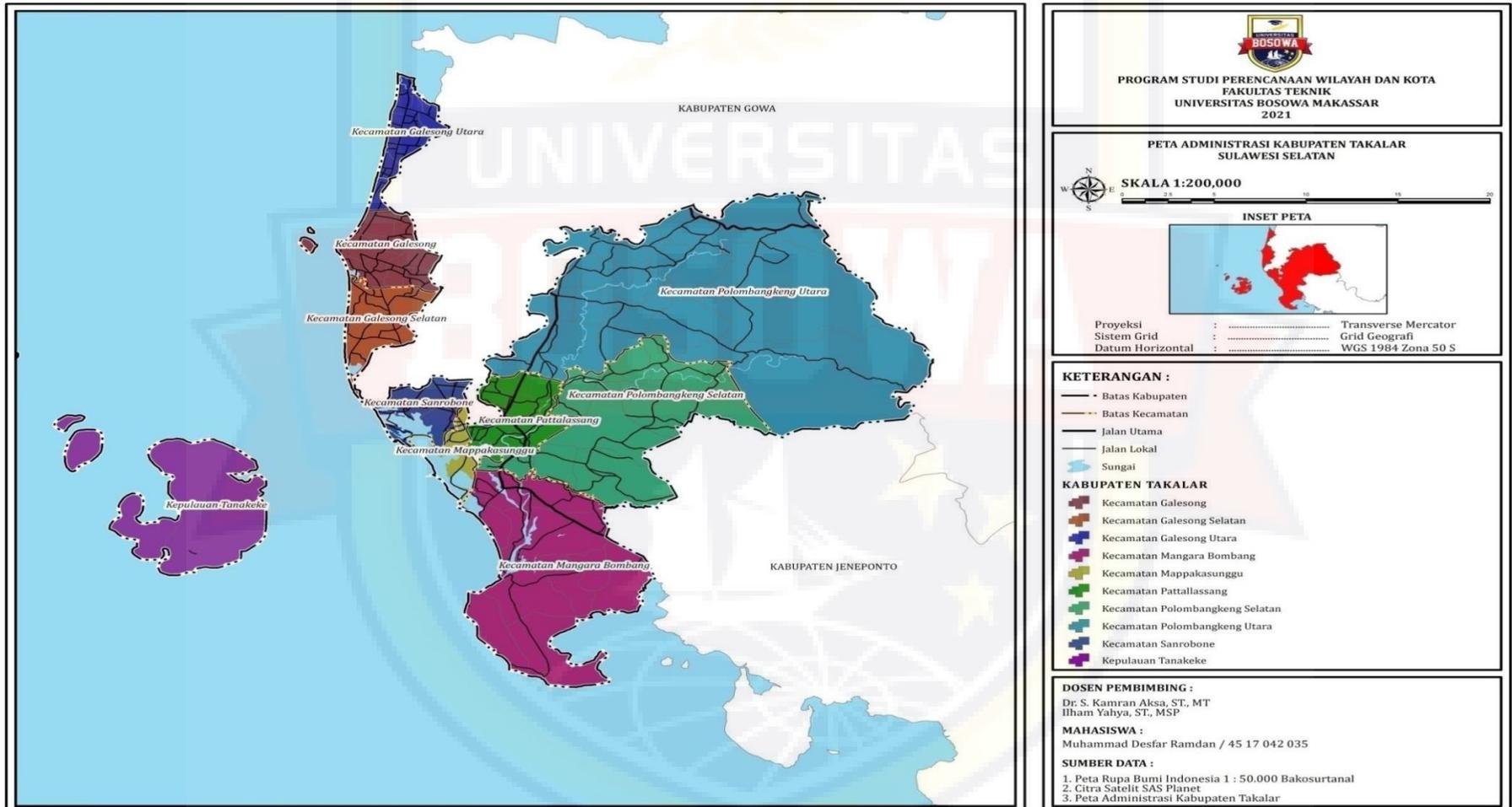


Wilayah pesisir dan pulau Kabupaten Takalar yang mencakup 6 (enam) wilayah administrasi kecamatan dengan luas wilayah pesisir dan pulau adalah 240,88 Km² atau 42,52% dari luas wilayah Kabupaten Takalar. Kecamatan Polombangkeng Utara merupakan kecamatan terluas dengan presentase 37% diikuti Kecamatan Mangarabombang 18%, Kecamatan Polombangkeng Selatan 16%, Kecamatan Mappakasunggu 8%, Kecamatan Sanrobone, Kecamatan Galesong dan Kepulauan Tanakeke 5%, Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Pattalassang 4%, Kecamatan Galesong Utara 3%.

Kawasan pesisir dan pulau membentang dari arah utara ke selatan dengan panjang garis pantai 74 km dan luas perairan laut menurut kewenangannya adalah 1.120 km² skala 4 mil dari batas pantai terluas.

Kawasan pesisir dan pulau di Kabupaten Takalar yang termasuk dalam wilayah pengembangan metropolitan Mamminasata merupakan peluang untuk berkembangnya usaha-usaha produktif yang berbasis pada potensi ruang masing-masing wilayah. Hal ini akan mempengaruhi distribusi dan kepadatan penduduk pada kawasan pesisir akan relatif berkembang karena kemudahan jangkauan terhadap Kota Makassar sebagai core pengembangan kawasan Mamminasata. Kawasan pesisir tersebut yang berbatasan dengan Kota Makassar adalah Kecamatan Galesong Utara yang dihubungkan dengan jaringan jalan alternatif yang berkembang menjadi koridor penghubung potensial yang mendorong pemanfaatan ruang pesisir ke arah insentif.

Gambar 4.2
Peta Administrasi Kabupaten Takalar



b. Kondisi Topografi

Topologi wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari pantai, daratan dan perbukitan. Berdasarkan topografinya, di bagian barat adalah daerah pantai dan dataran rendah dengan tingkat kemiringan 0-3 m meliputi 3 Kecamatan (Galesong Selatan, Galesong, Galesong Utara) derajat sedang ketinggian ruang bervariasi antara 0-25 m. Dibagian utara dan selatan relatif datar kecuali daerah perbukitan di sebagian kecil wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara (Desa Ko'mara dan Desa Barugaya) dan sebagian besar wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan (Kelurahan Bulukunyi, Desa Su'rulangi, Kelurahan Bontokadatto). Secara geologi, terdiri dari batuan penyusun geomorfologi dataran didominasi endapan *alluvial*, endapan rawa pantai, batu gamping, terumbu dan tufa serta beberapa tempat batuan lelehan basah.

Ketinggian wilayah Kabupaten Takalar berkisar antara 17 meter sampai dengan 64 meter diatas permukaan laut (mdpl). Kecamatan dengan posisi terendah diatas permukaan laut adalah Kecamatan Galesong Utara, sedangkan Kecamatan dengan posisi tertinggi di atas permukaan laut adalah Kecamatan Polombangkeng Selatan.

c. Kondisi Geologi

Struktur geologi Kabupaten Takalar dipengaruhi oleh formasi camba, terobosan, gunung api cindako, formasi tonasa dan endapan aluvium. Masing masing formasi batuan tersebut memiliki karakteristik yang membentuk struktur tanah dan batuan, antara lain :

- Formasi Terobosan, terbentuk atas batuan basal
- Formasi Camba terbentuk atas sedimen laut berselingan
- Formasi Tonasa terbentuk atas batuan gamping
- Formasi Gunung Api - Cindako, terbentuk atas batuan lava – breksi – tufa - konglomerat dan terutama lava
- Endapan aluvium dan pantai, terbentuk atas kerikil, pasir, lempung, dan lumpur

Jenis batuan atau geologi Kabupaten Takalar terdiri dari; Vulkanic (batuan Vulkanik), batuan ini merupakan batuan tertua yang telah mengalami perubahan, sebagian besar batu kapur terbentang sepanjang pantai perbatasan Takalar dengan Jeneponto. Gunung Api Baturape - Cindako merupakan batuan vulkanik basal yang terdiri dari lava dan batuan piro klastik yang bersilangan dengan tufa dan batu pasir. Batuan ini tersebar luas di wilayah pegunungan dan daerah dataran. Lapisan batuan ini memiliki porositas dan permeabilitas yang rendah. Batuan Intrusif terdiri atas batuan basal mulai dari dolerit, diorit, gabbro hingga diabase.

Gambar 4.4
Peta Geologi Kabupaten Takalar





PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2021

PETA GEOLOGI KABUPATEN TAKALAR
SULAWESI SELATAN

SKALA 1:200,000



INSET PETA



Proyeksi	:	Transverse Mercator
Sistem Grid	:	Grid Geografi
Datum Horizontal	:	WGS 1984 Zona 50 S

KETERANGAN :

- - Batas Kabupaten
- - Batas Kecamatan
- Sungai

Geologi

Jenis Batuan

- basal
- batuan sedimen laut berselingan dengan batuan gunung api
- batu gamping
- kerikil, pasir, lempung, lumpur, batu gamping koral
- lava, breksi, tufa, konglomerat
- terutama lava

DOSEN PEMBIMBING :
Dr. S. Kamran Aksa, ST., MT
Ilham Yahya, ST., MSP

MAHASISWA :
Muhammad Desfar Ramdan / 45 17 042 035

SUMBER DATA :

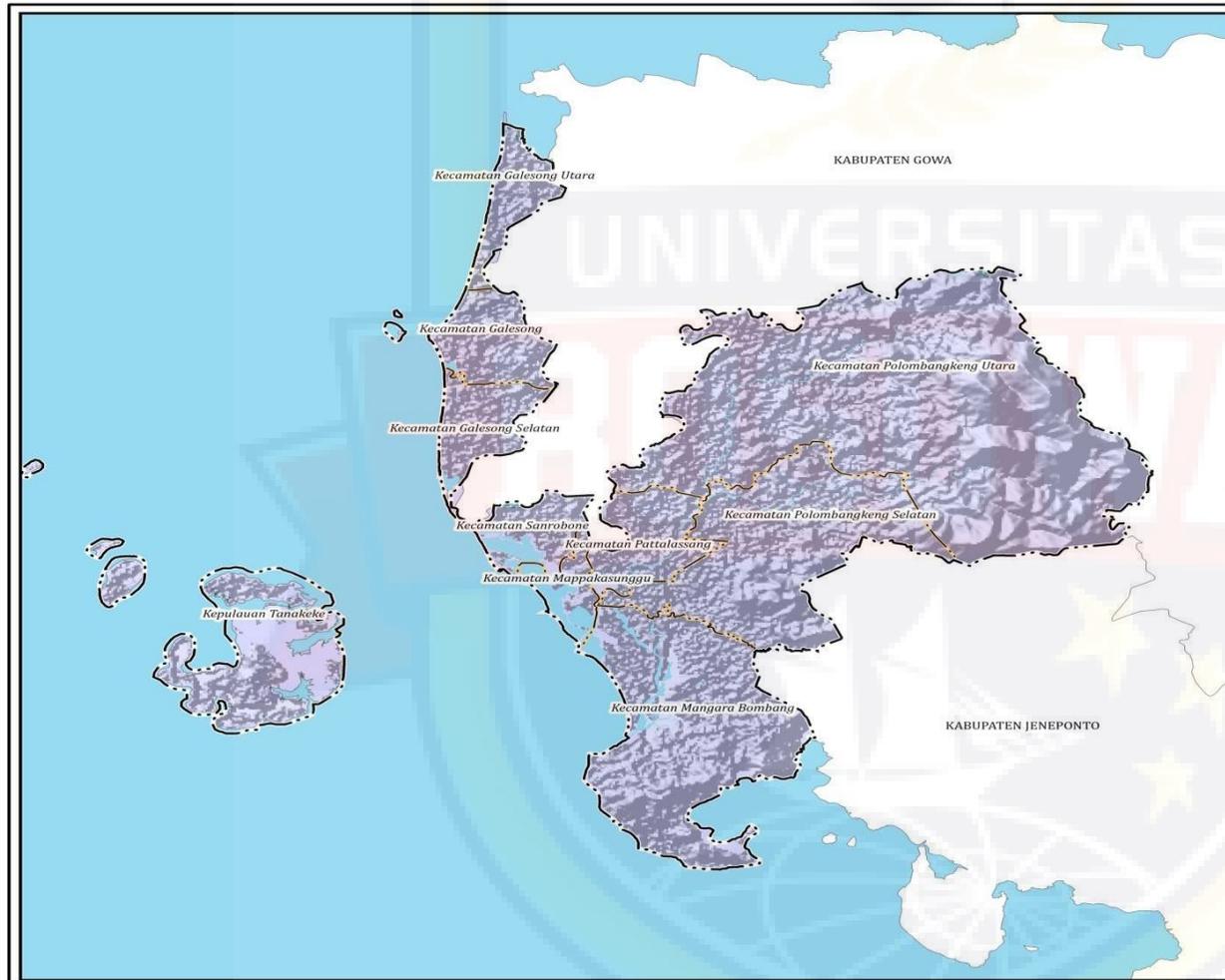
1. Peta Rupa Bumi Indonesia 1 : 50.000 Bakosurtanal
2. Citra Satelit SAS Planet
3. Peta Administrasi Kabupaten Takalar

d. Kondisi Klimatologi

Secara Klimatologi Kabupaten Takalar beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Musim hujan biasanya terjadi antara bulan November hingga bulan Mei. Berdasarkan pencatatan curah hujan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Takalar, rata-rata curah hujan terbanyak tahun 2019 terjadi pada bulan Desember yaitu sekitar 468 mm³ dan terjadi selama 24 hari, rata-rata curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu sekitar 3 mm³ dan terjadi hanya satu hari. Temperatur udara terendah 30,9 derajat celcius pada bulan Mei dan bulan Agustus

Kondisi iklim wilayah Kabupaten Takalar dan sekitarnya secara umum ditandai dengan jumlah hari hujan dan curah hujan yang relatif tinggi, dan sangat dipengaruhi oleh angin musim. Pada dasarnya anginmusim di Kabupaten Takalar dipengaruhi oleh letak geografis wilayah yang merupakan pertemuan Selat Makassar dan Laut Flores, kondisi ini berdampak pada putaran angin yang dapat berubah setiap waktu, hal terutama terjadi pada Kecamatan Mangarabombang, sehingga pada beberapa kawasan di wilayah ini mengalami kekeringan terutama musim kemarau.

Gambar 4.5
Peta Klimatologi Kabupaten Takalar





PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2021

PETA KLIMATOLOGI KABUPATEN TAKALAR
SULAWESI SELATAN

SKALA 1:200,000



INSET PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografi
Datum Horizontal	: WGS 1984 Zona 50 S

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Sungai

Klasifikasi

401

DOSEN PEMBIMBING :
Dr. S. Kamran Akse, ST, MT
Ilham Yahya, ST, MSP

MAHASISWA :
Muhammad Desfar Ramadan / 45 17 042 035

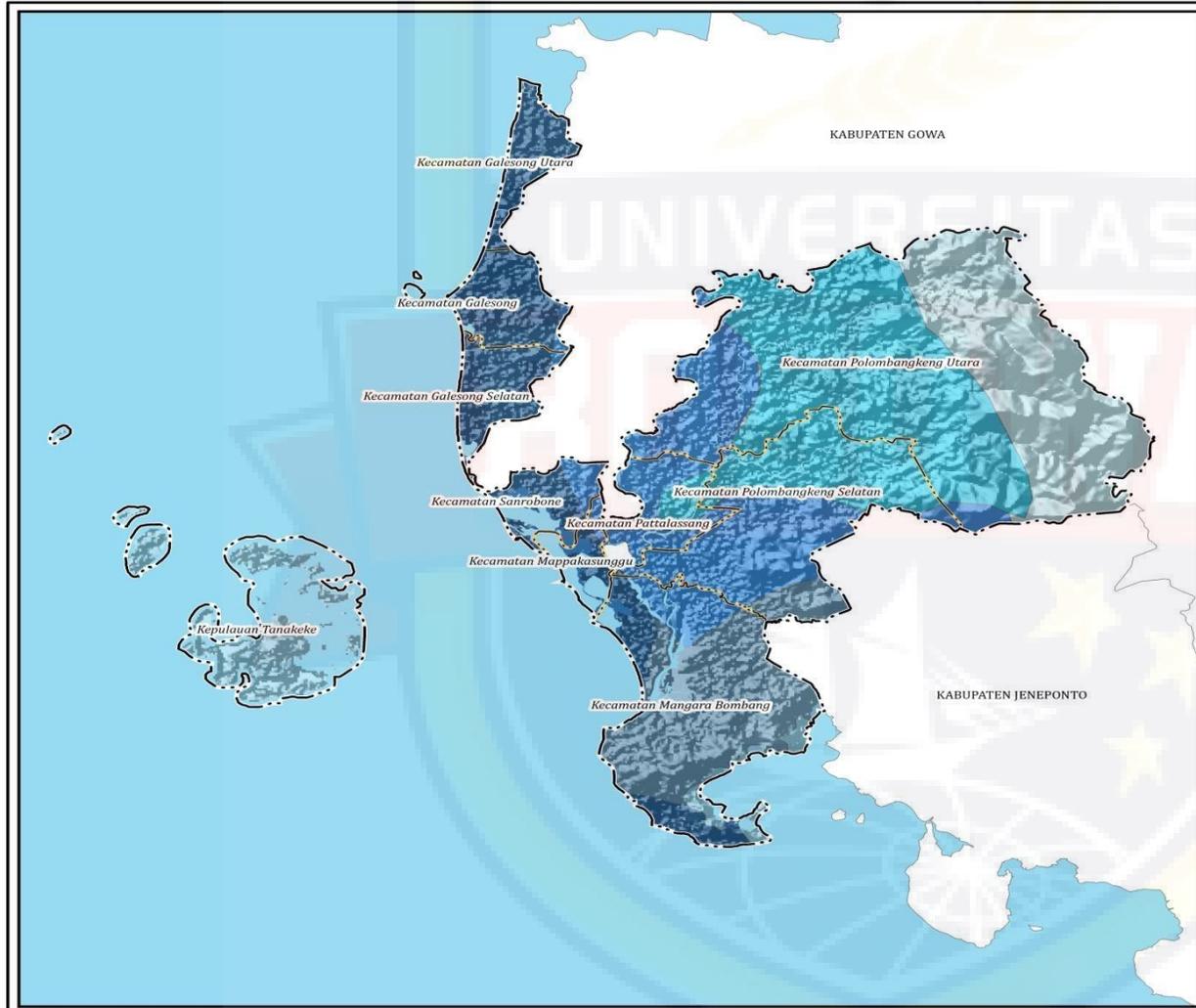
SUMBER DATA :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia 1 : 50.000 Bakosurtanal
2. Citra Satelit SAS Planet
3. Peta Administrasi Kabupaten Takalar

e. Kondisi Hidrologi

Secara Hidrologi. Kabupaten Takalar dilewati oleh 6 (enam) buah Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu Sungai Je'neberang, Sungai Pappa, Sungai Palleko, Sungai Je'netallasa, Sungai Pammukkulu dan Sungai Je'nemarrung. 4 (empat) diantara 6 (enam) sungai tersebut telah dibuat bendungan untuk irigasi sawah seluas 13.183 Ha, yaitu Sungai Pappa yang terletak di Kecamatan Pattalassang, Sungai Palleko yang terletak di Kecamatan Polombangkeng Utara, Sungai Pammukkulu atau Bendungan Pammukkulu yang terletak di Kecamatan Polombangkeng Utara, dan Sungai Je'nemarrung yang terletak di Kecamatan Polombangkeng Selatan

Gambar 4.6
Peta Hidrologi Kabupaten Takalar





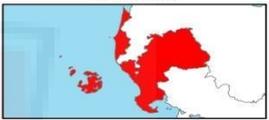
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2021

PETA HIDROLOGI KABUPATEN TAKALAR
SULAWESI SELATAN

SKALA 1:200,000




INSET PETA



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi
 Datum Horizontal : WGS 1984 Zona 50 S

KETERANGAN :

- - Batas Kabupaten
- — Batas Kecamatan
- Sungai

Hidrologi

Wilayah

- Daerah endapan batu gamping Ang.Taccipi F.Walanae & F.Tonasa, wilayah air tanah pada daerah
- Daerah pegunungan berfungsi sebagai wilayah isian/imbuhan air tanah
- Wilayah dataran dengan endapan aluvial sungai & pantai, endapan hasil Gunung api F.Camba & F. Walanae
- Wilayah dataran endapan aluvial & endapan hasil gunung api F.Camba, Wil. Airtanah cukup dalam dgn 1 - 3 lapisan akuifer
- Wilayah endapan aluvial sungai & pantai, MAT dangkal, dibeberapa tempat tersusupi air laut

DOSEN PEMBIMBING :
Dr. S. Kamran Aksa, ST, MT
Ilham Yahya, ST, MSP

MAHASISWA :
Muhammad Desfar Ramdan / 45 17 042 035

SUMBER DATA :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia 1 : 50.000 Bakosurtanal
2. Citra Satelit SAS Planet
3. Peta Administrasi Kabupaten Takalar

B. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Galesong

1. Aspek Fisik Dasar

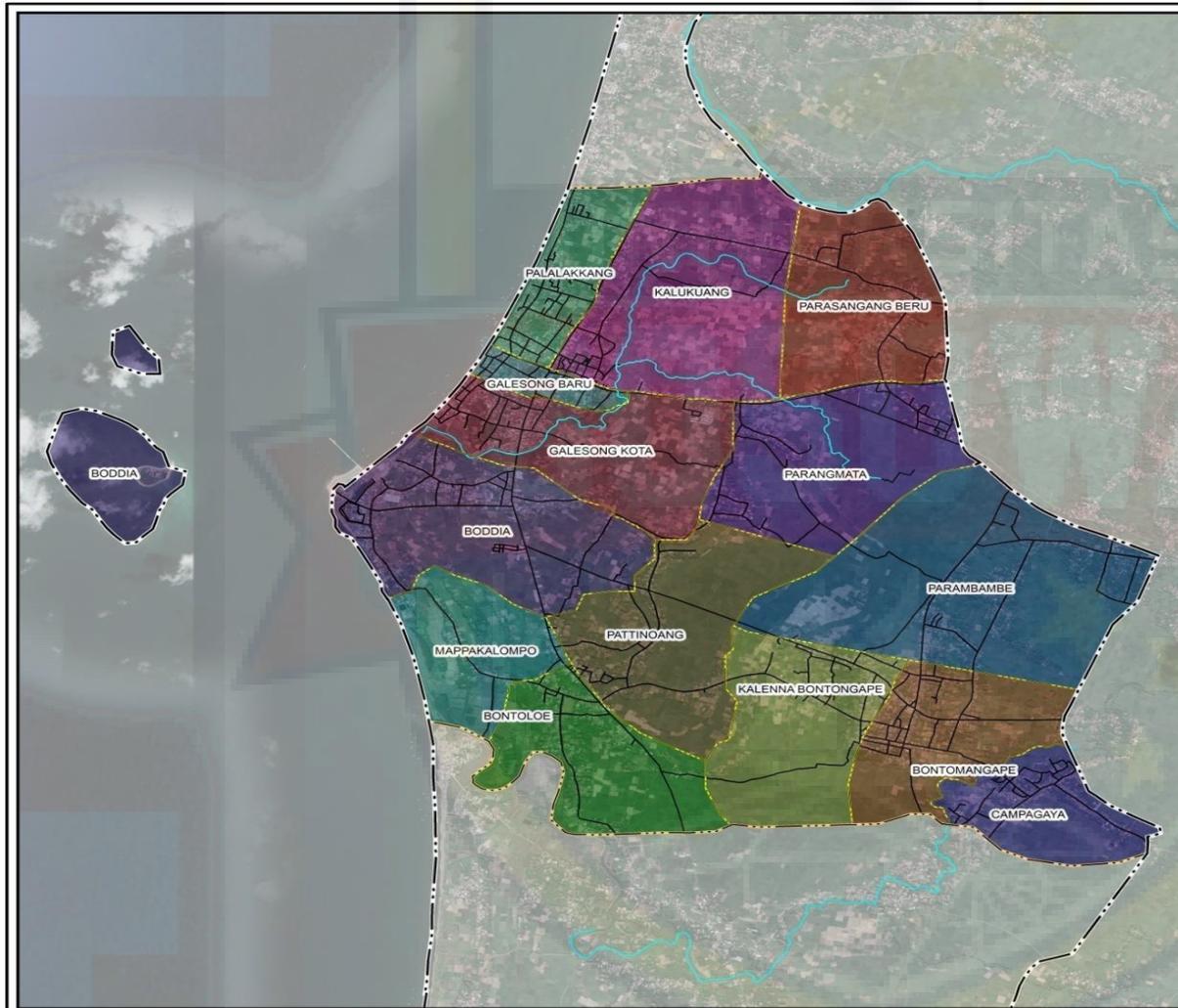
a. Letak Geografis Dan Batas Wilayah Administrasi

Kecamatan Galesong merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Takalar dengan luas wilayah sekitar 24.71 km² atau sebesar 4,36 persen dari total Kabupaten Takalar.

Kecamatan Galesong ini merupakan kecamatan yang baru pemekaran sejak tahun 2007, sehingga secara administrasi Kecamatan Galesong terdiri dari 14 desa, 62 dusun dan 5 diantaranya wilayah pesisir dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Galesong Utara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Galesong Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Gambar 4.7
Peta Administrasi Kecamatan Galesong





PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2021

PETA ADMINISTRASI KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR



SKALA 1:30,000



INSET PETA



Proyeksi	: Transverse Mercator	
Sistem Grid	: Grid Geografi	
Datum Horizontal	: WGS 1984 Zona 50 S	

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- ~ Sungai
- Jalan

KECAMATAN GALESONG

■ Desa Boddia	■ Desa Parangmata
■ Desa Bontoloe	■ Desa Parasangang Beru
■ Desa Bontomangape	■ Desa Pattinoang
■ Galesong Baru	■ Desa Campagaya
■ Galesong Kota	■ Desa Mappakalompo
■ Desa Kallenabontongape	
■ Desa Kalukuang	
■ Desa Palalakkang	
■ Desa Parambambe	

DOSEN PEMBIMBING :
Dr. S. Kamran Aksa, ST, MT
Ilham Yahya, ST, MSP

MAHASISWA :
Muhammad Desfar Ramdan / 45 17 042 035

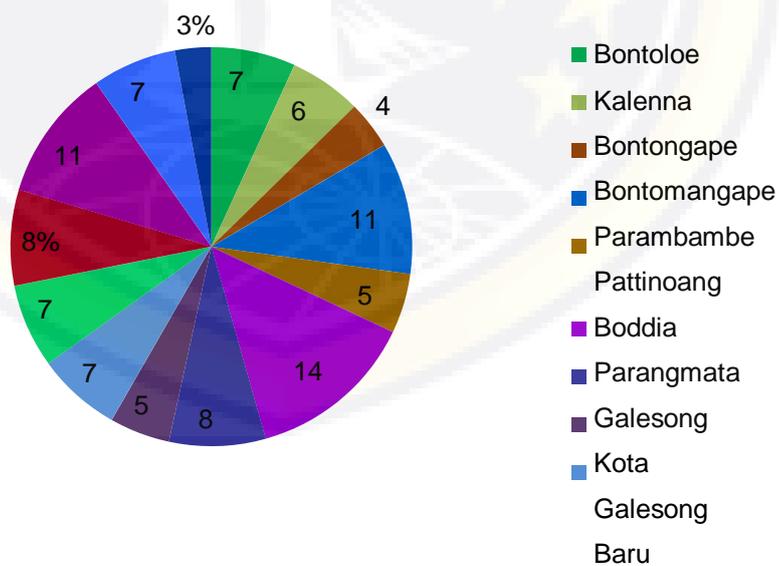
SUMBER DATA :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia 1 : 50.000 Bakosurtanal
2. Citra Satelit SAS Planet
3. Peta Administrasi Kabupaten Takalar

Tabel 4.3
Luas Desa di Kecamatan Galesong Tahun 2019

No	Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1	Bontoloe	1,73	6,67
2	Kalenna Bontongape	1,44	5,55
3	Bontomangape	1,04	4,01
4	Parambambe	2,74	10,57
5	Pattinoang	1,25	4,82
6	Boddia	3,57	13,77
7	Parangmata	1,95	7,52
8	Galesong Kota	1,27	4,90
9	Galesong Baru	1,72	6,63
10	Palalakkang	1,74	6,71
11	Pa'rasangan Beru	2,00	7,71
12	Kalukuang	2,90	11,18
13	Mappakalompo	1,92	7,41
14	Campagaya	0,66	2,55
Luas Wilayah Kecamatan Galesong		25,93	100

Sumber: Kecamatan Galesong Dalam Angka 2020

Gambar 4.8
Luas Desa di Kecamatan Galesong Tahun 2019



Berdasarkan tabel dan grafik tersebut Kecamatan Galesong

merupakan Kecamatan yang cukup luas mencapai 25,93 km².

Wilayah pesisir Kecamatan Galesong yang mencakup 14 (empat

belas) Desa dengan luas adalah ± 25,93 Km² yang dimana Desa

Boddia merupakan Desa terluas dengan presentase 13,77%

diikuti Desa Kalukuang 11,18% dan Desa Parambambe 10,57%,

sedangkan Desa Campagaya merupakan Desa terkecil dengan

presentase 2,55% diikuti Desa Bontomangape 4,01% dan Desa

Pattinoang 4,82% merupakan Kecamatan dengan potensi sumber

daya alam pesisir yang cukup berpotensi untuk dikembangkan.

Potensi yang dimiliki Kecamatan Galesong diantaranya potensi

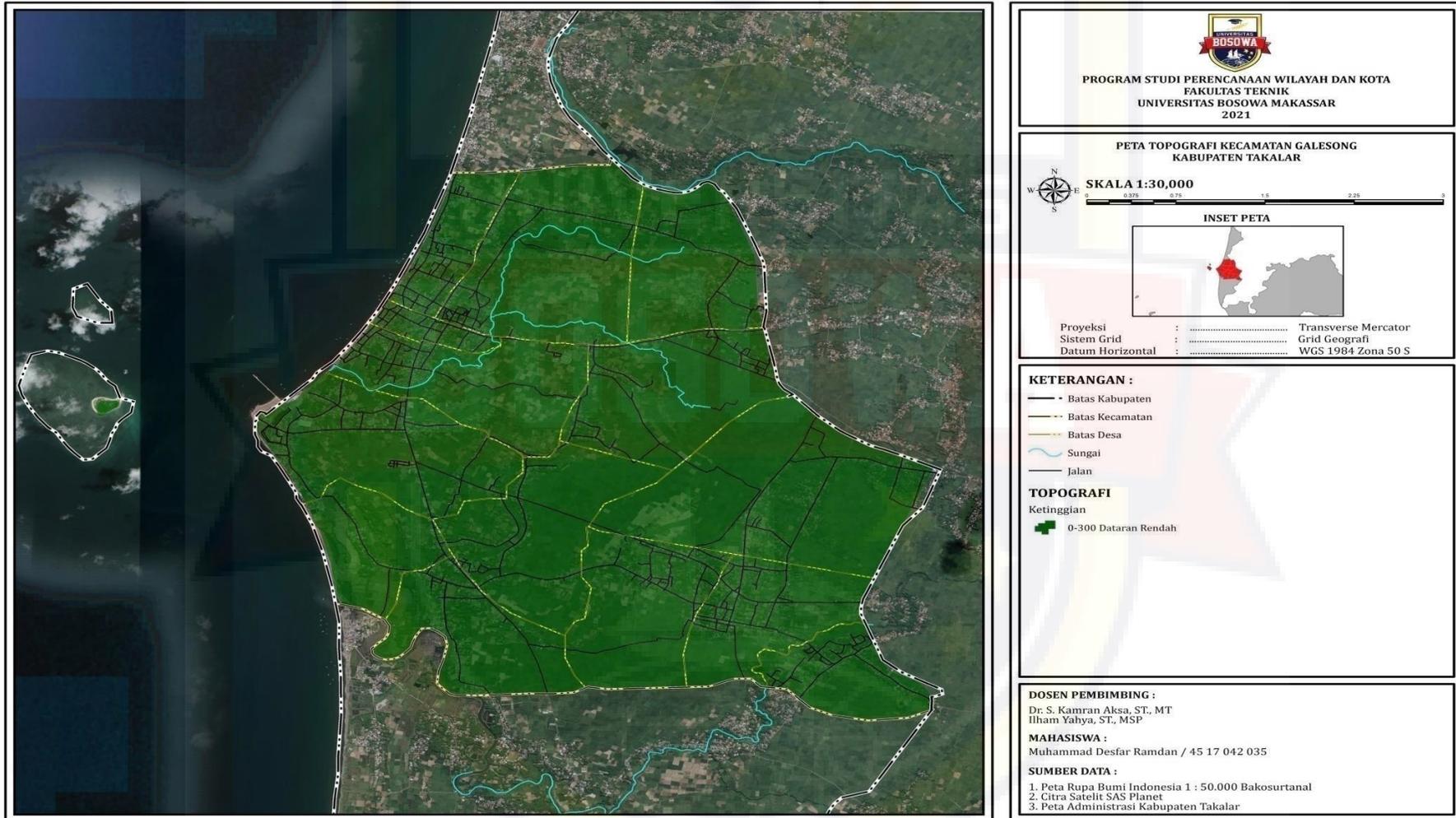
perikanan laut, pertanian, peternakan, dan perkebunan,

b. Kondisi Topografi

Kondisi topografi wilayah Kecamatan Galesong berada pada ketinggian 0-34 mdpl atau merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian ruang bervariasi antara 0-25 m dari permukaan air laut yang umumnya dapat dijangkau. Berdasarkan standarisasi, wilayah yang berada pada ketinggian 2-15% maka wilayah tersebut sangat cocok untuk dijadikan sebagai kawasan permukiman.

Begitu pun dengan Kecamatan Galesong yang berada pada ketinggian 2-5% maka wilayah ini dapat dijadikan sebagai kawasan permukiman sebagai fungsi utama dan didukung oleh fungsi-fungsi penunjang seperti ketersediaan fasilitas fisik atau fasilitas umum (pasar, pusat perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana air bersih, persampahan dan drainase) dan fasilitas sosial (kesehatan, pendidikan, agama)

Gambar 4.9
Peta Topografi Kecamatan Galesong



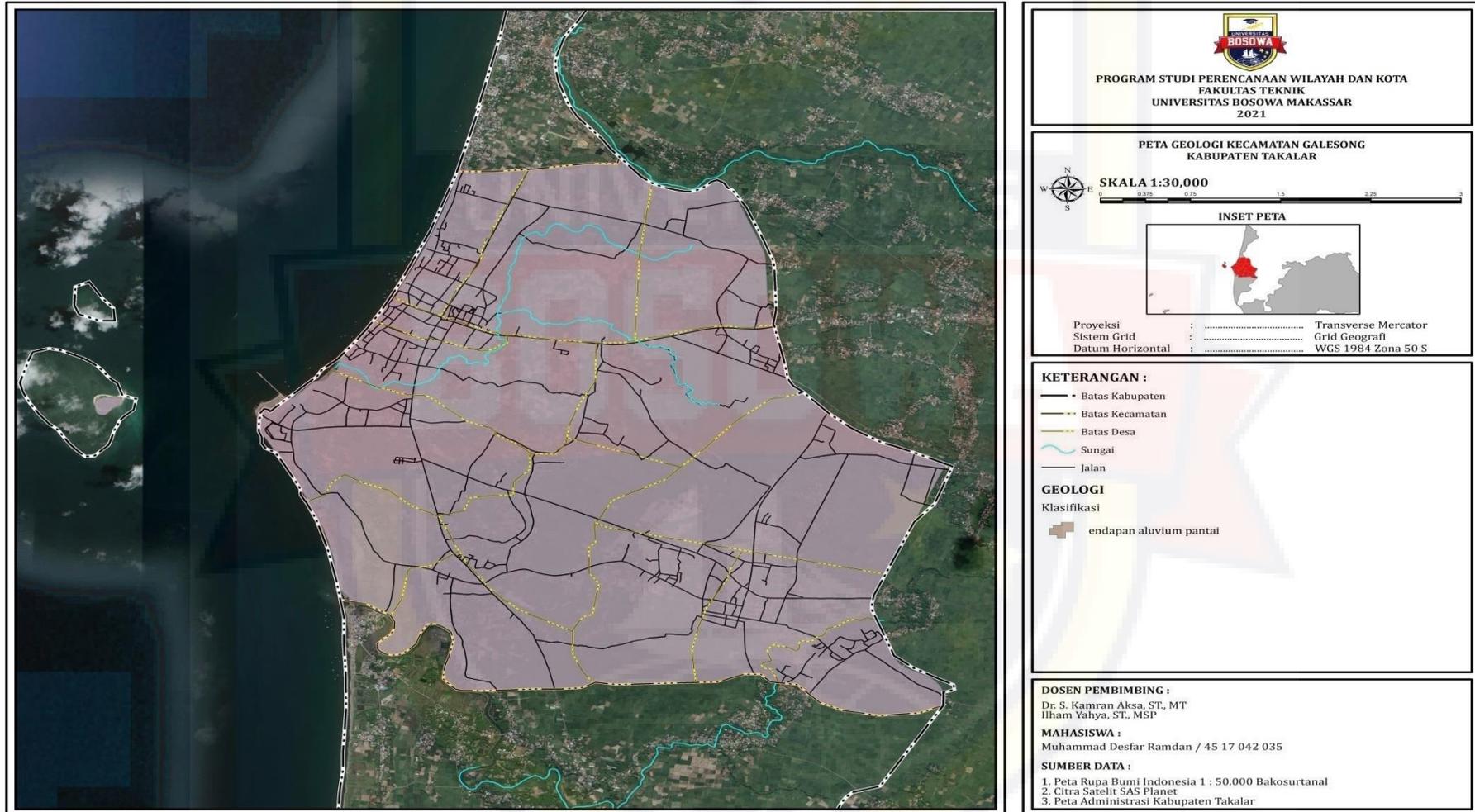
c. Kondisi Geologi

Jenis tanah di kawasan pesisir dan laut Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar didominasi oleh tanah Haploisol dan juga terdiri dari tanah Mediteran entisol yang mempunyai tekstur warna merah, kuning, hitam, dan abu-abu sehingga kawasan Kecamatan Galesong ini cocok untuk lahan pertanian, permukiman maupun tambak. Sedangkan keadaan geologi merupakan gambaran struktur tanah pembentuk suatu daerah.

Batuan-batuan yang terdapat di Indonesia sangat erat hubungannya dengan sistem pegunungan yang ada di Indonesia.

Dengan kondisi letak tersebut berpengaruh bagi Indonesia. Adapun penyebaran geologi di Kecamatan Galesong terdiri atas Batuan endapan alluvium pantai namun masih layak untuk daerah permukiman. Maka jenis batuan di wilayah ini sudah mendukung untuk menopang bangunan-bangunan permukiman dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

Gambar 4.10
Peta Geologi Kecamatan Galesong



d. Kondisi Klimatologi

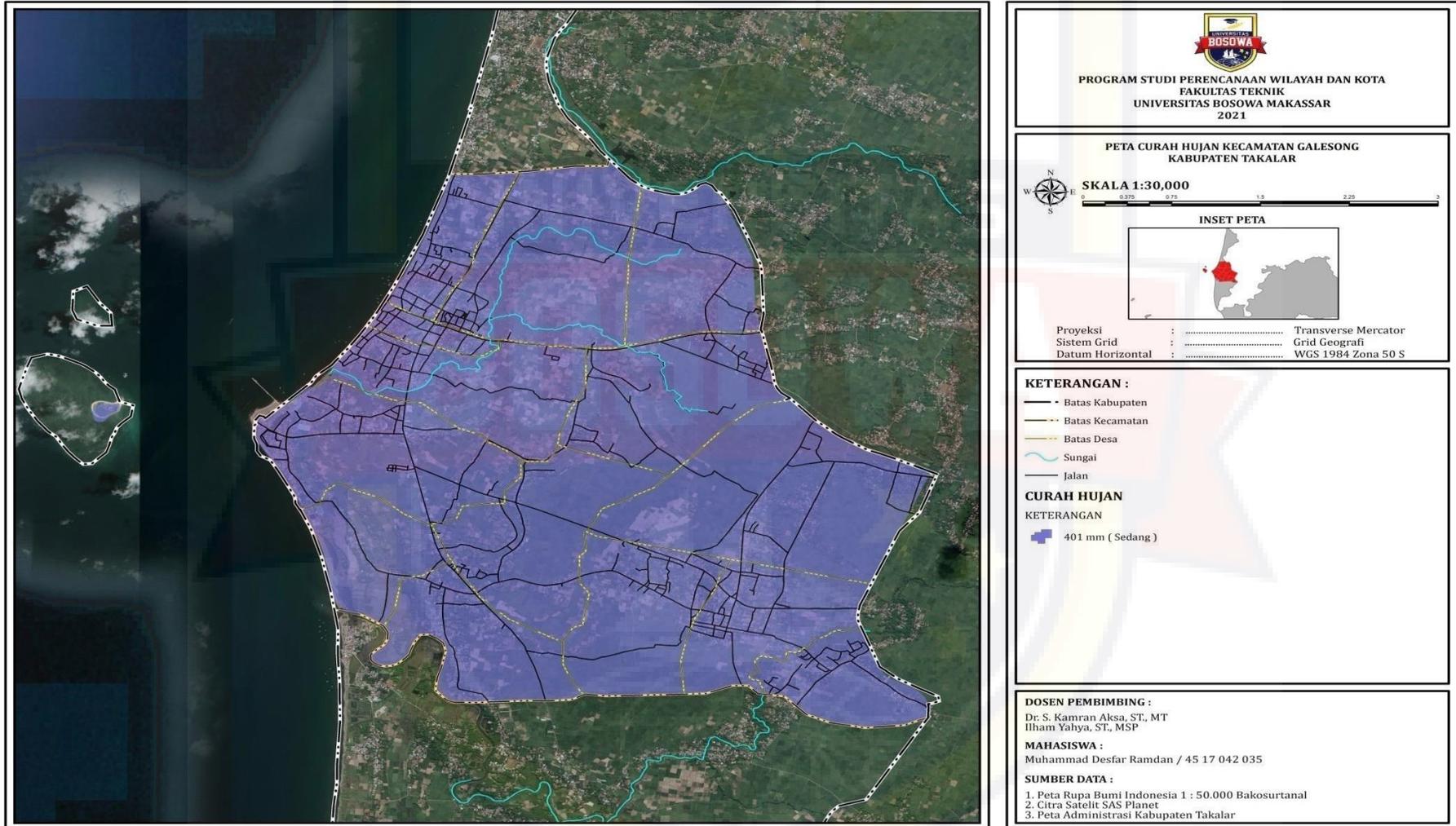
Keadaan iklim Kabupaten Takalar termasuk kedalam iklim lembab atau agak basah. Curah hujan terjadi karena dipengaruhi oleh keadaan iklim dan perputaran atau pertemuan arus udara. Pada tahun 2018 rata-rata hari hujan dalam setahun sekitar 8 hari dengan rata-rata curah hujan setahun sekitar 169 mm. Jumlah hari hujan banyak terjadi di Bulan Januari dan Bulan Maret. Sedangkan curah hujan banyak terjadi pada Bulan Februari dan Bulan Maret. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4

Tabel 4.4
Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan Di Kecamatan Galesong Tahun 2019

No.	Bulan Month	Curah Hujan (mm ³) Precipitation(mm ³)	Hari Hujan Rainy Days
1	Januari	470	22
2	Februari	552	19
3	Maret	523	22
4	April	67	12
5	Mei	5	2
6	Juni	42	9
7	Juli	23	3
8	Agustus	-	-
9	September	4	1
10	Oktober	-	-
11	November	35	-
12	Desember	306	-

Sumber: Kecamatan Galesong Dalam Angka 2020

Gambar 4.11
Peta Klimatologi Kecamatan Galesong



e. Kondisi Hidrologi

Siklus hidrologi memiliki peranan yang teramat penting bagi kelangsungan hidup organisme di bumi. Melalui siklus inilah, kesediaan air di daratan bumi dapat tetap terjaga, mengingatnya teraturinya suhu lingkungan, cuaca, hujan, dan keseimbangan ekosistem bumi dapat tercipta karena proses siklus hidrologi ini. Di Kecamatan Galesong terdapat dua sungai yang mengalir di sekitar wilayah sekitarnya yaitu Sungai Binanga Saro dan mengalir wilayah di Kelurahan Mappakalombo, Kelurahan Bontoloe dan Campagaya. Sedangkan Sungai Binanga Galesong melintasi 6 kelurahan di Kecamatan Galesong dengan panjang 54,50 km dan debit 14, 154 m³/det dengan luas lahan yang diairi adalah 6.251 ha. Adapaun air sungai ini dapat di olah menjadi air yang memenuhi standar kebersihan sehingga ketika musim kemarau tiba, masyarakat yang berada di wilayah ini tidak lagi mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Oleh karena itu, kebersihan air sungai ini tetap dijaga karena keberadaannya air sungai ini dapat membantu kelangsungan hidup masyarakat Kecamatan Galesong

2. Kependudukan

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk suatu wilayah merupakan aset pembangunan yang akan berperan dalam menentukan berbagai kebijakan yang akan diambil dalam mendukung perkembangan industri, perdagangan, jasa, dan sumber daya pesisir.

Dengan jumlah penduduk terbanyak terletak pada Desa pesisir yakni Desa Palalakkang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.5

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Kecamatan Galesong Tahun 2019

No	Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Bontoloe	2.905
2	Kalenna Bontongape	2.037
3	Bontomangape	1.938
4	Parambambe	3.311
5	Pattinoang	1.622
6	Boddia	5.019
7	Parangmata	2.177
8	Galesong Kota	4.112
9	Galesong Baru	4.091
10	Palalakkang	6.258
11	Pa'rasangan Beru	2.150
12	Kalukuang	3.154
13	Mappakalompo	1.612
14	Campagaya	1.035
Jumlah		41.421

Sumber: Kecamatan Galesong Dalam Angka 2020

b. Perkembangan Penduduk Dua Tahun Terakhir

Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kecamatan Galesong sebanyak 40.962 jiwa dan pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan penduduk sebanyak 41.421 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6
Perkembangan Penduduk Tiap Desa di Kecamatan Galesong Tahun 2019

No	Desa	2018	2019	Pertumbuhan Penduduk(%)
1	Bontoloe	2.874	2.905	1,08
2	Kalenna Bontongape	2.023	2.037	0,69
3	Bontomangape	1.923	1.938	0,78
4	Parambambe	3.292	3.311	0,58
5	Pattinoang	1.598	1.622	1,50
6	Boddia	4.945	5.019	1,50
7	Parangmata	2.146	2.177	1,44
8	Galesong Kota	4.075	4.112	0,91
9	Galesong Baru	4.040	4.091	1,26
10	Palalakkang	6.188	6.258	1,13
11	Pa'rasangan Beru	2.122	2.150	1,32
12	Kalukuang	3.113	3.154	1,32
13	Mappakalompo	1.595	1.612	1,07
14	Campagaya	1.028	1.035	0,68
Jumlah		40.962	41.421	1,12

Sumber: Kecamatan Galesong Dalam Angka 2020

c. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Kecamatan Galesong dalam kurun waktu 2018 hingga 2019, nampak mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 sekitar 1.597,39 jiwa/km² dan pada tahun 2019 naik menjadi 1.597,72 jiwa/km². Di tahun 2019 jika dilihat perdesa, tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di Desa Palalakkang,

yakni sekitar 3.596,57 jiwa/km², diikuti Desa Galesong Kota sekitar 3.237,21 jiwa/km². Sedangkan desa dengan tingkat kepadatan terendah adalah Desa Mappakalombo yakni sekitar 839 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7
Kepadatan Penduduk di Kecamatan Galesong Tahun 2019

No	Desa	KepadatanPenduduk (Jiwa/km ²)
1	Bontoloe	1.679,38
2	Kalenna Bontongape	1.414,53
3	Bontomangape	1.863,91
4	Parambambe	1.208,56
5	Pattinoang	1.297,06
6	Boddia	1.405,23
7	Parangmata	1.116,47
8	Galesong Kota	3.237,21
9	Galesong Baru	2.378,64
10	Palalakkang	3.596,57
11	Pa'rasangan Beru	1.075,40
12	Kalukuang	1.087,10
13	Mappakalombo	839
14	Campagaya	1.568,35
Jumlah		1.597,72

Sumber: Kecamatan Galesong Dalam Angka 2020

d. Penduduk Dengan Mata Pencaharian

Mata pencaharian pokok tiap desa di Kecamatan Galesong yang terbanyak adalah pertanian dengan jumlah 9.649 yang dimana di Desa Palalakkang memiliki jumlah mata pencaharian petani sekitar 1.625, kemudian mata pencaharian terbanyak kedua yaitu nelayan dengan jumlah 5.153 yang dimana di Desa Palalakkang memiliki jumlah mata pencaharian nelayan sekitar

1.897. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8
Penduduk Menurut Mata Pencaharian Pokok Tiap Desa di
Kecamatan Galesong Tahun 2019

No	Desa	Pertanian	Nelayan	Industri	Konstruksi	Perdagangan
1	Bontoloe	438	328	43	36	68
2	Kalenna Bontongape	529	-	82	30	15
3	Bontomangape	693	-	87	40	19
4	Parambambe	610	-	150	33	74
5	Pattinoang	625	147	35	52	58
6	Boddia	515	399	31	125	42
7	Parangmata	993	4	25	43	183
8	Galesong Kota	728	533	15	44	59
9	Galesong Baru	773	747	8	55	39
10	Palalakkang	1.625	1.897	6	15	256
11	Pa'rasangan Beru	943	2	97	46	147
12	Kalukuang	297	265	92	43	23
13	Mappakalombo	131	831	7	29	15
14	Campagaya	749	-	129	13	9
Jumlah		9.649	5.153	807	604	1007

Sumber: Kecamatan Galesong Dalam Angka 2020

e. Tingkat Harapan Hidup

Tingkat harapan hidup adalah jumlah rata-rata tahun (umur) yang diharapkan oleh seseorang yang baru lahir untuk dijalani sampai meninggal kelak. Tingkat harapan hidup menggambarkan tingkat kualitas hidup penduduk melalui tingkat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Semakin besar tingkat harapan hidup berarti semakin tinggi pula kualitas hidup penduduk yang bersangkutan.

Tabel 4.9
Angka harapan hidup dan Indeks Kualitas Hidup
Kabupaten Takalar 2015-2019

Tahun	Angka Harapan Hidup	IKH
2015	65,9	84,68
2016	66,2	83,20
2017	66,29	82,79
2018	66,38	83,16
2019	66,64	86,20

Sumber: Revisi RTRW Kab.Takalar 2012-2031

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dilihat setiap tahun terjadi peningkatan angka harapan hidup dan indeks kualitas hidup Kabupaten Takalar. Dimana pada tahun 2019 angka harapan hidup mencapai 66,64 dan IKH sebesar 86,20 yang berarti kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Takalar semakin membaik tiap tahunnya.

f. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kegiatan ekonomi di Kabupaten Takalar telah memperlihatkan angka pertumbuhan yang cukup mengembirakan. Indikator tersebut dapat dilihat dengan meningkatnya income pendapatan perkapita masyarakat. Peningkatan pendapatan perkapita tersebut berimplikasi pada peningkatan pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh secara

umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar di dominasi oleh perkembangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan serta konstruksi.

Tabel 4.10
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Takalar (milliar rupiah) Tahun
2015-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.336,14	2.589,74	2.774,42	2.956,53	3.121,4
Pertambangan dan Penggalian	77,15	84,19	91,44	97,30	103,5
Industri Pengolahan	295,39	312,94	328,42	332,54	366,4
Pengadaan Listrik dan Gas	7,98	8,82	9,38	10,05	11,5
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,75	2,82	3,01	3,24	3,4
Konstruksi	342,97	373,53	408,52	434,25	458,1
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	662,53	725,74	790,54	873,33	949,2
Transportasi dan Pergudangan	148,08	159,25	172,96	189,73	206,0
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,10	17,43	19,05	21,41	23,2
Informasi dan Komunikasi	194,83	214,53	236,23	252,77	274,3
Jasa Keuangan dan Asuransi	63,86	71,92	76,33	80,16	84,4
Real Estat	297,37	321,93	349,72	365,04	386,1
Jasa Perusahaan	0,33	0,34	0,37	0,41	0,4
Administrasi Pemerintahan, dan Jaminan Sosial Wajib	340,48	370,48	382,85	402,36	446,8
Jasa Pendidikan	71,76	74,82	79,82	86,78	92,0
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	61,56	63,86	66,79	68,94	72,6
Jasa Lainnya	12,26	12,99	14,09	15,84	16,9
Total	4.931,54	5.405,32	5.803,94	6.190,67	6.616,3

Sumber: Revisi RTRW Kab. Takalar 2012-2031

g. Kondisi Fisik Pantai dan Sumber Daya Pesisir

Dalam suatu wilayah pesisir terdapat satu atau lebih ekosistem dan sumber daya pesisir. Ekosistem pesisir ada yang secara terus menerus tergenangi air dan ada pula yang tergenangi air sesaat. Sedangkan berdasarkan sifatnya, ekosistem pesisir dapat dibedakan atas ekosistem yang bersifat alamiah dan ekosistem buatan. Yang termasuk dalam ekosistem alamiah adalah hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, pantai berpasir, pantai berbatu, estuaria. Sedangkan ekosistem buatan terdiri dari tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri dan kawasan pemukiman.

1) Hydro-Oceanografi

Kecamatan Galesong ditinjau dari sudut oceanografi memiliki daerah perairan atau laut. Hal ini dapat dilihat pada daerah pesisir pantai sepanjang kurang lebih 95,8 km. Panjang pantai Daerah pesisir pantai tersebut cukup potensial bila dimanfaatkan sebagai wilayah pengembangan perikanan laut karena memiliki bermacam-macam hasil laut, seperti udang, ikan layang, kepiting dan hasil-hasil laut lainnya seperti rumput laut yang dewasa ini telah diusahakan oleh para nelayan.

Gelombang merupakan salah satu parameter oceanografi fisika yang sangat mempengaruhi kondisi pantai.

Gelombang sebagai parameter yang sangat penting dalam suatu survey pantai dimana penyebab pembentuknya adalah akibat angin, letusan gunung api bawah laut, peristiwa tsunami dan akibat pergerakan tata surya. Data hasil pengukuran di lokasi survey pada wilayah pesisir Kecamatan Galesong yaitu berkisar antara 5,63 m/det – 20,25 m/det.

Pengukuran arah dan kecepatan arus pada daerah survey pantai dimaksudkan untuk memperoleh informasi lebih jauh tentang dampak hembusan angin dan diasumsikan arah arus mengikuti (searah) dengan pola sebaran angin. Di samping itu untuk mengetahui kemungkinan arus turbulensi dan pola arus menyebabkan proses sedimentasi pada daerah tersebut. Hasil pengukuran arus pada wilayah survey tersebut yaitu antara 0,13 – 0,93 m/det dengan arah 200 – 310, sedangkan arus yang terjadi dipantai umumnya adalah arus susur pantai.

Analisis pasang surut dimaksudkan untuk mengetahui tipe-tipe pasang surut yang terjadi dalam suatu lokasi tertentu dalam sehari semalam. Dari hasil pengamatan pasang surut dilakukan menunjukkan bahwa daerah survey memiliki tipe pasang surut campuran, yaitu tipe diurnal dan semidiurnal.

Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui kemiringan pantai terhadap lautan. Dari hasil dan pengamatan yang dilakukan, kelandaian pantai pada wilayah Kecamatan Galesong secara umum untuk lokasi survey adalah kelandaian berkisar antar 43,3% - 60% ini menunjukkan bahwa daerah survey memiliki pantai yang terjal.

2) Bathimetri

Kondisi ombak di perairan Kecamatan Galesong sangat tergantung pada keadaan musim. Pada musim Timur dimana kecepatan angin bertiup berada pada kisaran 173,4 m/mnt sampai 117,6 m/mnt dapat membangkitkan gelombang laut dengan tinggi mencapai 0,5-1,2 meter. Sedangkan pada musim Timur yang memiliki kisaran kecepatan tiupan angin antara 133,2-45 m/dtk mampu membangkitkan gelombang yang mencapai ketinggian 0,4 – 1,4 meter.

3) Ekosistem Pesisir

a. Terumbu Karang

Kecamatan Galesong ini memiliki terumbu karang yang terletak di Pulau Sanrobengi Desa Boddia dengan kondisi terumbu karang di daerah ini tergolong buruk dengan luas tutupan karang hidup kurang dari 25%. Kondisi ini diindikasikan dengan tingginya penutupan pada karang-

karang yang mati yaitu 77% di pantai Selatan. (dilihat grafik 4.1) Komunitas bentuk karang di perairan Pulau Sanrobengi didominasi oleh karang mati dan beralga dengan persentase penutupan 80%. Sedangkan persentase penutupan karang hidup hanya 10% yang didominasi karang Massive, Karang Acropora Tabulate, kemudian jenis Sponge dan Hydroids sekitar 2%,

- **Karang Massive**



Karang massive secara khas berbentuk bola atau bongkahan batu dan relatif tumbuh lambat karena mereka memiliki profil yang sangat stabil, karang

massive jarang rusak oleh aksi gelombang yang kuat kecuali mereka terlepas dari penahannya.

- **Karang Acropora Tabulate**



Bentukan formasi ini sering disebut juga dengan karang meja karena meskipun mereka memiliki bentuk bercabang, pertumbuhan mereka cenderung

mendatar menyerupai meja. Karang jenis ini memiliki suatu penopang pada satu sisi bagian ventral.

- **Sponge**



Terumbu sponge merupakan terumbu yang dibentuk oleh sponge Hexactinellid, yang memiliki kerangka yang terbuat dari silika dan sering

disebut sebagai spons kaca. Terumbu karang ini memiliki fungsi ekologis yang penting sebagai habitat tempat berkembang biak dan tempat berkembang biak bagi ikan dan invertebrata.

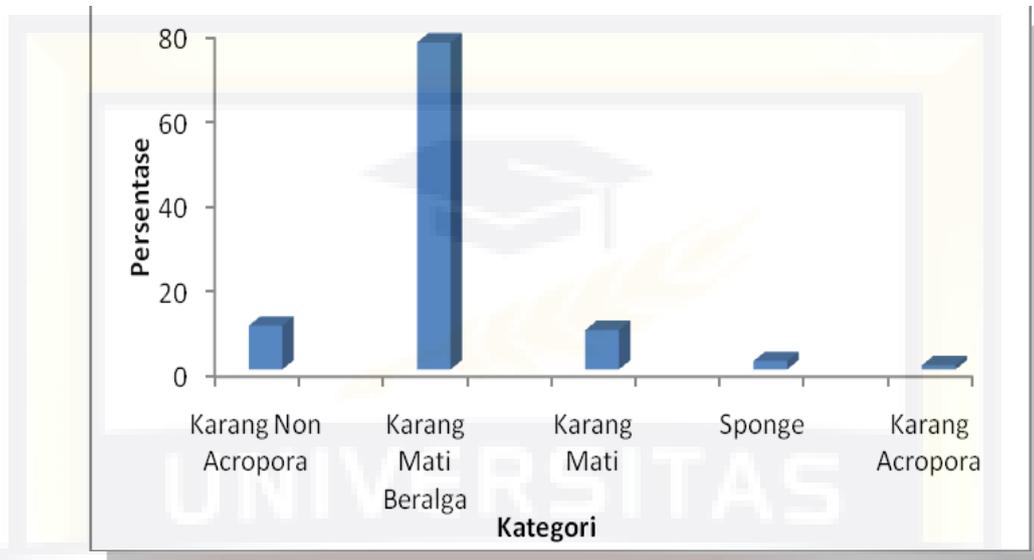
- **Hydroids**



Koloni terumbu karang yang sehat seringkali memiliki organisme lain yang menempel dan terjalin di antara cabang-cabangnya.

Agregasi besar hydroids umumnya tidak ada pada koloni karang yang sehat. Sebaliknya, hydroids membentuk cabang yang rusak dan dapat menunjukkan kesehatan karang secara keseluruhan.

Gambar4.12
Grafik Persentase Penutupan Karang dan Alga di Perairan Pulau Sanrobengi



Sumber: RENSTRA WP3K Takalar, 2009

b. Mangrove

Pantai Boe di Desa Mappakalombo Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar merupakan salah satu bagian dari wilayah pesisir Kabupaten Takalar yang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai objek wisata pantai. Lahan di belakang pantai berupa empang dan tambak. Dari hasil pengukuran diketahui bahwa luas empang yaitu ± 2 ha dan luas tambak yaitu ± 1 ha.

c. Padang Lamun

Lamun (*sea grass*) adalah tumbuhan berbunga (*Angiospermae*) yang sepenuhnya menyesuaikan diri untuk hidup terbenam dalam laut. Tumbuhan ini memiliki akar, batang, menjalar (*rhizoma*), daun, bunga dan biji (Fortes, 1990). Lamun memiliki peranan ekologis yang penting dalam ekosistem laut. Peran utama lamun adalah sebagai produsen utama dalam piramida makanan, dan juga merupakan habitat bagi banyak organisme laut sebagai tempat mencari makan, berlindung, bertelur, memijah, dan mengasuh anak. Banyak organisme epifit ditemukan melekat pada daun lamun. Lamun memiliki peran yang besar secara fisik bagi ekosistem. Akar lamun yang dapat mampu menstabilkan substrat sekaligus mengurangi energi gelombang/ombak, sehingga mencegah erosi/abrasi pantai. Daun dan akar lamun yang rapat juga mampu menjebak zat hara, nutrien dan sedimen.

Kabupaten Takalar memiliki ekosistem padang lamun yang tersebar di pulau-pulau kecil pesisir Kabupaten Takalar.

Berdasarkan analisa citra ALOS PRISM dan AVNIR -2, luas padang lamun di Kabupaten Takalar 715 ha. Kondisi padang lamun di Kabupaten Takalar dengan kerusakan rendah seluas 416 ha, kerusakan sedang 229 ha, dan kerusakan tinggi seluas 29 ha. Jenis lamun yang umum ditemukan di perairan pulau-pulau kecil di Kabupaten Takalar adalah *Halodule sp* dan *Enhallus sp*.

4) Perikanan

Untuk mendukung aktivitas nelayan maka harus didukung dengan perahu motor sehingga wilayah pencarian ikan bisa lebih luas dan dapat memuat hasil produksi perikanan yang ada. Alat transportasi pendukung perikanan tersebut berupa perahu tanpa motor, motor temple, dan kapal motor, yang hanya tersebar di kawasan pesisir dan pulau pada tahun 2019 sebanyak 569 unit yang terdiri dari perahu layar 24 unit, motor tempel 225 unit, sampan/lepa-lepa 242 unit dan balolang 78 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.11
Jumlah Perahu/Motor Tempel Menurut Jenisnya di Kecamatan
Galesong Tahun 2019

No	Desa	Jenis Perahu/Kapal			
		Motor Tempel	Perahu Layar	Sampan/ Lepa-Lepa	Balolang
1	Bontoloe	-	2	10	7
2	Kalenna Bontongape	-	-	-	-
3	Bontomangape	-	-	-	-
4	Parambambe	-	-	-	-
5	Pattinoang	-	-	-	-
6	Boddia	8	2	189	6
7	Parangmata	-	-	-	-
8	Galesong Kota	23	7	-	-
9	Galesong Baru	30	5	18	50
10	Palalakkang	132	3	13	-
11	Pa'rasangan Beru	-	-	-	-
12	Kalukuang	-	-	-	-
13	Mappakalompo	32	5	12	15
14	Campagaya	-	-	-	-
Jumlah		225	24	242	78

Sumber: Kecamatan Galesong Dalam Angka 2020

Selain alat transportasi perahu juga harus didukung dengan peralatan penangkap ikan sehingga hasil tangkapan dapat maksimal. Beberapa jenis alat tangkap ikan yang digunakan oleh nelayan/masyarakat di kawasan pesisir antara lain paying, pukot cicing, pukot pantai, jaringa insang tetap, jermal, bubu dan lain sebagainya dengan jumlah alat tangkap pada tahun 2019 adalah 5.026 unit (lihat tabel 4.10). Pemakaian alat tangkap ikan yang digunakan oleh penduduk harus selalu diawasi agar ikan-ikan yang ditangkap oleh nelayan yang memenuhi persyaratan untuk ditangkap dan

menjadi kelestarian ekosistem laut yang saat ini diperkirakan beberapa potensi ikan laut akan punah karena pengendalian penangkapan ikan teratasi.

Tabel 4.12
Jumlah Alat Penangkapan Ikan (unit) Menurut Jenisnya di Kecamatan Galesong Tahun 2019

No	Desa	Jumlah Alat Tangkap (unit)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bontoloe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kalenna Bontongape	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Bontomangape	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Parambambe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pattinoang	-	-	-	-	-	-	-	-	15	75	105	-
6	Boddia	16	26	4	27	115	120	-	16	46	30	782	87
7	Parangmata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Galesong Kota	-	7	4	21	56	155	-	5	39	21	795	62
9	Galesong Baru	-	-	-	-	-	-	-	26	4	27	-	-
10	Palalakkang	38	20	6	39	155	120	-	15	58	33	802	98
11	Pa'rasangan Beru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kalukuang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Mappakalombo	19	2	4	15	75	105	-	9	37	27	669	54
14	Campagaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		73	55	18	102	401	500	-	71	199	213	3.093	301

Sumber: Kecamatan Galesong Dalam Angka 2020

Keterangan:

- | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|
| 1. Payang | 2. Pukat Cincing | 3. Pukat Pantai |
| 4. Jaring Insang Tetap | 5. Rawai Tetap | 6. Pancing Lain |
| 7. Bagang Tancap | 8. Sero | 9. Jaring Insang Hanyut |
| 10. Jermal | 11. Alat Tangkap | 12. Bubu/Pakaja |

Jenis budidaya ikan yang diusahakan oleh penduduk Kecamatan Galesong secara umum dan kawasan pesisir pada khususnya adalah tambak, sungai, rawa dan kolam. Luas lahan pengembangan budidaya ikan di kawasan pesisir Kecamatan Galesong sebesar 242 Ha (tabel 4.13). Usaha pengembangan budidaya ikan masih berada pada kawasan pesisir saja tidak dikembangkan pada kawasan lautnya dengan mengembangkan ikan-ikan yang berpotensi ekspor dan bernilai jual lebih tinggi.

Tabel 4.13
Luas Areal (Ha) Budidaya Ikan di Kecamatan Galesong Tahun 2019

No	Desa	Jenis Budidaya Ikan				Jumlah
		Tambak	Sungai	Rawa	Kolam	
1	Bontoloe	-	-	-	-	-
2	Kalenna Bontongape	-	-	-	-	-
3	Bontomangape	-	-	-	-	-
4	Parambambe	49	11	5	2	67
5	Pattinoang	-	-	-	-	-
6	Boddia	-	-	-	-	-
7	Parangmata	-	-	-	-	-
8	Galesong Kota	45	10	5	1	61
9	Galesong Baru	-	-	-	-	-
10	Palalakkang	36	3	6	-	45
11	Pa'rasangan Beru	-	-	-	-	-
12	Kalukuang	-	-	-	-	-
13	Mappakalombo	51	7	10	1	69
14	Campagaya	-	-	-	-	-
Jumlah		181	31	26	4	242

Sumber: Kecamatan Galesong Dalam Angka 2020

Keluarga yang menggantungkan sumber perekonomiannya di sektor perikanan cukup banyak. Jumlah rumah tangga yang beraktivitas di lahan laut lebih banyak dibanding lahan tambak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.14.

Tabel 4.14
Jumlah Rumah Tangga Perikanan di Kecamatan Galesong Tahun 2019

No	Desa	Jenis Rumah Tangga Perikanan		
		Laut	Tambak	Perairan Umum
1	Bontoloe	20	-	10
2	Kalenna Bontongape	-	-	-
3	Bontomangape	-	-	-
4	Parambambe	-	11	-
5	Pattinoang	11	-	-
6	Boddia	30	-	15
7	Parangmata	-	-	-
8	Galesong Kota	23	19	8
9	Galesong Baru	-	5	-
10	Palalakkang	27	39	12
11	Pa'rasangan Beru	-	-	-
12	Kalukuang	5	7	3
13	Mappakalompo	15	38	16
14	Campagaya	-	-	-
Jumlah		131	119	64

Sumber: Kecamatan Galesong Dalam Angka 2020

Sebaran penduduk menurut jenis pekerjaan yang beraktivitas sebagai nelayan tidak hanya di kawasan pesisir, tetapi kawasan lainnya seperti Desa Mappakalompo dan Galesong Baru juga masih adanya nelayan. Dari jumlah penduduk sebagai nelayan tersebut, pada umumnya bekerja di perairan laut disamping di lahan tambak dan perairan umum.

Jumlah nelayan yang bekerja di laut sebanyak 4.178 orang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.13.

Tabel 4.15
Jumlah Nelayan (orang) Menurut Jenisnya di Kecamatan Galesong
Tahun 2019

No	Desa	Jumlah Nelayan Menurut Jenisnya		
		Laut	Tambak	Perairan Umum
1	Bontoloe	-	15	-
2	Kalenna Bontongape	-	-	9
3	Bontomangape	-	-	-
4	Parambambe	-	-	-
5	Pattinoang	-	-	-
6	Boddia	526	-	-
7	Parangmata	-	-	-
8	Galesong Kota	1.037	29	9
9	Galesong Baru	1.020	10	10
10	Palalakkang	1.067	28	6
11	Pa'rasangan Beru	-	-	-
12	Kalukuang	-	19	-
13	Mappakalompo	528	16	-
14	Campagaya	-	-	-
Jumlah		4.178	117	34

Sumber: Data Demografi Populasi Per Wilayah

Potensi lain pada kawasan pesisir adalah tersedianya lahan pengembangan usaha tambak untuk pengembangan ikan dan udang. Umumnya usaha tambak tersebar di kawasan pesisir dengan jumlah produksi pada tahun 2019 sebanyak 283 ton. Jenis budidaya yang dilakukan pada lahan tambak adalah ikan bandeng 82 ton dan udang 75 ton. Untuk lebih jelasnya produksi tambak menurut jenisnya dapat dilihat pada tabel 4.14.

Tabel 4.16
Jumlah Produksi Tambak Menurut Jenisnya di Kecamatan Galesong
Tahun 2019

No	Desa	Jumlah Produksi Tambak (ton)		
		Bandeng	Udang	Ikan Lainnya
1	Bontoloe	10	11	28
2	Kalenna Bontongape	-	-	-
3	Bontomangape	-	-	-
4	Parambambe	-	-	-
5	Pattinoang	-	-	-
6	Boddia	-	-	-
7	Parangmata	-	-	-
8	Galesong Kota	15	14	24
9	Galesong Baru	13	15	31
10	Palalakkang	19	15	10
11	Pa'rasangan Beru	-	-	-
12	Kalukuang	-	-	-
13	Mappakalompo	25	20	13
14	Campagaya	-	-	-
Jumlah		82	75	126

Sumber: Kecamatan Galesong Dalam Angka 2020

Gambar 4.13
Tambak di Desa Mappakalompo



Gambar 4.14
Tambak Di Galesong Baru



Sumber: Survey Lapangan 2020

Usaha perikanan yang diusakan menurut perairan umum dapat dibagi dua jenis yakni sungai, rawa dan kolam, yang kesemuanya hanya dilakukan pada kawasan darat saja dengan

jumlah produksi ikan secara keseluruhan adalah ±50 ton. Ini mengindikasikan bahwa potensi perikanan pada perairan umum masih didominasi di kawasan pesisir dengan jumlah produksi ikan terbanyak pada perairan sungai 22 ton. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.15.

Tabel 4.17
Jumlah Produksi Ikan di Perairan Umum Menurut Jenisnya di Kecamatan Galesong Tahun 2019

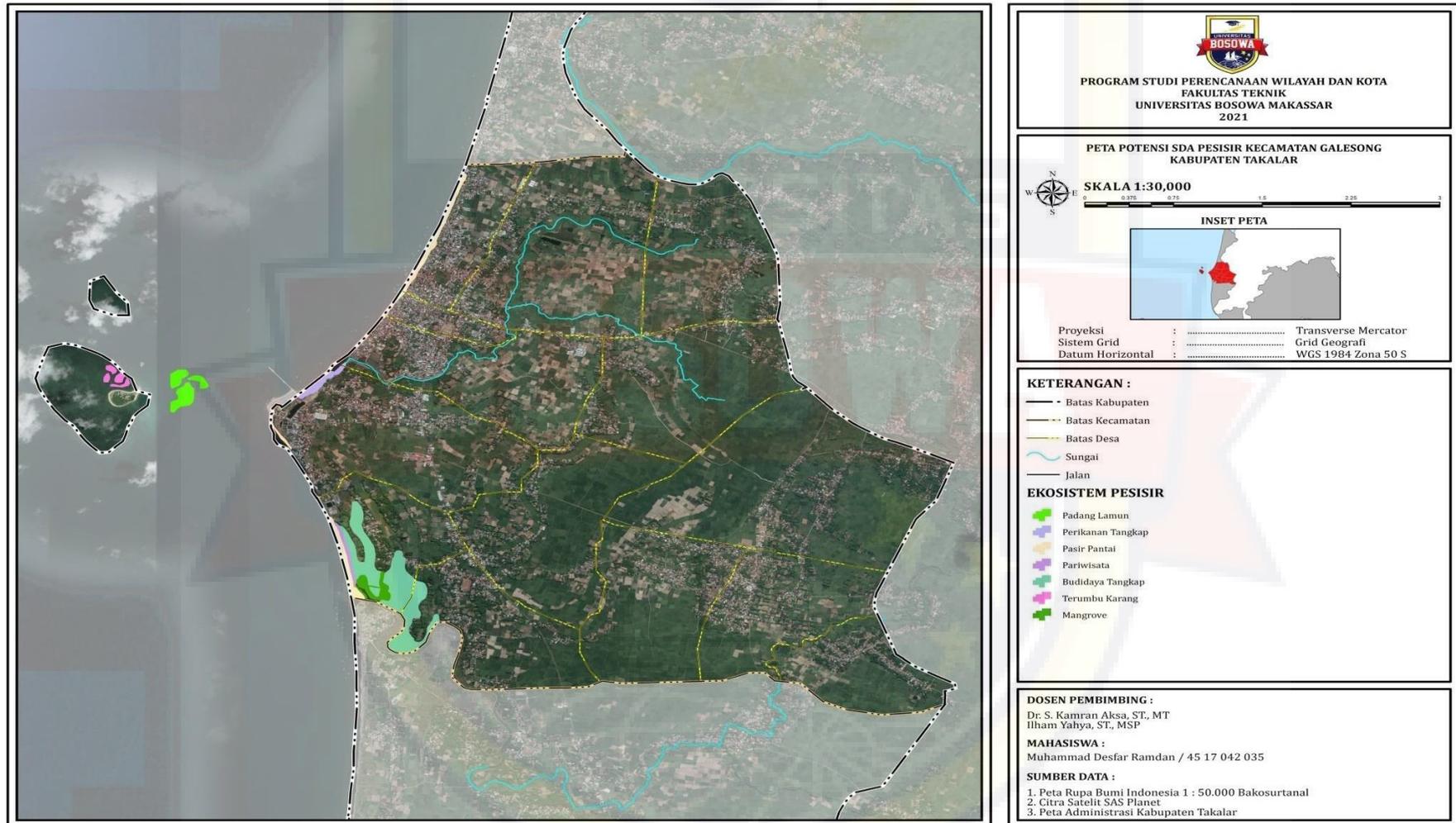
No	Desa	Jenis Produksi Ikan (ton)		
		Sungai	Rawa	Kolam
1	Bontoloe	-	-	-
2	Kalenna Bontongape	-	-	-
3	Bontomangape	-	-	-
4	Parambambe	-	-	-
5	Pattinoang	-	-	-
6	Boddia	8	-	-
7	Parangmata	-	-	-
8	Galesong Kota	-	1	3
9	Galesong Baru	5	3	2
10	Palalakkang	7	4	1
11	Pa'rasangan Beru	-	-	-
12	Kalukuang	-	-	-
13	Mappakalompo	2	4	3
14	Campagaya	-	4	3
Jumlah		22	16	12

Sumber: Kecamatan Galesong Dalam Angka 2020

5) Obyek Wisata

Sumber daya pariwisata yang terdapat di Kecamatan Galesong hanya ada di Desa Boddia dan Desa Mappakalompo yaitu Pantai Boe dan Pulau Sanrobengi. Potensi sumber daya pariwisatanya di Kecamatan Galesong sangat baik akan tetapi pemerintah setempat dan masyarakatnya kurang memperhatikan.

Gambar 4.15
Peta Potensi SDA Pesisir Kecamatan Galesong



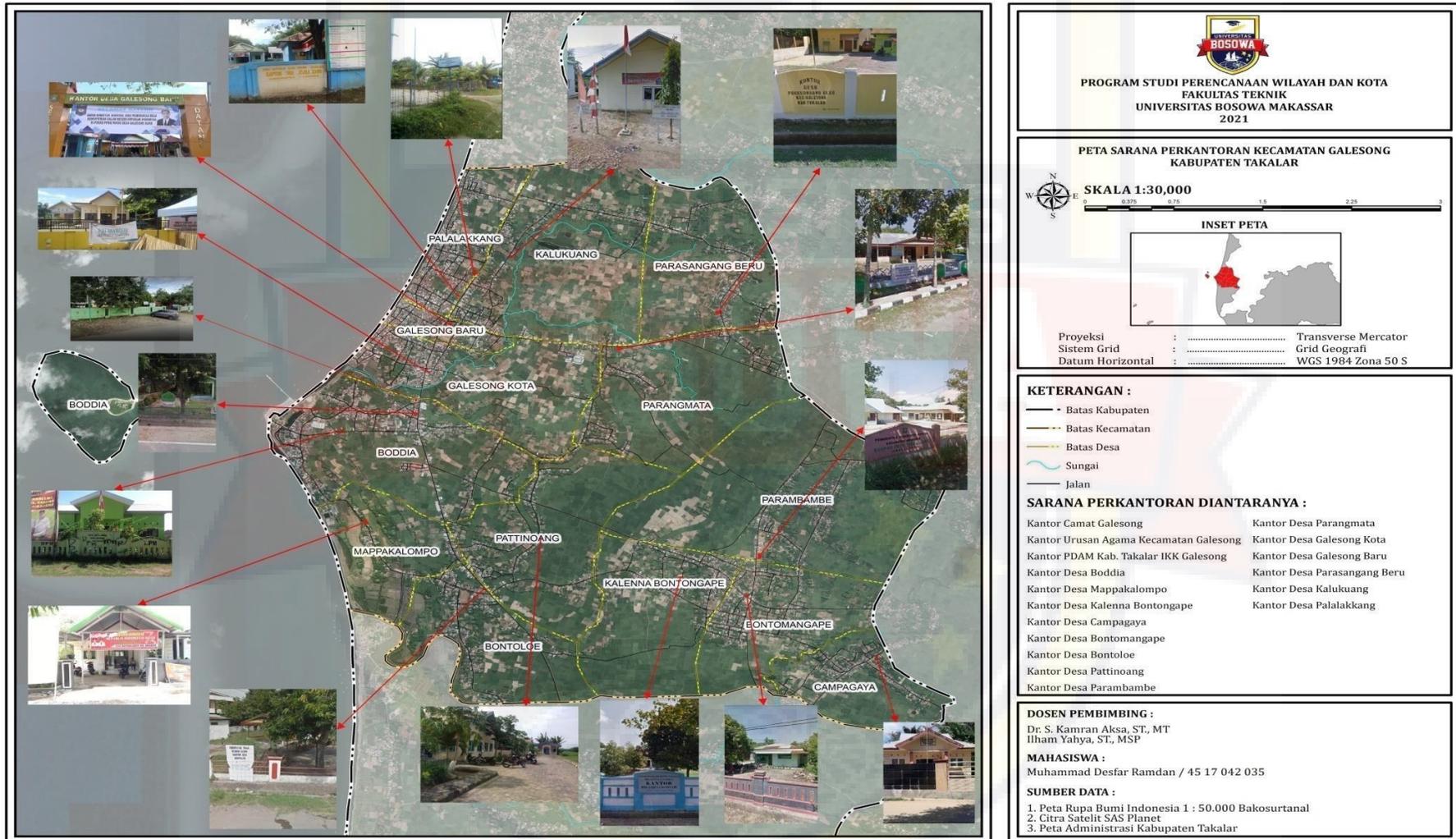
C. Fasilitas Pelayanan Sosial Ekonomi

1. Sarana Perkantoran

Sarana Kantor merupakan fasilitas pelengkap berupa barang atau benda bergerak yang secara langsung dapat digunakan untuk memudahkan pelaksanaan proses kegiatan kantor dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun prasarana kantor merupakan segala sesuatu yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan proses kegiatan kantor yang bersifat permanen atau tetap.

Terdapat beberapa fasilitas perkantoran yang menjadi tempat pelayanan publik bagi masyarakat Galesong diantaranya yang terletak di ibu kota kecamatan (Desa Boddia) yaitu Kantor Camat Galesong, Kantor Desa Boddia, Kantor PDAM Kecamatan Galesong, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong. Sedangkan yang terletak di masing-masing desa adalah kantor desa masing-masing.

Gambar 4.16
Peta Fasilitas Sarana Perkantoran



2. Sarana Perdagangan

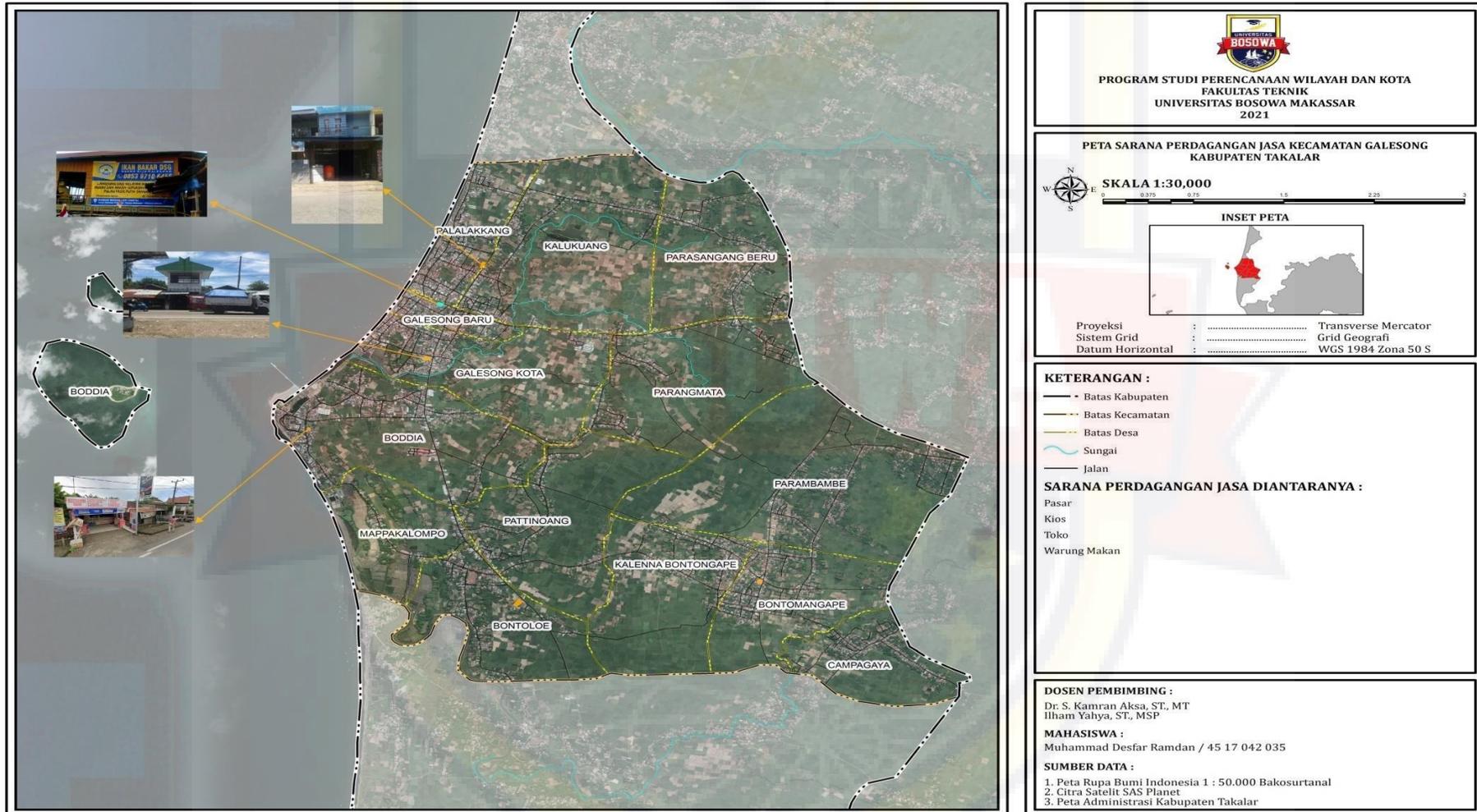
Di Kecamatan Galesong toko sebanyak 66 buah, Kios/Kedai dan warung makan umumnya banyak terdapat di Desa Palalakkang, walaupun Desa ini bukan merupakan ibu kota Kecamatan. Jumlah toko di Desa Palalakkang sebanyak 8 buah, kios/kedai sebanyak 455 buah tersebar di 14 desa di Kecamatan Galesong dan warung makan sebanyak 45 buah. Dan sisanya tersebar di semua desa/kelurahan yang ada di kecamatan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.16.

Tabel 4.18
Jumlah Perdagangan di Kecamatan Galesong Tahun 2019

No	Desa	Pasar	Toko	Kios/Kedai	WarungMakan
1	Bontoloe	1	4	21	3
2	Kalenna Bontongape	-	1	22	4
3	Bontomangape	1	7	17	3
4	Parambambe	-	-	51	1
5	Pattinoang	-	3	27	3
6	Boddia	-	12	32	4
7	Parangmata	-	5	33	2
8	Galesong Kota	1	5	42	3
9	Galesong Baru	-	6	52	6
10	Palalakkang	-	8	58	4
11	Pa'rasangan Beru	-	2	31	2
12	Kalukuang	-	9	19	3
13	Mappakalompo	-	3	33	4
14	Campagaya	-	1	17	3
Jumlah		3	66	455	45

Sumber: Kecamatan Galesong Dalam Angka 2020

Gambar 4.17
Peta Fasilitas Sarana Perdagangan



3. Sarana Pendidikan

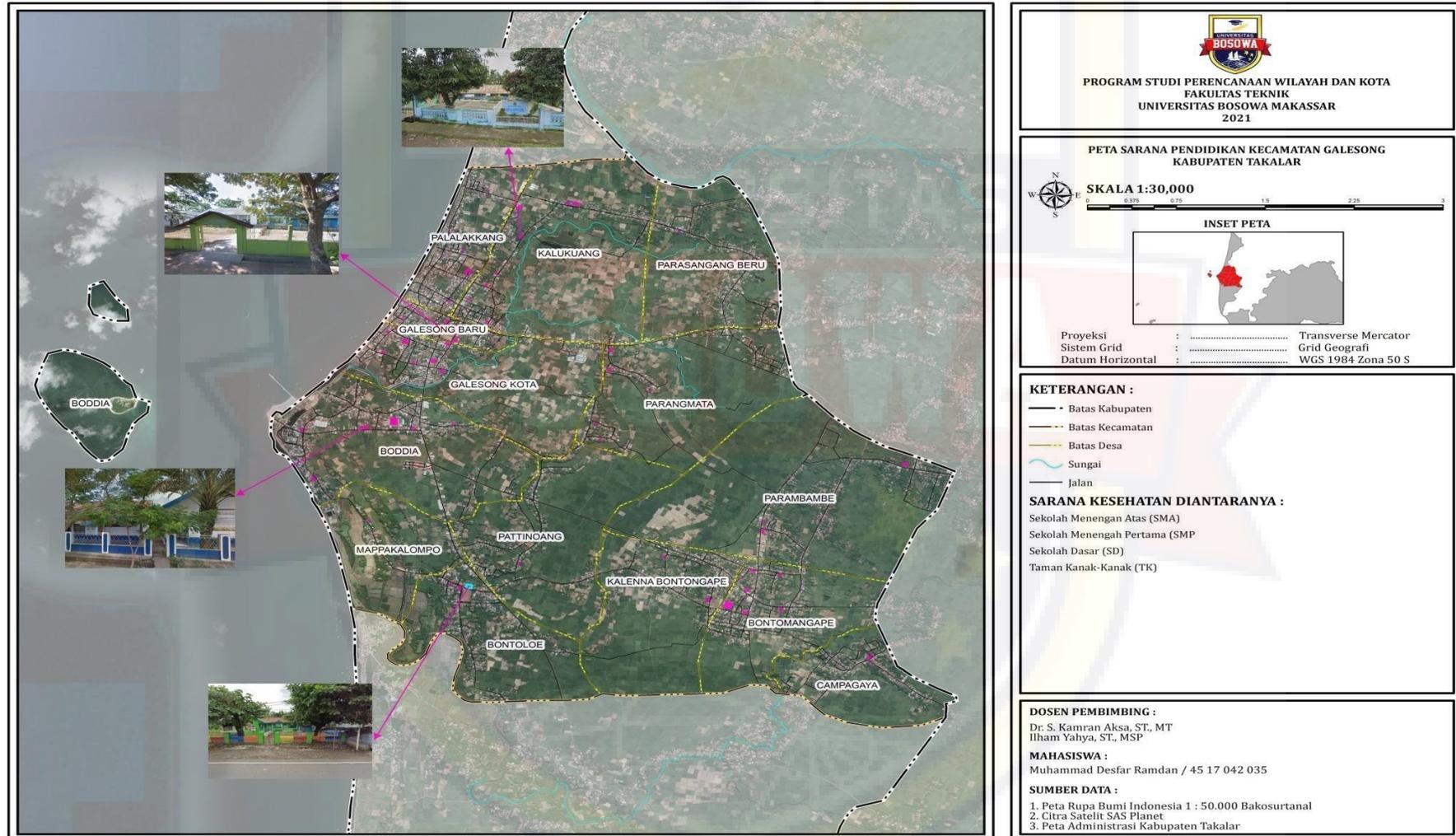
Untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar di wilayah Kecamatan Galesong, maka pemerintah setempat menyediakan fasilitas pendidikan untuk menunjang aktifitas bagi warga Kecamatan Galesong. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.17.

Tabel 4.19
Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Galesong Tahun 2019

No	Desa	TK	SD	SLTP/Sederajat	SLTA/Sederajat
1	Bontoloe	1	2	-	-
2	Kalenna Bontongape	1	1	-	-
3	Bontomangape	1	3	2	1
4	Parambambe	2	1	-	-
5	Pattinoang	-	1	-	-
6	Boddia	2	2	1	1
7	Parangmata	2	2	-	-
8	Galesong Kota	3	3	1	-
9	Galesong Baru	2	2	-	1
10	Palalakkang	3	3	-	-
11	Pa'rasangan Beru	1	-	-	-
12	Kalukuang	1	3	2	2
13	Mappakalompo	-	1	-	-
14	Campagaya	1	1	-	-
Jumlah		20	25	6	5

Sumber: Kecamatan Galesong Dalam Angka 2020

Gambar 4.18
Peta Fasilitas Sarana Pendidikan



4. Sarana Kesehatan

Perhatian pemerintah terhadap kesehatan semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat upaya yang dilakukan adalah pengadaan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan, penambahan dan peningkatan kualitas petugas dan pemberian penyuluhan tentang pentingnya hidup sehat.

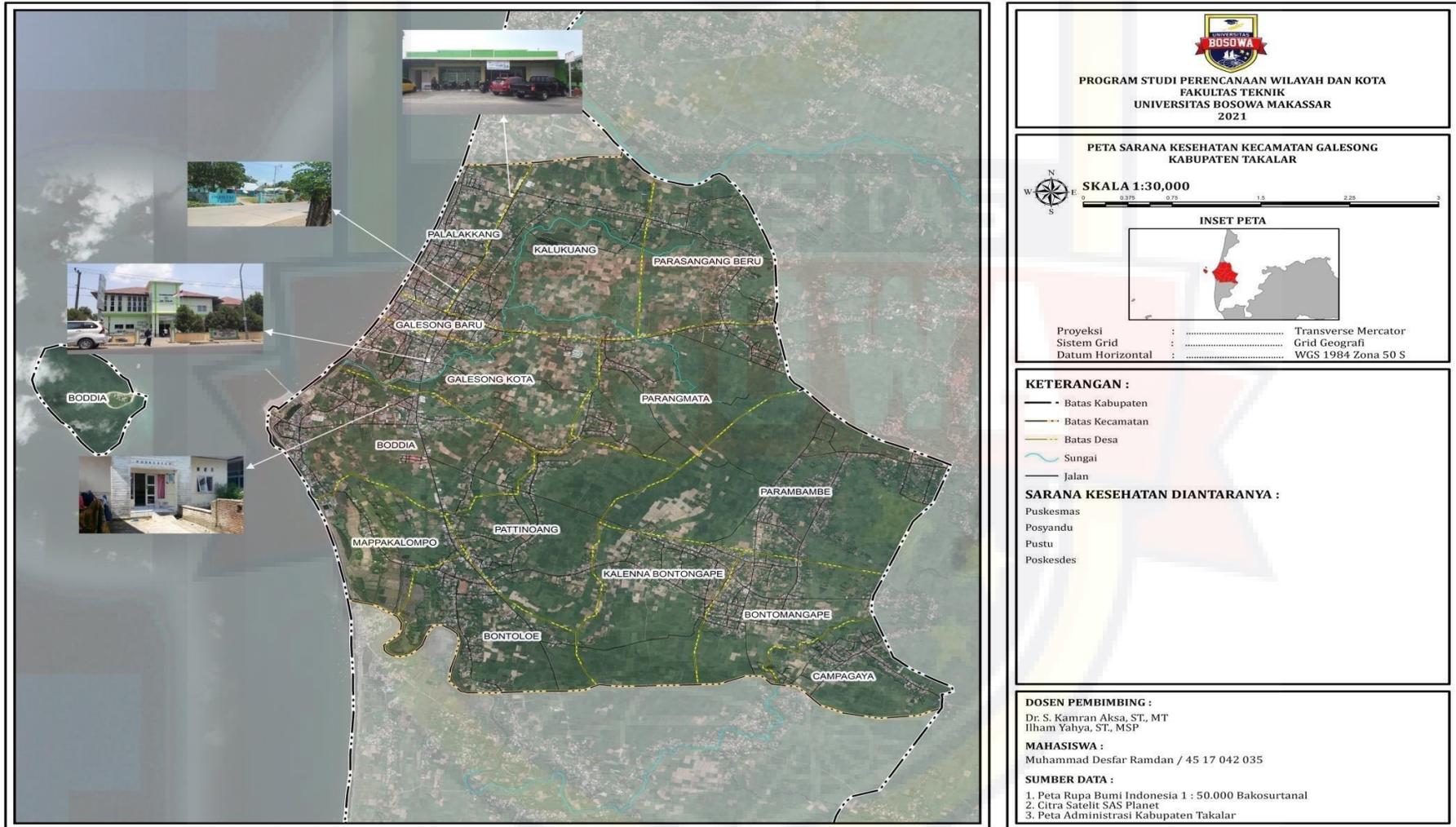
Dari 14 desa yang ada di Kecamatan Galesong, belum semuanya memiliki sarana dan prasarana kesehatan misalnya di Desa Galesong Baru dan Desa Campagaya belum ada puskesmas dan pustu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.18

Tabel 4.20
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Galeong Tahun 2019

No	Desa	Fasilitas Kesehatan				Tenaga Kesehatan			
		Puskesmas	Posyandu	Pustu	Poskesdes	Tenaga Medis	Tenaga Perawat	Tenaga Bidan	Tenaga Farmasi
1	Bontoloe	-	3	1	-	-	-	-	-
2	Kalenna Bontongape	-	4	-	1	-	-	-	-
3	Bontomangape	-	2	1	-	-	-	-	-
4	Parambambe	-	5	1	-	-	-	-	-
5	Pattinoang	-	4	-	1	-	-	-	-
6	Boddia	-	5	-	1	-	-	-	-
7	Parangmata	-	3	1	1	-	-	-	-
8	Galesong Kota	1	5	-	1	4	11	20	1
9	Galesong Baru	-	5	-	-	-	-	-	-
10	Palalakkang	-	6	1	-	-	-	-	-
11	Pa'rasangan Beru	-	5	1	-	-	-	-	-
12	Kalukuang	-	5	-	1	-	-	-	-
13	Mappakalompo	-	3	-	1	-	-	-	-
14	Campagaya	-	3	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1	58	6	7	4	11	20	1

Sumber: Kecamatan Galesong Dalam Angka 2020

Gambar 4.19
Peta Fasilitas Sarana Kesehatan



5. Sarana Peribadatan

Sarana Peribadatan yang ada di Kecamatan Galesong berupa

masjid sebanyak 28 unit yang di semua desa dan 16 mushollah.

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 4.19.

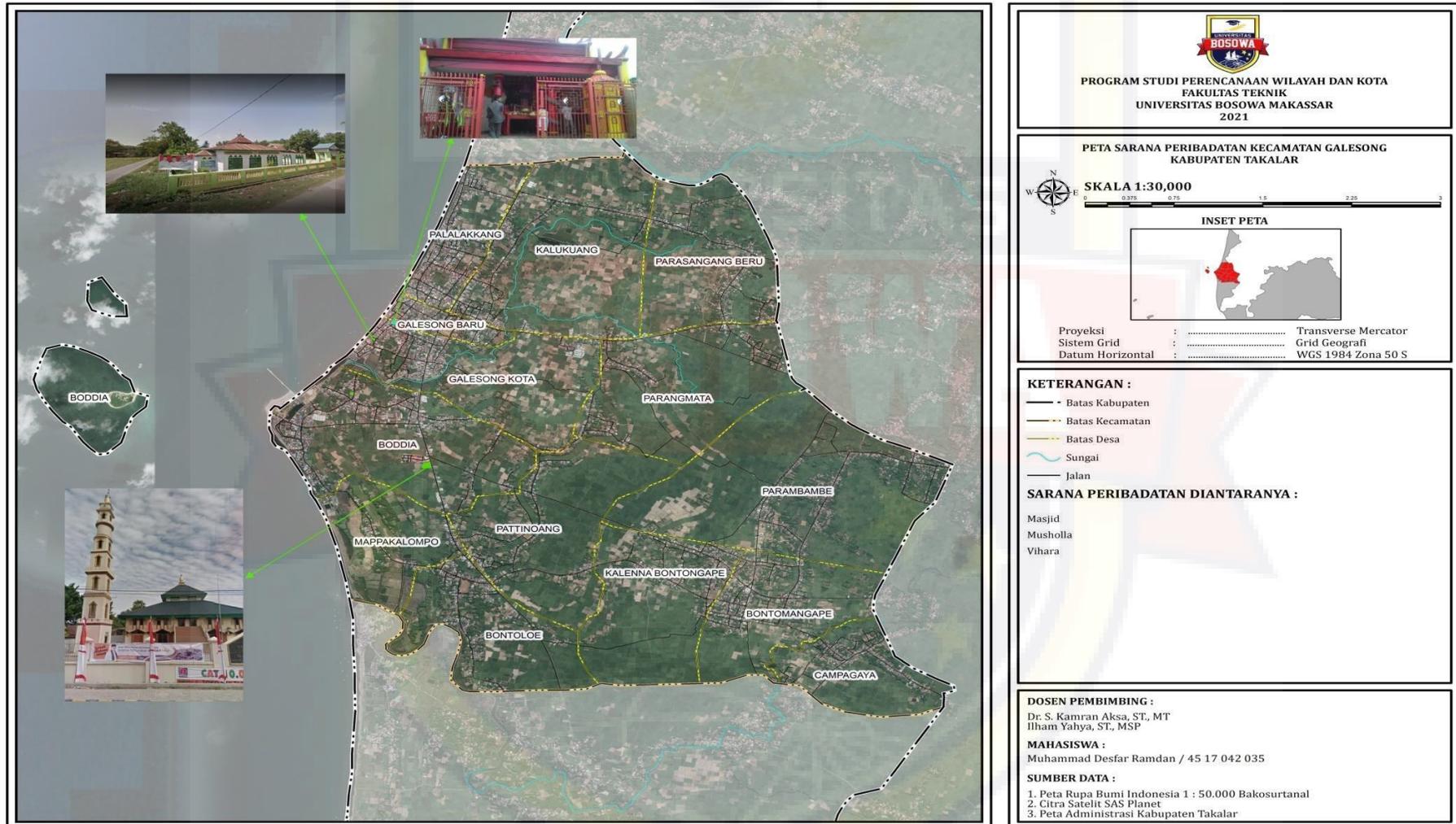
Tabel 4.21

Jumlah Fasilitas Peribadatan di Kecamatan Galesong Tahun 2019

No.	Desa	Fasilitas Peribadatan				
		Masjid	Mushollah	Gereja	Pura	Vihara
1	Bontoloe	6	-	-	-	-
2	Kalenna Bontongape	4	-	-	-	-
3	Bontomangape	2	1	-	-	-
4	Parambambe	6	1	-	-	-
5	Pattinoang	2	-	-	-	-
6	Boddia	9	4	-	-	-
7	Parangmata	4	-	-	-	-
8	Galesong Kota	3	2	-	-	-
9	Galesong Baru	6	1	-	-	1
10	Palalakkang	8	1	-	-	-
11	Pa'rasangan Beru	3	1	-	-	-
12	Kalukuang	5	3	-	-	-
13	Mappakalompo	3	1	-	-	-
14	Campagaya	2	1	-	-	-
Jumlah		63	16	-	-	1

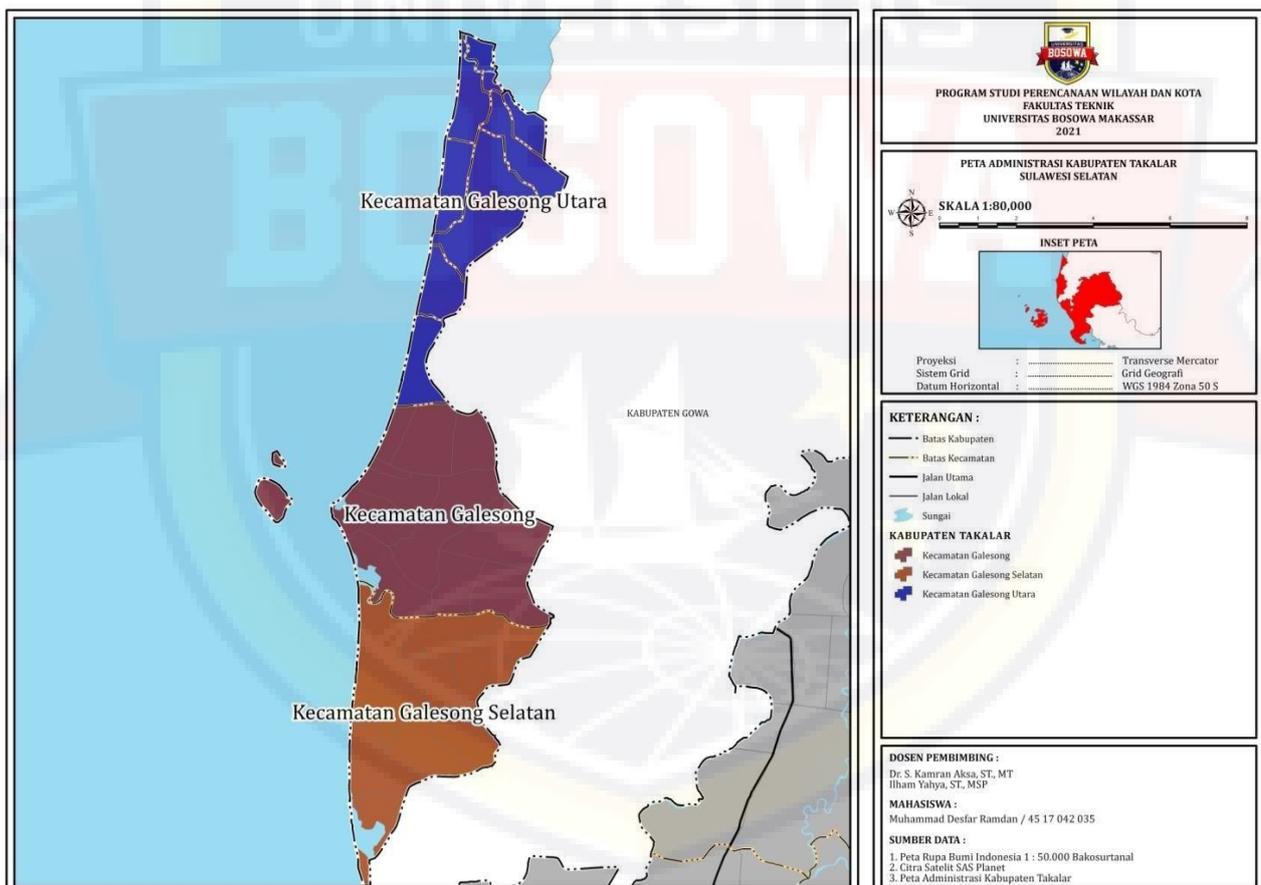
Sumber: Kecamatan Galesong Dalam Angka 2020

Gambar 4.20
Peta Fasilitas Sarana Peribadatan



D. Kaitan Lokasi Penelitian Dengan Kecamatan Lain

Secara geografis, Kecamatan Galesong memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) Kecamatan lainnya diantaranya Kecamatan Galesong Utara dan Kecamatan Galesong Selatan. Keterkaitan yang dimaksud yaitu ketiga Kecamatan tersebut adalah wilayah pesisir yang memiliki beragam potensi sumber daya pesisir. Kecamatan Galesong sendiri merupakan pemekaran dari Kecamatan Galesong Utara dan Kecamatan Galesong Selatan.



Gambar 4.21
Peta Keterkaitan Lokasi Penelitian Dengan Kecamatan Lain

E. Analisis – Analisis Pengembangan Kawasan Pesisir Dengan Pendekatan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Yang Berkelanjutan

1. Analisis SWOT

Berdasarkan rumusan masalah yang ada tentang pengembangan sumber daya pesisir secara berkelanjutan, untuk proses pengembangan menggunakan analisis SWOT. Analisis ini digunakan agar mampu memanfaatkan kekuatan yang ada (*strength*) yang ada, sekaligus juga berupaya untuk mengurangi kelemahan (*weaknesses*) dan meminimalisir ancaman-ancaman (*threats*) yang akan mengganggu dan menghambat pengembangan pengelolaan sumber daya pesisir. Untuk itu perlu ada kajian terhadap kekuatan dan kelemahan sebagai faktor internal secara peluang dan ancaman sebagai faktor eksternal.

a. Internal Kawasan (IFAS)

1) Kekuatan (*Strength*)

- a) Memiliki potensi sumber daya pesisir yang banyak untuk dikembangkan secara berkelanjutan (Aspek Ekonomi)
- b) Tersedianya lahan pengembangan dalam mendukung pengelolaan SDA pesisir (Aspek Lingkungan)
- c) Potensi budidaya perikanan dan kelautan (Aspek Ekonomi)

- d) Potensi pengembangan budaya tangkap (Aspek Ekonomi)
 - e) Dukungan masyarakat dalam menjaga lingkungan pesisir (Aspek Sosial)
 - f) Potensi dikembangkan sebagai destinasi wisata bahari (Aspek Ekonom)
- 2) Kelemahan (*Weaknesses*)
- a) Pemanfaatan SDA pesisir yang belum dilakukan secara optimal (Aspek Ekonomi)
 - b) Kurangnya peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan SDA pesisir (Aspek Sosial)
 - c) Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang sumber daya pesisir (Aspek Lingkungan)
 - d) Tidak adanya sistem pengelolaan potensi SDA yang berkelanjutan (Aspek Ekonomi)
 - e) Lemahnya Informasi dan koordinasi antar sektor (Aspek Sosial)
 - f) Belum tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung pengelolaan SDA pesisir (Aspek Lingkungan)
 - g) Kurangnya pemberdayaan masyarakat pesisir (Aspek Sosial)

b. Internal Faktor (EFAS)

1) Peluang (*Opportunities*)

- a) Dalam kebijakan nasional dimana Kabupaten Takalar ditetapkan sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional) (Aspek Ekonomi)
- b) Berdasarkan RTRW Kabupaten Takalar Tahun 2012-2031, Pulau Sanrobengi dan Pantai Boe merupakan kawasan peruntukan Wisata Alam (Aspek Ekonomi)
- c) Aksesibilitas yang sangat mendukung (Aspek Sosial)
- d) Tingkat interaksi dengan Kota Makassar cukup tinggi (Aspek Sosial)
- e) Kebijakan tata ruang menjadi bagian dari pengembangan SDA pesisir di Kabupaten Takalar (Aspek Ekonomi)

2) Ancaman (*Threats*)

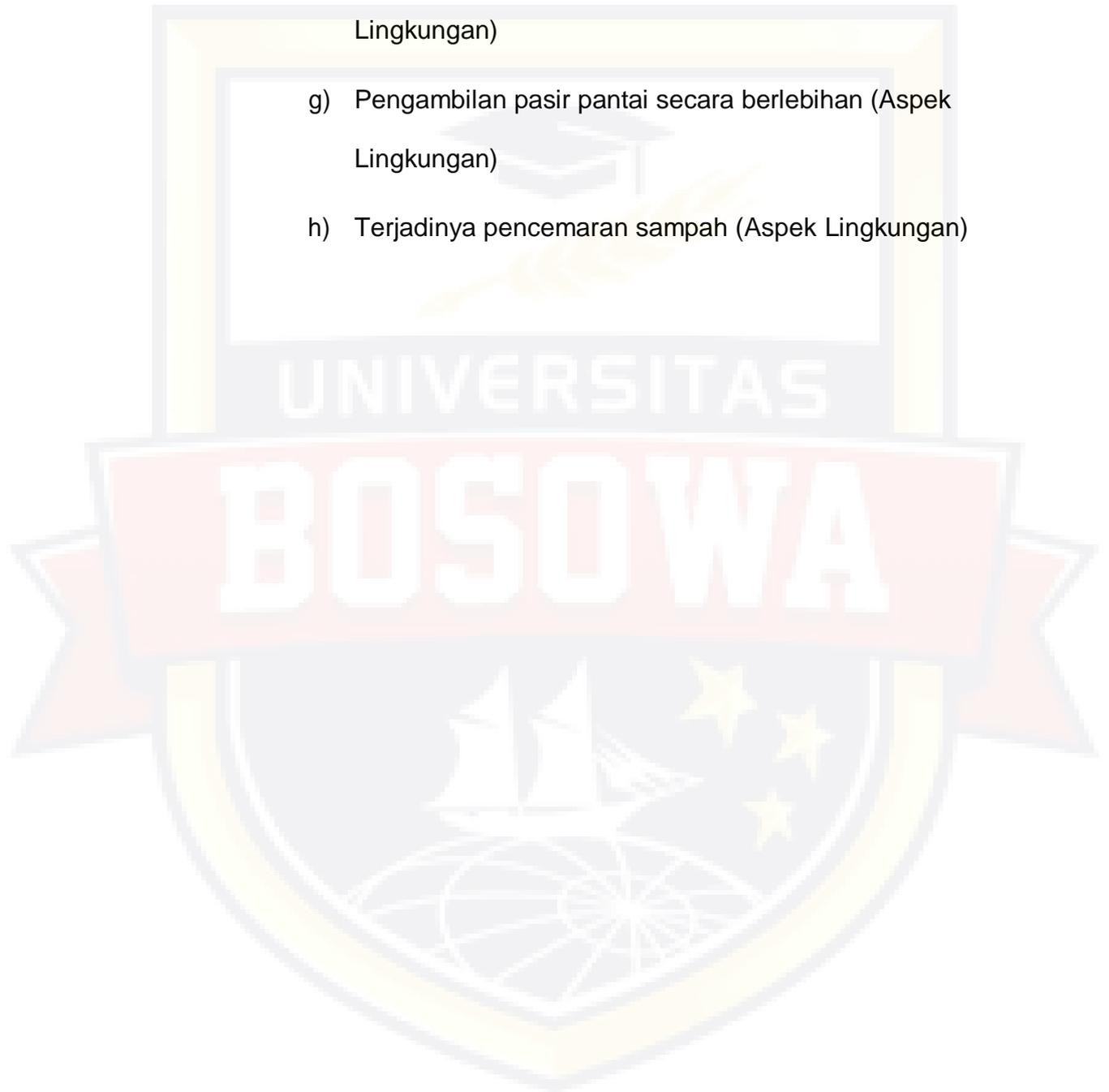
- a) Terjadinyakerusakan lingkungan di sekitar kawasan pesisir apabila tidak diperhatikan (AspekLingkungan)
- b) Terjadinyapertambahanangkakemisikinan di KawasanPesisir (Aspek Ekonomi)
- c) Kurangnya perhatian pemerintah dalam melestarikan obyek wisata (Aspek Sosial)
- d) Ancaman abrasi pantai dan tsunami (Aspek Lingkungan)
- e) Terancamnya kawasan mangrove oleh aktivitas

masyarakat sekitar (Aspek Lingkungan)

f) Terancam dan rusaknya terumbu karang (Aspek Lingkungan)

g) Pengambilan pasir pantai secara berlebihan (Aspek Lingkungan)

h) Terjadinya pencemaran sampah (Aspek Lingkungan)



Tabel 4.22
Matriks Analisis SWOT Pengembangan Sumber daya Pesisir
Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar

INTERNAL EKSTERNAL	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki potensi sumber daya pesisir yang banyak untuk dikembangkan secara berkelanjutan 2. Tersedianya lahan pengembangan dalam mendukung pengelolaan SDA pesisir 3. Potensi budidaya perikanan dan kelautan 4. Potensi pengembangan budidaya tangkap 5. Dukungan masyarakat dalam menjaga lingkungan pesisir 6. Potensi dikembangkan sebagai destinasi wisata bahari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan SDA pesisir yang belum dilakukan secara optimal 2. Kurangnya peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan SDA pesisir 3. Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang sumber daya pesisir 4. Tidak adanya sistem pengelolaan potensi SDA yang berkelanjutan 5. Lemahnya Informasi dan koordinasi antar sektor 6. Belum tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung pengelolaan SDA pesisir 7. Kurangnya pemberdayaan masyarakat pesisir
Peluang (<i>Oppurtunities</i>)	Strategi SO (<i>Strengths and Oppurtunities</i>)	Strategi WO (<i>Weaknesses and Oppurtunities</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam kebijakan nasional dimana Kabupaten Takalar ditetapkan sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional) 2. Berdasarkan RTRW Kabupaten Takalar Tahun 2012-2031, Pulau Sanrobengi dan Pantai Boe merupakan kawasan peruntukan Wisata Alam 3. Aksesibilitas yang sangat mendukung 4. Tingkat interaksi dengan Kota Makassar cukup tinggi 5. Kebijakan tata ruang menjadi bagian dari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan SDA pesisir berbasis pada perlindungan potensi pesisir 2. Pengendalian pemanfaatan SDA pesisir secara berkelanjutan 3. Menjadikan potensi SDA pesisir untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan 4. Implementasi kebijakan di dalam pengelolaan SDA secara berkelanjutan 5. Mengarahkan pengelolaan potensi SDA pesisir dengan mengutamakan pengelolaan pada aspek 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlibatan masyarakat luas dalam pengelolaan masyarakat pesisir 2. Pemerintah sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi khususnya bagi masyarakat pesisir 3. Penguatan kebijakan dan kelembagaan dalam pengelolaan SDA peisir 4. Menjadikan kearifan lokal sebagai peran utama dalam pengelolaan SDA pesisir 5. Sosialisasi kebijakan tata ruang sebagai bagian dari upaya pengelolaan pesisir secara

<p>pengembangan SDA pesisir di Kabupaten Takalar</p>	<p>lingkungan pemanfaatan ekonomi dan peningkatan sosial masyarakat pesisir</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung pengelolaan SDA pesisir 7. Diperlukan upaya pengelolaan dengan promosi potensi SDA 8. Diperlukannya dukungan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir 9. meningkatkan aksesibilitas dalam mendukung pengelolaan SDA pesisir 	<p>berkelanjutan</p>
<p>Ancaman (<i>Threats</i>)</p>	<p>Strategi ST (<i>Strength and Threats</i>)</p>	<p>Strategi WT (<i>Weaknesses and Threats</i>)</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya kerusakan lingkungan disekitar kawasan pesisir apabila tidak diperhatikan 2. Terjadinya pertambahan angka kemiskinan di Kawasan Pesisir 3. Kurangnya perhatian pemerintah dalam melestarikan potensi wilayah pesisir 4. Ancaman abrasi pantai dan tsunami 5. Terancamnya kawasan mangrove oleh aktivitas masyarakat sekitar 6. Terancam dan rusaknya terumbu karang 7. Pengambilan pasir pantai secara berlebihan 8. Terjadinya pencemaran sampah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga lingkungan sekitar kawasan pesisir 2. Melakukan sosialisasi terhadap penduduk atau masyarakat untuk terus mengembangkan potensi sumber daya pesisir yang ada 3. Mengedukasi masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir 4. Dilakukan upaya mitigasi bencana abrasi pantai tsunami 5. Pengendalian dan pencegahan pembangunan fisik di sekitar wilayah pesisir 6. Penguatan dan implementasi kebijakan tata ruang dan RZWP3K 7. Tidak diperbolehkan pengambilan terumbu karang dan pasir pantai 8. Membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat pesisir di dalam mengurangi tingkat kemiskinan 9. Peran serta pemerintah di dalam pengelolaan secara berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya ancaman bencana pada wilayah pesisir 2. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasaran sebagai upaya dalam pengelolaan wilayah pesisir 3. Menjadikan potensi SDA pesisir sebagai destinasi baru yang mampu meningkatkan potensi ekonomi dengan menjaga lingkungan dan sosial masyarakat 4. Menjadikan pemerintah dan masyarakat sebagai kekuatan dalam melakukan pengelolaan SDA secara berkelanjutan

Sumber: Hasil Analisis 2020

Berdasarkan matriks SWOT yang ada, maka hasil analisis mengenai pengembangan kawasan pesisir dengan pendekatan pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan maka kita menggunakan Strategi (SO) yaitu strategi yang mengoptimalkan kekuatan (*strength*) untuk memanfaatkan peluang (*opportunities*), yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menjaga lingkungan sekitar kawasan pesisir
2. Melakukan sosialisasi terhadap penduduk atau masyarakat untuk terus mengembangkan potensi sumber daya pesisir yang ada
3. Mengedukasi masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir
4. Dilakukan upaya mitigasi bencana abrasi pantai tsunami
5. Pengendalian dan pencegahan pembangunan fisik di sekitar wilayah pesisir
6. Penguatan dan implementasi kebijakan tata ruang dan RZWP3K
7. Tidak diperbolehkan pengambilan terumbu karang dan pasir pantai
8. Membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat pesisir di dalam mengurangi tingkat kemiskinan
9. Peran serta pemerintah di dalam pengelolaan secara berkelanjutan

Selanjutnya setelah mendapatkan data melalui survey langsung dan wawancara dengan responden langkah selanjutnya dengan pembobotan, rating dari masing-masing faktor sehingga akan didapatkan total skor untuk faktor strategi internal dan total skor untuk faktor eksternal. Berikut ini matriks faktor internal (IFAS) sebagai berikut:

Tabel 4.23
INTERNAL STRATEGI FACTOR ANALYSIS (IFAS)

Faktor Strategi Internal	Bobot	Nilai	Bobot XNilai
KEKUATAN (S)			
1. Memiliki potensi sumber daya pesisir yang banyak untuk dikembangkan secara berkelanjutan	20	4	80
2. Tersedianya lahan pengembangan dalam mendukung pengelolaan SDA pesisir	20	3	60
3. Potensi budidaya perikanan dan kelautan	15	4	60
4. Potensi pengembangan budidaya tangkap	15	3	45
5. Dukungan masyarakat dalam menjaga lingkungan pesisir	15	4	60
6. Potensi dikembangkan sebagai destinasi wisata bahari	15	4	60
TOTAL	100		365
KELEMAHAN (W)			
1. Pemanfaatan SDA pesisir yang belum dilakukan secara optimal	10	3	30
2. Kurangnya peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan SDA pesisir	15	3	30
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang sumber daya pesisir	15	4	60

4. Tidak adanya sistem pengelolaan potensi SDA yang berkelanjutan	15	3	45
5. Lemahnya informasi dan koordinasi antar sektor	15	3	45
6. Belum tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung pengelolaan SDA pesisir	15	3	45
7. Kurangnya pemberdayaan masyarakat pesisir	15	2	30
TOTAL SKOR	100		285

Sumber: Hasil Analisis 2020

Keterangan Nilai:

1= Tidak Baik 2= Kurang Baik 3= Baik 4= Sangat Baik

Tabel 4.24
EKSTERNAL STRATEGI FACTOR ANALYSIS (EFAS)

Faktor Strategi External	Bobot	Nilai	Bobot X Nilai
PELUANG (O)			
1. Dalam kebijakan nasional dimana Kabupaten Takalar ditetapkan sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional)	25	3	75
2. Berdasarkan RTRW Kabupaten Takalar Tahun 2012-2031, Pulau Sanrobengi dan Pantai Boe merupakan kawasan peruntukan Wisata Alam	20	4	80
3. Aksesibilitas yang sangat mendukung	25	3	75
4. Tingkat interaksi dengan Kota Makassar cukup tinggi	15	4	60
5. Menjadi bagian dari pengembangan SDA pesisir di Kabupaten Takalar	15	3	45
TOTAL	100		335
ANCAMAN (T)			
1. Terjadinya kerusakan lingkungan disekitar kawasan pesisir apabila tidak diperhatikan	20	3	60
2. Terjadinya pertambahan angka kemiskinan di kawasan pesisir	20	3	60

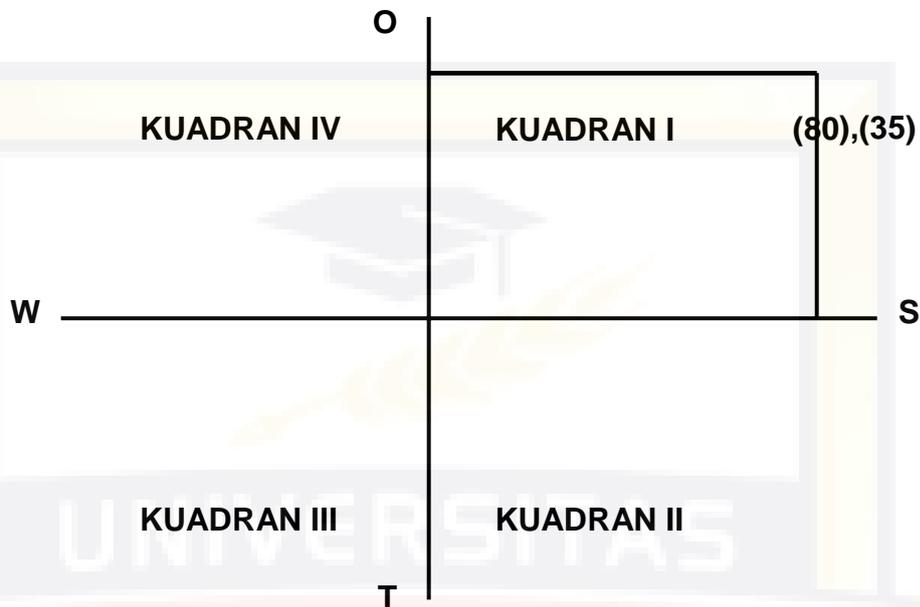
3. Kurangnya perhatian pemerintah dalam melestarikan potensi wilayah pesisir	10	3	30
4. Ancaman abrasi pantai dan tsunami	15	3	45
5. Terancamnya kawasan mangrove oleh aktivitas masyarakat sekitar	10	3	30
6. Terancam dan rusaknya terumbu karang	15	3	45
7. Pengambilan pasir pantai secara berlebihan	10	3	30
TOTALSKOR	100		300

Sumber: Hasil Analisis 2020

Keterangan Nilai:

1= Tidak Baik 2= Kurang Baik 3= Baik 4= Sangat Baik

- Skema Analisis SWOT



Gambar 4.22 Skema Analisis SWOT

Berdasarkan hasil perhitungan dengan skor IFAS (Kekuatan dan Kelemahan), yaitu $365 - 285 = 80$, sedangkan skor EFAS (Peluang dan Ancaman) yaitu $335 - 300 = 35$. Maka nilai IFAS dan EFAS sama-sama menunjukkan nilai positif (+) sehingga pengembangan pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan yaitu di antara strategi kelemahan dan peluang (SO) yaitu pada Kuadran I

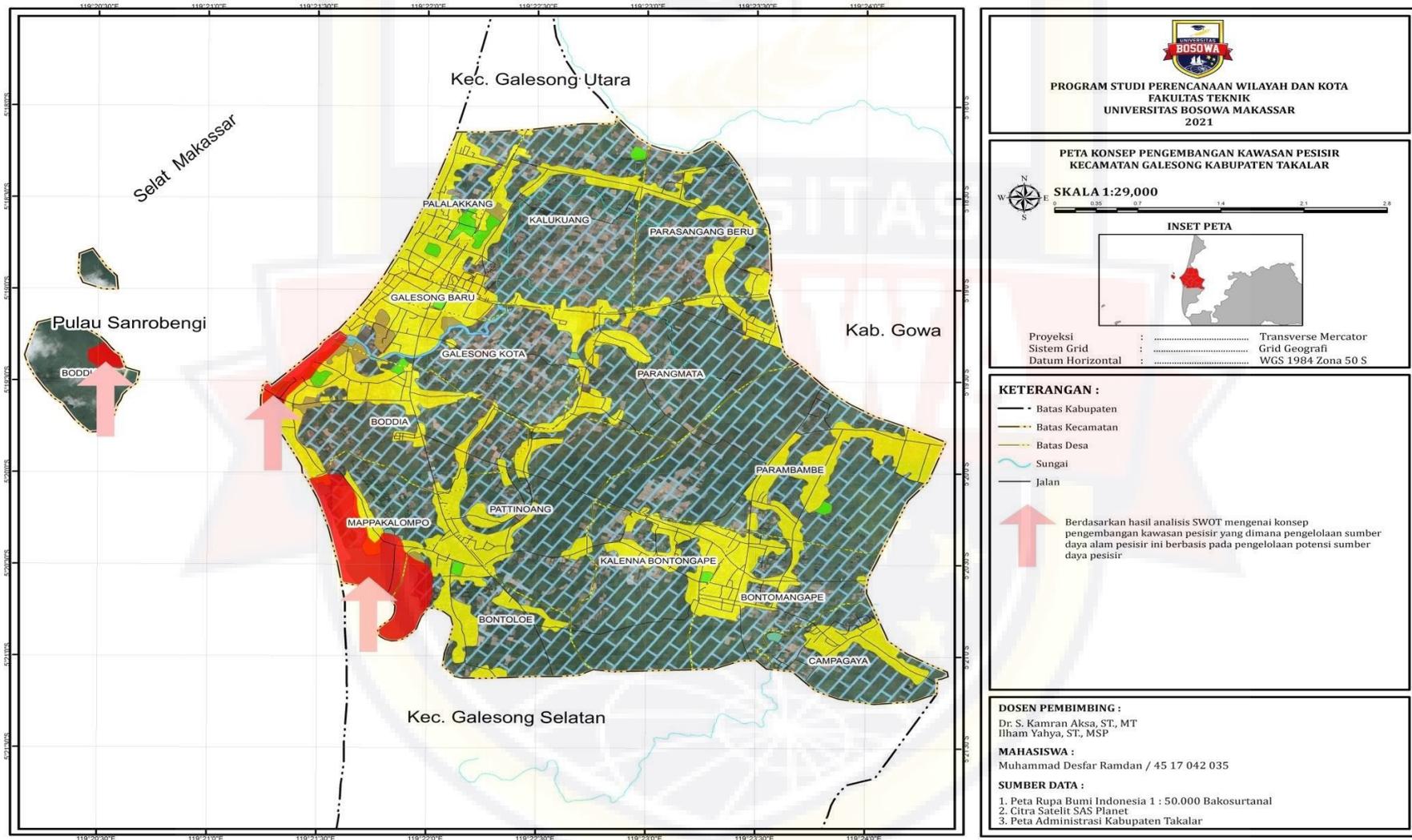
Kesimpulan:

- (IFAS) = Kekuatan - Kelemahan = $365 - 285 = 80$ (y)
- (EFAS) = Peluang - Ancaman = $335 - 300 = 35$ (x)

Berdasarkan analisis tersebut maka strategi yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan SDA pesisir berbasis pada perlindungan potensi pesisir
2. Pengendalian pemanfaatan SDA pesisir secara berkelanjutan
3. Menjadikan potensi SDA pesisir untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan
4. Implementasi kebijakan di dalam pengelolaan SDA secara berkelanjutan
5. Mengarahkan pengelolaan potensi SDA pesisir dengan mengutamakan pengelolaan pada aspek lingkungan pemanfaatan ekonomi dan peningkatan sosial masyarakat pesisir
6. Pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung pengelolaan SDA pesisir
7. Diperlukan upaya pengelolaan dengan promosi potensi SDA
8. Diperlukannya dukungan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir
9. Meningkatkan aksesibilitas dalam mendukung pengelolaan SDA pesisir

Gambar 4.23
Peta Konsep Pengembangan Kawasan Pesisir



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan tentang strategi pengembangan kawasan pesisir dengan pengelolaan berkelanjutan di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar yaitu :

1. Pengelolaan SDA pesisir berbasis pada perlindungan potensi pesisir
2. Pengendalian pemanfaatan SDA pesisir secara berkelanjutan
3. Menjadikan potensi SDA pesisir untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan
4. Implementasi kebijakan di dalam pengelolaan SDA secara berkelanjutan
5. Mengarahkan pengelolaan potensi SDA pesisir dengan mengutamakan pengelolaan pada aspek lingkungan pemanfaatan ekonomi dan peningkatan sosial masyarakat pesisir
6. Pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung pengelolaan SDA pesisir
7. Diperlukan upaya pengelolaan dengan promosi potensi SDA
8. Diperlukannya dukungan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir
9. Meningkatkan aksesibilitas dalam mendukung pengelolaan SDA pesisir

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah, antara lain :

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar meliputi :
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk mengembangkan potensi sumber daya pesisir yang ada di Kecamatan Galesong secara berkelanjutan.
 - b. Pemerintah dituntut untuk terus memperhatikan dan mengadakan pemeliharaan pada sumber daya pesisir yang ada di Kecamatan Galesong.
2. Kepada masyarakat di Kecamatan Galesong, khususnya yang berada pada kawasan pesisir agar lebih memperhatikan aspek ekologis agar keseimbangan lingkungan dan kealamian alam tetap terpelihara sehingga dapat bersinergi dengan pemerintah dalam menjaga dan mengembangkan potensi sumber daya pesisir yang ada di kawasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Syaiful. 2014. Pengelolaan Kawasan Pesisir Secara Terpadu Dan Berkelanjutan Berbasis Masyarakat, (Media Online: <https://pengelolaan-kawasan-pesisir-secara-terpadu-dan-berkelanjutan-berbasis-masyarakat-dipertasby.html>. 2014) diakses pada 10 April 2016
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sulawesi Tengah. 2005. Rencana Pengelolaan Propinsi Sulawesi Tengah Kawasan “*Marine and Costal Management Are (MCMA)*”. Proyek Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut. Sulawesi Tengah
- Basuki dan Djunaedi. 2002. Perencanaan Pengembangan Kawasan Pesisir. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Vol 3, No 3, September 2002: 225-231
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar dalam angka 2020
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar dalam angka 2019
- Badan Pusat Statistik Kecamatan Galesong dalam angka 2020
- Badan Pusat Statistik Kecamatan Galesong dalam angka 2019
- Badan Pusat Statistik Kecamatan Galesong dalam angka 2018
- Bengen, D. 2009, *Pentingnya Keterpaduan dalam Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil sebagai Pilar Pembangunan Berkelanjutan*. IPB

Bryant, C. dan L.G. White. 1989. Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. LP3ES, Jakarta

Dahuri, R. 1996. *Penerapan Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan, makalah Seminar Sehari Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu*. PPLH-IPB, Ditjen Bangda dan ABD. Bogor, April

Dahuri, R., J. Rais, S.P. Ginting dan M.K. Sitepu, 1996. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Pradnya Paramita, Jakarta

Dahuri, Rokhmin. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. PT Pradnya Paramita. Jakarta.

Djojohadikusumo, S. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. PT. Pustaka LP3ES, Jakarta

Depry Nur Annisa Ahmad. 2014. *Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Tepian Air (Waterfont) Kota Bulukumba Kabupaten Bulukumba*, Skripsi Sarjana. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar

Jufriadi. 2014. *Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*. Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA), Yogyakarta

Muis, La Sara, Dasmin Sidu, 2010. *Pengembangan Kawasan Pesisir Di Kecamatan Abeli Kota Kendari*. Kendari

Muta'ali, Lutfi. 2012. *Daya Dukung Lingkungan Untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFGE): Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Nadjib, M. 1998. *Adaptasi Ekonomi Masyarakat Nelayan: Alternatif dan Ketidakpastian Lingkungan, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, JEP VI No.2, hal 61-74*

Nurani, Neni. 2012. *Pemanfaatan Pengelolaan Wilayah Pesisir*, (Media Online: <https://pelajar-mahasiswa-rangkuman-materi-kuliah-pemanfaatan-pengelolaan-wilayah-pesisir.html>. 2012) diakses pada 10 April 2016

Patria, Andreas D. 1999. *Analisis Kebijakan Pengembangan Parawisata Pesisir Dengan Pendekatan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir yang Berkelanjutan (Studi Kasus di Pesisir Utara Pulau Bintan Kepulauan Riau)*. Tesis Magister Sains. Institut Pertanian Bogor, Bogor

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 2012.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar 2012-2031.

Rahmat Hidayat, 2014. *Studi Pengembangan Kawasan Wisata Taman Purbakala Gojeng Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*. Skripsi Sarjana. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Takalar Tahun 2012-2031

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Suparmoko. M, 2008. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yogyakarta.

Tabau, Nurhan. 2011. *Desentralisasi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Kawasan Teluk Bone Kabupaten Luwu (Studi Kebijakan dan Analisis Stakeholder)*. Skripsi Sarjana. Institut Pertanian Bogor, Bogor

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Desfar Ramdan adalah penulis skripsi ini. Lahir di Makassar pada tanggal 18 Desember 1999. Penulis merupakan Anak keempat dari 4 bersaudara, dari pasangan Muhammad Arifin, ST dan Surianti, B.Sc Penulis pertama kali masuk pendidikan di SD Negeri Bukit Permai pada tahun 2005 dan tamat pada tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Namlea dan tamat pada tahun 2014. Setelah tamat di SMP, penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Namlea dan tamat pada tahun 2017. Dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Bosowa Makassar Fakultas Teknik Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota dan tamat pada tahun 2022.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia perencanaan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Yang Berkelanjutan Bagi Pengembangan Kawasan Pesisir Di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar”**.